LAPORAN KINERJA

PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

TAHUN 2019

BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2019 dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar prestasi yang telah dicapai.

Melalui LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja Pusat ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang telah dicapai dalam Tahun 2019. Terkait dengan hal itu diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja aparat.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas dimasa mendatang sangat diharapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

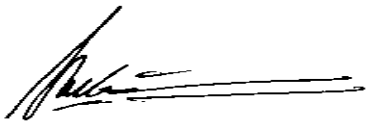

Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP
NIP. 197205151998031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyelenggarakan fungsinya dalam : (1) Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (2) Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (3) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (4) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (5) Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (6) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan BKP Kementerian Pertanian, disusun Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2015-2019, yaitu: **“Pemantapan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”.**

Untuk mencapai visi di atas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengemban misi, yaitu: (1) Memantapkan hasil analisis ketersediaan dan akses pangan sebagai bahan rumusan kebijakan; (2) Memantapkan analisis potensi sumber daya pangan dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi komoditas strategis nasional; (3) Memantapkan hasil analisis stok pangan (gabah dan beras) yang ada di masyarakat dalam rangka mendukung upaya peningkatan akses pangan masyakarat; (4) Memantapkan analisis akses pangan rumah tangga sebagai bahan rumusan kebijakan penyediaan pangan; (5) Memantapkan hasil analisis kerawanan pangan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan; (6) Memantapkan penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan; (7) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.

Sebagai penjabaran visi dan misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Menyediakan instrumen analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan; (2) Menyediakan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan; (3) Menyediakan data dan informasi stok gabah dan beras di masyarakat; (4) Menyediakan data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat wilayah; (5) Menyediakan data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan; (6) Mengembangkan desa, dan kawasan mandiri pangan, serta korporasi usahatani ; (7) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sumber daya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun rencana kerja tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 dengan sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu : (1) Tersedianya instrument analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan; (2) Tersedianya bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan; (3) Tersedianya data dan informasi stok gabah dan beras di masyarakat; (4) Tersedianya data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat wilayah; (5) Tersedianya data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan; (6) Menguatnya kemandirian pangan masyarakat di desa, kawasan, dan lokasi Pengembangan Korporasi Usahatani ; (7) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.

Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen, yang diukur dengan indikator kinerja: Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional. Adapun indikator kinerja aktifitas adalah: (1) Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional; (2) Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi; (3) Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan.

Untuk mendukung sasaran strategis stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen, pada tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.475.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 45.299.617.213,- atau 95,42 persen yang dilaksanakan melalui Satker BKP Kementerian Pertanian, untuk kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 20.642.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 20.022.973.381,- atau 97,00 persen dan di daerah sebesar Rp. 26.833.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 25.276.643.832,- atau 94,20 persen.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, laporan baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran, dan belum dapat menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini diakibatkan oleh sistem penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		viii
DAFTAR LAMPIRAN		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	2
	C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II	**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**	**5**
	A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	5
	1. Visi	5
	2. Misi	5
	3. Tujuan	5
	4. Sasaran Strategis	6
	5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	8
	6. Program	8
	7. Kegiatan Utama	9
	8. Indikator Kinerja	10
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	14
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	**15**
	A. Capaian Kinerja	15
	1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	15
	2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama Lima Tahun Terakhir (2015-2019)	20
	3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan	27
	4. Hambatan/permasalahan dan upaya perbaikan ke depan	28
	B. Realisasi Anggaran	30
	C. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2019	32
	D. Hasil Kinerja Tahun 2019	32
	E. Capaian Kinerja Lainnya	107
	F. Dukungan Instansi Lain	117
IV	**PENUTUP**	**119**
	A. Kesimpulan	119
	B. Saran	119

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019	6
2	Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Indikstor Kinerja Aktifitas (IKA) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019 (setelah revisi)	11
3	Target Indikator Kinerja Aktifitas (IKA) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019 (setelah revisi)	11
4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019 (sebelum revisi)	12
5	Indikator Kinerja Aktifitas Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019 (sebelum revisi)	13
6	Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019	14
7	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	15
8	Perhitungan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional	16
9	Skala rasio produksi/ketersediaan terhadap kebutuhan pangan (beras)	17
10	Skala pangsa pengeluaran pangan	18
11	Crosstabulasi penentuan indeks keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi tahun 2019	18
12	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	21
13	Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019	31
14	Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 yang dikelola di Pusat	31
15	Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 yang dikelola di Daerah	31
16	Perhitungan NBM Tahun 2017, 2018 dan 2019	33
17	Pola konsumsi padi-padian, umbi-umbian dan pangan hewani	38
18	Konsumsi energi kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian di provinsi Papua tahun 2013-2018	39
19	Pola Pangan Harapan Regional (Pola 2)	40
20	Pola Pangan Harapan Regional (Pola 3)	41
21	Perbandingan energi, protein dan lemak kecamatan Losari tahun 2017 dan 2018	43
22	Perkembangan energi, protein dan lemak per kapita per hari berdasarkan NBM kecamatan Losari tahun 2017	45
23	Ketersediaan energi dan protein tahun 2017 terhadap rekomendasi WNPG X tahun 2012	46

Tabel		Halaman
24	Perkembangan energi, protein dan lemak per kapita per hari berdasarkan NBM Kecamatan Losari Tahun 2018	46
25	Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan Rekomendasi WNPG X Tahun 2012	47
26	Perbandingan Energi, Protein, dan Lemak Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017 dan 2018	47
27	Perkembangan energi, protein dan lemak per kapita per hari berdasarkan NBM Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017	50
28	Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2017 terhadap Rekomendasi WNPG X Tahun 2012	50
29	Perkembangan energi, protein dan lemak per kapita per hari berdasarkan NBM Kecamatan Bojongmanik Tahun 2018	51
30	Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan Rekomendasi WNPG X Tahun 2012	51
31	Sampel Kajian Uji Validitas Monitoring Stok Beras di Penggilingan	62
32	Gambaran hasil evaluasi di tahap penumbuhan	81
33	Serapan Setara Beras Bulog 2017-2019 untuk program jaminan sosial (ton setara beras/bulan)	85
34	Sergap Jan-Feb 2019 Awal	86
35	Target dan Realisasi Jan-Des 2019 di 5 Provinsi Sentra	87
36	Realisasi 32 provinsi terbesar 30 Desember 2019	87
37	Kegiatan intervensi rawan pangan	88
38	Lokasi survey dan jumlah responden	90
39	Ringkasan Indikator Indeks Akses Pangan	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Ketersediaan energi (total, nabati dan hewani) kecamatan Losari tahun 2017 dan 2018	43
2	Ketersediaan protein (total, nabati dan hewani) kecamatan Losari tahun 2017 dan 2018	44
3	Ketersediaan lemak (total, nabati dan hewani) kecamatan Losari tahun 2017 dan 2018	44
4	Ketersediaan energi (total, nabati dan hewani) kecamatan Bojongmanik tahun 2017 dan 2018	48
5	Ketersediaan protein (total, nabati dan hewani) kecamatan Bojongmanik tahun 2017 dan 2018	48
6	Ketersediaan lemak (total, nabati dan hewani) kecamatan Bojongmanik tahun 2017 dan 2018	49
7	Peta potensi jagung kabupaten Kupang	54
8	Peta potensi kacang hijau kabupaten Kupang	55
9	Peta potensi ubi kayu kabupaten Pandeglang	57
10	Peta potensi kedelai kabupaten Pandeglang	58
11	Gambaran kegiatan PKU dari hasil kuesioner	82
12	Perkembangan sergap	86
13	Pelaksanaan Kampanye Pengurangan *Food Waste* di SDN Cijahe Curug, Bogor Barat	95
14	Pelaksanaan Kampanye Pengurangan *Food Waste* di SDN Harjasari 01 Ciawi	95
15	Pelaksanaan Kampanye *Food Waste* di SD Muhammadiyah 1 Kukusan Depok.	96
16	Pelaksanaan kampanye *Food Waste* di SDN Bantar Kemang 3, Bogor Barat Kota Bogor	96
17	Peta IKP kabupaten dan Kota 2019	104
18	Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 2019	105
19	Peta IKP Provinsi 2019	106
20	Distribusi IKP Provinsi tahun 2019	106

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2. Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon II Kementerian/Lembaga
3. SK Tim Penyusun LAKIN Tahun 2019 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dengan demikian, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan neraca bahan makanan, pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada tahun 2018 (angka sementara) pangan yang tersedia untuk dikonsumsi dalam bentuk energi sebesar 3.110 Kalori/kapita/hari; protein 89,82 gram/kapita/hari (58,94 gram/kapita/hari protein nabati dan 30,89 gram/kapita/hari protein hewani); dan lemak 65,55 gram/kapita/hari. Tingkat ketersediaan energi sudah melebihi kebutuhan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG XII (2.150 kkal/kapita/hari). Seperti halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein juga sudah melebihi melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG XII dengan ketersediaan protein rata-rata 82,24 gram/kapita/hari.

Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan berdasarkan hasil perhitungan PoU pada tahun 2015 sebesar 10,73 persen atau sekitar 27,40 juta jiwa. Pada tahun berikutnya, menurun menjadi sebesar 8,93 persen atau sekitar 23,09 juta jiwa. Jumlah ini terus berkurang pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,26 persen atau sekitar 21,63 juta jiwa. Pada tahun 2018, persentase PoU terus menurun menjadi 7,95 persen atau sekitar 21,07 juta jiwa.

Berdasarkan hasil analis komposit terhadap 514 kabupaten, terdapat 14 kabupaten (3%) prioritas 1; 10 kabupaten (2%) prioritas 2;19 kabupaten (5%) prioritas 3; 36 kabupaten (9%) prioritas 4; 168 kabupaten (40%) prioritas 5 dan 169 kabupaten (41%) prioritas 6. Sebaran kabupaten prioritas 1 terdapat di provinsi Papua Barat (1 kab) dan Papua (13 kab). Kabupaten prioritas 2 tersebar di provinsi Kep. Riau (1 kab), Sulawesi Tenggara (1 kab), Maluku (1 kab), Papua Barat (3 kab) dan Papua (3 kab). Sedangkan kabupaten Prioritas 3 tersebar di provinsi Sumatera Utara (1 kab), Kep. Bangka Belitung (2 kab), Kep. Riau (4 kab), NTT (2 kab), Sulawesi Utara (1 kab), Maluku (2 kab), Papua Barat (3 kab) dan Papua (3 kab).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kabinet Kerja yang dituangkan dalam Nawa Cita mengarahkan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kemudian sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019, dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon II pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja. Melalui laporan akuntabilitas tersebut, terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemberi mandat maupun publik, tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta tingkat capaian sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019. Penyusunan LAKIN didasarkan pada : (1) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan (3) Permentan No 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

LAKIN disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pertanggungjawaban Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun 2019;
2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
3. Sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019, termasuk permasalahan, penyelesaian permasalahan dan saran masukan serta perbaikan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di tahun berikutnya.

C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
2. Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas:

1. **Bidang Ketersediaan Pangan** terdiri dari Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan dan Subbidang Sumberdaya Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan;
2. **Bidang Akses Pangan** terdiri dari Subbidang Analisis Akses Pangan dan Subbidang Pengembangan Akses Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang akses pangan;
3. **Bidang Kerawanan Pangan** terdiri dari Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan dan Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penurunan kerawanan pangan;
4. **Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri atas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, dan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Tugasnya melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Tahun Anggaran 2019 telah berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya melalui dukungan sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis. Adapun dukungan sarana/prasarana lainnya berupa biaya, data/informasi, alat pengolah data/komputer, dana khususnya dalam melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan

perumusan kebijakan ketahanan pangan. Data pendukung yang terkait diantaranya adalah data statistik (penduduk, statistik pertanian, konsumsi, status gizi, kemiskinan, industri, ekspor/impor, stok pangan, dan lain-lain) secara *series*, serta data primer dan sekunder dari instansi terkait yang ada di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Penyusunan LAKIN Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2018 mengacu pada Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019. Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019, yaitu: **"Pemantapan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan."**

2. Misi

Untuk mencapai visi di atas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengembangkan misi dalam tahun 2015 - 2019, yaitu:

a. Memantapkan hasil analisis ketersediaan dan akses pangan sebagai bahan rumusan kebijakan;

b. Memantapkan analisis potensi sumber daya pangan dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi komoditas strategis nasional;

c. Memantapkan hasil analisis stok pangan (gabah dan beras) yang ada di masyarakat dalam rangka mendukung upaya peningkatan akses pangan masyakarat;

d. Memantapkan analisis akses pangan rumah tangga sebagai bahan rumusan kebijakan penyediaan pangan;

e. Memantapkan hasil analisis kerawanan pangan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;

f. Memantapkan penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan;

g. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.

3. Tujuan

Memantapkan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dengan cara:

a. Menyediakan instrumen analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;

b. Menyediakan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;

c. Menyediakan data dan informasi stok gabah dan beras di masyarakat;

d. Menyediakan data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat wilayah;

e. Menyediakan data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan;

f. Mengembangkan desa, dan kawasan mandiri pangan serta korporasi usahatani;

g. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sumber daya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019 adalah:

a. Tersedianya instrument analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;

b. Tersedianya bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;

c. Tersedianya data dan informasi stok gabah dan beras di masyarakat;

d. Tersedianya data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat wilayah;

e. Tersedianya data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan;

f. Menguatnya kemandirian pangan masyarakat di desa, kawasan, dan lokasi korporasi usahatani ;

g. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Pemantapan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	1. Memantapkan hasil analisis ketersediaan dan akses pangan sebagai bahan rumusan kebijakan	1. Menyediakan instrumen analisis ketersediaan, akses dan kerawanan Pangan	1. Tersedianya instrument analisis ketersediaan, akses dan kerawanan Pangan
	2. Memantapkan analisis potensi sumber daya pangan dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi	2. Menyediakan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	2. Tersedianya bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	komoditas strategis nasional		
	3. Memantapkan hasil analisis akses pangan sebagai bahan rumusan kebijakan penyediaan pangan	3. Menyediakan instrumen analisis akses pangan	3. Tersedianya instrumen analisis akses pangan
	4. Memantapkan analisis stok pangan masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan akses pangan masyakarat	4. Menyediakan bahan rumusan kebijakan akses pangan	4. Tersedianya bahan rumusan kebijakan akses pangan
	5. Memantapkan hasil analisis kerawanan pangan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan	5. Menyediakan data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat wilayah	5. Tersedianya data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat wilayah
	6. Memantapkan penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan	6. Menyediakan data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan	6. Tersedianya data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan
		7. Mengembangkan desa, dan kawasan mandiri pangan, serta korporasi usahatani	7. Menguatnya kemandirian pangan masyarakat di desa, kawasan, dan lokasi Pengembangan Korporasi Usahatani
	8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	8. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan	8. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan	sumberdaya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan	sumberdaya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tersebut, ditempuh melalui kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sebagai berikut:

a. Kebijakan

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan pada :

1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal;
2) Meningkatkan kemampuan aksespangan masyarakat dan yang diindikasikan oleh indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi;
3) Memantapkan upaya pencegahan dan penanganan rentan rawan pangan pada tingkat wilayah dan penduduk.

b. Strategi

Strategi yang ditempuh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2015-2019 untuk peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan meliputi:

1) Menyediakan instrumen analisis ketersediaan, akses dan penanganan rentan rawan pangan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
2) Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan peran dan keahlian dari seluruh *stakeholder* (akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat madani);
3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (alam, finansial, sosial, teknologi) daerah dan masyarakat;
4) Mengembangkan kerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional.

6. Program

Program yang dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2015–2019 sesuai dengan program Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 yaitu "**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat"**. Dalam rangka mencapai sasaran program Badan Ketahanan Pangan tersebut, sasaran program yang hendak dicapai oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah:

a. Penyediaan instrumen analisis, data dan informasi, serta bahan rumusan kebijakan dalam rangka pemantapan ketersediaan dan akses pangan serta penanganan rentan rawan pangan;

b. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian di wilayah rentan rawan pangan.

7. Kegiatan Utama

Kegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah:

a. Penyediaan instrumen analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;

b. Penyediaan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;

c. Pengembangan desa dan kawasan mandiri pangan, serta Korporasi Usahatani.

Penjabaran dari setiap kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yaitu:

a. Penyediaan instrumen analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan

   1) Analisis neraca bahan makanan

   2) Penyusunan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*

   3) Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

   4) Analisis akses pangan di masyarakat

   5) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

   6) Identifikasi dan pemanfaatan sumber daya pangan.

b. Penyediaan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan

   1) Kajian responsif dan antisipatif kebijakan ketahanan pangan

   2) Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan

   c. Pengembangan desa dan kawasan mandiri pangan, serta Korporasi Usahatani

Kegiatan tersebut secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Analisis neraca bahan makanan,** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan data dan informasi ketersediaan pangan per kapita per tahun dalam suatu wilayah yang dapat digunakan dalam perencanaan produksi dan ketersediaan pangan.

2) **Penyusunan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*,** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

3) **Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan,** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan informasi peringkat ketahanan pangan wilayah yang dapat digunakan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten.

4) **Analisis akses pangan di masyarakat,** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan data dan informasi tingkat aksesibilitas atau keterjangkauan pangan di tingkat masyarakat dari aspek fisik, ekonomi dan sosial.

5) **Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi,** adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun sistem deteksi dini sebagai pencegahan terjadinya rawan pangan.

6) **Identifikasi dan pemanfaatan sumber daya pangan,** adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya pangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan.

7) **Kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan,** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan informasi dan analisis secara komprehensif terhadap isu aktual ketersediaan, akses dan kerawanan pangan untuk rekomendasi penyusunan kebijakan dan program yang tepat dan sesuai untuk peningkatan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.

8) **Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan, adalah** kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan kerawanan pangan, antara lain melalui sinkronisasi sub sektor dan lintas sektor, analisis potensi sumber daya pangan, analisis situasi akses pangan, monitoring stok di penggilingan, penyebarluasan informasi ketersediaan, akses dan pangan.

9) **Pengembangan desa dan kawasan mandiri pangan,** adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa serta kawasan rawan pangan, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan, untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor, selama empat tahun secara berkesinambungan. Model kawasan mandiri pangan merupakan pengembangan kegiatan desa mandiri pangan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

10) **Pengembangan Korporasi Usahatani,** adalah kegiatan usahatani dari hulu dan hilir yang dijalankan secara terintegrasi pada satu atau lebih tahapan pengolahan untuk menghasilkan produk pangan dan non pangan dan diharapkan menjadi lembaga usaha yang berbadan hukum.

Disamping kegiatan diatas, kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran adalah peningkatan kapasitas aparat, yaitu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan rawan pangan, pengembagan akses pangan bagi aparat di daerah dan pusat.

8. Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan untuk mencapai sasaran strategis di atas, maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019).

Indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019 adalah rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional.

Indikator kinerja aktifitas adalah:

a. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional

b. Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi

c. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan

Setelah dilakukan revisi, terdapat perubahan nama Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Indikator Kinerja Aktifitas (IKA).

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Indikator Kinerja Aktifitas (IKA) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019 (setelah revisi)

IKSK/IKA	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional				100%	100%
1. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional				100%	100%
2. Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi				4	4
3. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan Pangan				1%	1%

Keterangan: IKSK dan IKA adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah revisi

Tabel 3. Target Indikator Kinerja Aktifitas (IKA) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019 (setelah revisi)

No	IKA	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	**Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional**				**100%**	**100%**
	a. Rasio hasil analisis ketersediaan pangan yang dimanfaatkan terhadap total hasil analisis ketersediaan pangan yang dihasilkan				100%	100%
	b. Rasio produksi terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional				92,9%	94,5%
2	**Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi**				**4**	**4**
	a. Rasio hasil analisis akses pangan yang dimanfaatkan terhadap total hasil analisis akses pangan yang dihasilkan				100%	100%
	b. Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi				4	4

No	IKA	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	**Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan**				**1**	**1**
	a. Rasio rekomendasi yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan				100%	100%
	b. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan				1	1

Keterangan: IKA adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah revisi

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019 (sebelum revisi)

No	Rincian IKK	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan (Laporan)	35	35	35	35	35
2	Jumlah Lokasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (lokasi)	456	456	1	1	1
3	Jumlah hasil kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	27	1	1	1	1
4	Jumlah Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA)	35	1	1	1	1
5	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	192	190	78	98	107
6	Jumlah Pengembangan Korporasi Usahatani	-	-	-	-	13
7	Jumlah hasil Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan	35	35	35	35	35
8	Jumlah KK pemberdayaan petani kecil dan gender	33.600	33.600	33.600	33.600	0
9	Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran	26.880	26.880	26.880	26.880	0
10	Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan	224	224	224	224	0
11	Dukungan Manajemen dan Administrasi SOLID	12	12	12	12	0

Tabel 5. Indikator Kinerja Aktifitas Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019 (sebelum revisi)

No	Uraian Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Analisis Neraca Bahan Makanan (Laporan)	35	35	35	35	35
2	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	456	456	1	1	1
	a. Nasional (Lokasi)	1	1	1	1	1
	b. Provinsi (Lokasi)	34	34	-	-	-
	c. Kabupaten/Kota (Lokasi)	421	421	-	-	-
3	Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Dokumen)	27	1	1	1	1
4	Analisis Peta Kahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA) (Laporan)	35	1	1	1	1
	a. Nasional (Laporan)	-	-	1	-	-
	b. Provinsi (Laporan)	34	-	-	1	-
	c. Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	-	-	1
5	Kawasan Mandiri Pangan (Kawasan)	192	190	78	98	107
	a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Reguler - Desa - Kabupaten/Kota	 429 365	 - -	 - -	 - -	 - -
	b. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan) - Kawasan - Kabupaten/Kota	 107 60	 107 60	 78 -	 98 -	 107 -
	c. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan 2015 - Kawasan - Kabupaten/Kota	 85 85	 83 83	 - -	 - -	 - -
	d. Pengembangan Akses Pangan (Dokumen)	3	1	1	1	1
6	Jumlah Pengembangan Korporasi Usahatani	-	-	-	-	13
7	Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	72 lap/ 1 dok	33 lokasi	35 lokasi	35 lokasi	35 lokasi
	a. Analisis Akses Pangan (Laporan)	1	1	1	1	1
	b. Kajian Evaluasi Dampak Desa Mandiri Pangan (Laporan)	35	-	-	-	-
	c. Monitoring akses pangan di tingkat penggilingan (Laporan)	1	1	1	1	1
	d. Kemandirian Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan (Dokumen)	1	1	-	1	1
8	Penguatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat					
	a. Apresiasi analisis ketersediaan	1	1	1	1	1

No	Uraian Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
	pangan (Laporan)					
	b. Apresiasi akses pangan (Laporan)	1	-	1	1	1
	c. Peningkatan Kapasitas Akses Pangan (Laporan)	-	1			
9	Pemberdayaan Petani Kecil dan Gender (KK)	33.600	33.600	33.600	33.600	-
10	Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran (KK)	26.880	26.880	26.880	26.880	-
11	Pengembangan Rantai Nilai Tanaman Perkebunan (Desa)	224	224	224	224	-
12	Dukungan Manajemen dan Administrasi SOLID (Bulan Layanan)	12	12	12	12	-

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 merupakan Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 hingga Eselon IV. Dalam Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Perjanjian Kinerja yang disusun merupakan acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019. Dalam perjalanannya, Perjanjian Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan dalam hal fokus kegiatan, sasaran, perubahan anggaran, dan perubahan pimpinan.

Pada tahun 2019 dilakukan Perjanjian Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dengan sasaran kegiatan tersedianya komoditas pertanian strategis nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yaitu rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional, dimana target tahun 2019 sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp. 47.475.000.000,-.

Tabel 6. Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional	100%

Jumlah Anggaran:
Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Pengamanan Rawan Pangan sebesar Rp. 47.475.000.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang digunakan pada tahun 2019 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Penetapan Kinerja (PK), serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 dilakukan dengan cara :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dilihat dari realisasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun terhadap target yang telah disusun dalam penetapan kinerja (Renstra). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	IKSK/IKA	Target	Realiasasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
Tersedianya komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional	100%	136,70%	Sangat berhasil
	1. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional	100%	136,70%	Sangat berhasil
	2. Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi	4	6	Sangat Berhasil
	3. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan Pangan	1%	3,64%	Sangat berhasil

Indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019 adalah rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional. Indikator kinerja aktifitas adalah:

a. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional

Untuk menghitung rasio ketersediaan terhadap kebutuhan dibutuhkan data-data seperti produksi, benih, pakan, tercecer, penggunaan industri non pangan, ekspor, impor, jumlah penduduk, konsumsi rumahtangga dan konsumsi non rumahtangga.

Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan diperoleh dari perhitungan ketersediaan yang dihitung dari produksi dikurangi benih, pakan, tercecer, industri dan ekspor lalu ditambah dengan impor. Sedangkan kebutuhan diperoleh dari konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga. Sehingga diperoleh hasil ketersediaan dibagi dengan hasil kebutuhan. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis tahun 2019 mencapai 136,70% (sangat berhasil) melebihi target tahun 2019 sebesar 100%.

Penurunan capaian rasio ketersediaan terhadap kebutuhan disebabkan oleh menurunnya produksi beberapa komoditas pangan strategis dibandingkan tahun 2018, selain itu ekspor impor yang baru sampai bulan november. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis masing-masing komoditas sebagai berikut: beras sebesar 1,06; jagung sebesar 1,22; kedelai sebesar 1,22; cabai sebesar 2,05; bawang merah sebesar 0,62; gula sebesar 2,40; dan daging sebesar 1 sehingga total dari 1,367 atau 136,70%.

Tabel 8. Perhitungan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional

No	Komoditas	2019		
		Ketersediaan	Kebutuhan	Rasio
1	Beras	31.426.759	29.782.030	1,06
2	Jagung	6.795.022	5.562.444	1,22
3	Kedelai	2.963.315	2.428.898	1,22
4	Cabai	2.240.245	1.095.000	2,05
5	Bawang Merah	859.884	1.380.000	0,62
6	Gula	4.490.121	1.868.383	2,40
7	Daging	786.780	786.780	1,00
				1,367

b. Indeks keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi

Dalam pengukuran indeks keterjangkuan pangan secara fisik dan ekonomi ini menggunakan 2 (dua) variabel, yakni variabel produksi pangan yang mencerminkan ketersediaan pangan sebagai aspek fisik. Sedangkan keterjangkauan pangan berdasarkan aspek ekonomi berkaitan erat dengan daya beli rumah tangga terhadap pangan yang berarti variabel distribusi pengeluaran untuk pangan.

Data yang digunakan untuk mengitung Indeks Keterjangkuan Pangan adalah data sekunder yang bersumber Badan Pusat Statistik (BPS). Data produksi padi bersumber dari BPS diolah datanya oleh Badan Ketahanan Pangan, sedangkan data Pangsa Pengeluaran Pangan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019.

Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan (beras) dihitung dengan cara jumlah ketersediaan beras nasional dibagi dengan kebutuhan nasional. Berdasarkan data produksi beras nasional tahun 2019 sebesar 31,43 juta ton, sedangkan kebutuhan beras nasional diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 266,91 juta jiwa (proyeksi penduduk Indonesia Bappenas BPS) dikalikan konsumsi beras penduduk sebesar 111,58 kg/kap/tahun (BPS) diperoleh sebesar 29,78 juta ton, maka dari data dua variable tersebut diperoleh rasio sebesar 1,06 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketersediaan} = \frac{31{,}43 \text{ juta ton}}{29{,}78 \text{ juta ton}} = 1{,}06$$

Angka rasio sebesar 1,06 dikategorikan Surplus karena rasio ketersediaan terhadap kebutuhan >1, sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Skala Rasio Produksi/Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan (Beras)

Variabel	Skala	Keterangan
Rasio produksi/ ketersediaan terhadap kebutuhan pangan (beras)	Skala 1 : rasio ketersediaan terhadap kebutuhan <1	Kurang
	Skala 2 : rasio ketersediaan terhadap kebutuhan =1	Cukup
	Skala 3 : rasio ketersediaan terhadap kebutuhan >1	Surplus

Sementara untuk mengetahui aspek keterjangkaun pangan secara ekonomi menggunakan variabel pangsa pengeluaran pangan. Pangsa pengeluaran pangan adalah rasio pengeluaran untuk belanja pangan dan pengeluaran total penduduk selama sebulan diukur dalam persen.

Pangsa pengeluaran pangan penduduk diperoleh dengan menggunakan data di tingkat rumah tangga kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Perhitungan pangsa pengeluaran pangan (PF) pada berbagai kondisi, yaitu agregat, desa-kota, dan berbagai kelompok pendapatan penduduk menggunakan formula :

$$PF_t = \frac{PP_t}{TP_t} \times 100\%$$

Dimana :
PF = Pangsa pengeluaran pangan (%)
PP = Pengeluaran untuk belanja pangan (Rp/bulan)
TP = Total pengeluaran (Rp/bulan)

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap pangsa pengeluaran pangan periode Maret 2019, secara rata-rata nasional diperoleh hasil sebesar 49,14%, bila dilihat dari skalanya masuk dalam kategori 3, yaitu Baik (< 50% dari total pengeluaran pangan) sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut :

Tabel 10. Skala Pangsa Pengeluaran Pangan.

Variabel	Skala	Keterangan
Pangsa Pengeluaran Pangan	Skala 1 : > 65% dari total pengeluaran	Buruk
	Skala 2 : 50-65% dari total pengeluaran	Sedang
	Skala 3 : < 50% dari total pengeluaran	Baik

Dari dua variabel yang telah dihitung kemudian dilakukan *croostabulasi* untuk menentukan indeks keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi. Berdasarkan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan beras diperoleh sebesar 1,06, masuk dalam skala 3, yakni surplus dimana rasio ketersediaan terhadap kebutuhan lebih besar (> dari 1). Sedangkan pangsa pengeluaran untuk pangan diperoleh sebesar 49,14% masuk skala 3, yakni kategori baik karena kurang dari 50% dari total pengeluaran pangan. Hasil dari dua variabel tersebut kemudian di *crosstabulasi*, maka diperoleh indeks komposit keterjangkauan fisik dan ekonomi sebesar 6 yang berarti kondisi akses pangan baik dari sisi fisik dan ekonomi ditandai dengan warna hijau, sebagaimana tabel *croostabulasi* data dibawah ini.

Tabel 11. *Crosstabulasi* Penentuan Indeks Keterjangkauan Pangan Secara Fisik dan Ekonomi Tahun 2019.

Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan	Kurang (<1)	Cukup (=1)	Surplus (>1)
Distribusi Pengeluaran untuk Pangan	**(1)**	**(2)**	**(3)**
Buruk (>65% dari total pengeluaran) (1)			
Sedang (50-65% dari total pengeluaran) (2)			
Baik (<50% dari total pengeluaran) (3)			6

Keterangan : Indeks 2 – 3 kondisi akses pangan buruk; Indeks 4 kondisi akses pangan sedang; Indek 5-6 kondisi akses pangan baik.

c. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan

Dalam menghitung penduduk rentan rawan pangan, maka digunakan pendekatan angka *Prevalence of Undernourihment* (PoU)/ Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan. Perhitungan angka PoU menggunakan data

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang berasal dari BPS dan Riset Kesehatan Dasar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). Data BPS terdiri dari: (1) data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin; (2) data konsumsi kalori yang didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori per kapita; (3) data pendapatan yang didekati dengan data pengeluaran. Data Balitbangkes, Kementerian Kesehatan berupa data tinggi dan berat badan per individu yang didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin.

Dalam menghitung angka PoU diawali dengan menghitung:

(1) Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari yaitu: (a) menghitung jumlah konsumsi menurut komoditi selama seminggu terakhir dari setiap rumah tangga. Data yang diperlukan adalah data konsumsi makanan rumah tangga (bahan makanan) dan konsumsi anggota rumah tangga (makanan dan minuman jadi) serta data jumlah anggota rumah tangga. Data konsumsi makanan anggota rumah tangga diagregasikan terlebih dahulu sesuai dengan komoditi makanannya untuk selanjutnya digabungkan ke dalam data konsumsi makanan rumah tangga; (b) menghitung jumlah konsumsi kalori menurut komoditi setiap rumah tangga, yaitu dengan mengalikan banyaknya konsumsi dengan konversi kalori masing-masing komoditi; (c) Menghitung total konsumsi kalori rumah tangga dengan cara menjumlahkan konsumsi kalori dari seluruh komoditi yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Hasil yang diperoleh merupakan jumlah konsumsi kalori rumah tangga selama seminggu;(d) Menghitung konsumsi kalori per kapita sehari dengan cara membagi total konsumsi kalori rumah tangga selama seminggu dengan jumlah anggota rumah tangga dan dibagi 7 (tujuh) hari.

(2) Kalori pada makanan dan minuman jadi (yang dikonsumsi di luar rumah) dilakukan dengan menggunakan informasi konsumsi kalori dan harga dari seluruh komoditas yang dikonsumsi di luar rumah. Prosedur perhitungan kalori dengan menggunakan harga per unit kalori adalah sebagai berikut: (a) menghitung harga per kalori, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran dan konsumsi kalori per rumah tangga. Selanjutnya, harga per kalori diperoleh dengan membagi total pengeluaran dengan total kalori; (b) Menghitung konsumsi kalori makanan dan minuman jadi. Setelah diperoleh kalori makanan dan minuman jadi setiap rumah tangga, nilai kalori per kapita sehari dihitung dengan membagi hasil tersebut dengan jumlah anggota rumah tangga dibagi 7 (tujuh) hari; (c) melakukan koreksi nilai pencilan dengan menggunakan model regresi.

(3) Menghitung PoU dengan menghitung: (a) komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin; (b) menghitung Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan Coefficient of Variation (CV). Prosedur perhitungan MDER, yaitu: (1) menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Susenas; (2) menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian; (3) Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil, sebesar 210 Kkal dikalikan dengan angka kelahiran; (c) menghitung PoU, yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi

kalorinya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Rumus perhitungan PoU adalah sebagai berikut:

$$PoU = \int_{x<MDER} f(x)d(x)$$

$$CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$$

$PoU = \int_{x<MDER} f(x)d(x)$ merupakan distribusi konsumsi kalori
$CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$

Sumber: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018)
Keterangan:
$f(x)$ = fungsi densitas
$CV(x)$ = total simpangan baku
$CV(x/v)$ = simpangan baku konsumsi kalori per kapita
$CV(x/r)$ = komponen tetap, bernilai 0,179

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa angka PoU Tahun 2019 adalah sebesar 7,66 persen. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar penurunan prevalensi penduduk rentan rawan pangan maka dilakukan perhitungan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan ini untuk mengetahui apakah pertumbuhannya positif (kenaikan) ataukah negatif (penurunan). Jika rasio pertumbuhannya positif, maka telah terjadi kenaikan prevalensi penduduk rentan rawan pangan, sedangkan jika pertumbuhannya negatif, maka telah tejadi penurunan prevalensi penduduk rentan rawan pangan. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan dalam menghitung kenaikan/penurunan prevalensi penduduk rentan rawan pangan, maka dibutuhkan angka PoU Tahun 2019 (angka PoU tahun ini) dan angka PoU Tahun 2018 (angka PoU tahun sebelumnya). Secara rinci perhitungan rasio pertumbuhan (kenaikan/penurunan) adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ pertumbuhan\ (\%)$$

$$= \frac{angka\ PoU\ Tahun\ 2019 - angka\ PoU\ Tahun\ 2018}{angka\ PoU\ Tahun\ 2018} X\ 100$$

$$= \frac{7{,}66 - 7{,}95}{7{,}95} x\ 100 = -3{,}65$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa telah terjadi pertumbuhan negatif atau penurunan prevalensi penduduk rentan rawan pangan pada tahun 2019 sebesar 3,65%. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah telah berpengaruh nyata dalam menurunkan prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau prevalensi penduduk yang rentan rawan pangan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama Lima Tahun Terakhir (2015-2019)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian Kinerja (persen)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (reguler dan kawasan 2013)	-	-	-			-	-	-			-	-	-		
	2. Jumlah desa mandiri pangan regular yang diberdayakan	429	-	-			429	-	-			100	-	-		
	3. Jumlah kawasan mandiri pangan (Papua dan Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan yang diberdayakan)	107	107	103			107	103	-			100	96,26	100		
	4. Jumlah pengembangan kawasan mandiri pangan 2015	85	85	78			85	78	77			100	91,76	98,71		
	5. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG	456	35	-			456	35	-			100	100	-		
	6. Jumlah hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan(FSVA)	1	1	1			1	1	1			100	100	100		
	7. Jumlah hasil kajian/pemantauan	72 1	37 1	35			72 1	37 1	35			100 100	100 100	100		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian Kinerja (persen)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan															
	8. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat	2	1	1			2	1	1			100	100	100		
	9. Pengembangan akses pangan	3	1	-			3	1	-			100	100	-		
Tersedianya komoditas pangan strategis nasional	Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional				100%	100%				146,32%	136,70%				146%	136,70%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwacapaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menunjukkan kisaran capaian kinerja 81-100 persen di setiap tahun untuk masing-masing target indikator, walaupun realisasi kinerja mengalami perubahan satuan maupun jumlah target di setiap tahunnya. Adanya perubahan yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pada tahun 2018 terjadi perubahan sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan Renstra Kementerian Pertanian.

b) Capaian kinerja untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan terealisasi dari segi keprograman, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan sasaran yang dikarenakan kurangnya pemahaman SDM di daerah dan perubahan kelembagaan di daerah.

c) Pada tahun 2017, Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan telah memasuki tahap pengembangan. Alokasi dana Bantuan Pemerintah (Banper) sebesar 100 juta di 78 kawasan, 77 Kabupaten di 23 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku). Hasil capaian kinerja baik di Pusat maupun di daerah telah mencapai 100 persen untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

   Kawasan Mandiri Pangan tahun tidak mencapai 100 persen atau sebesar 98,16 persen, karena ada 1 (satu) kawasan yang tidak melanjutkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak melanjutkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan karena kelompok tidak menyanggupi membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK).

   Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, Kepulauan dan Papua-Papua Barat telah memasuki tahap keberlanjutan/exit strategi sesuai target keprograman pada tahun 2013 dan merupakan tahun terakhir kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dan tidak dianggarkan lagi oleh APBN, keberlanjutan pembinaan dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten.

d) Pada tahun 2018, kegiatan pengembangan KMP mengalami perubahan dari KMP sebelumnya (2015-2017), perubahan tersebut adalah:

   - Justifikasi penentuan lokasi KMP 2018 adalah Rumah Tangga Miskin prevalensi (stunting) berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian PPN/Bappenas di wilayah rentan rawan pangan yang memiliki potensi wilayah;
   - Lingkup KMP 2018 hanya 1 (satu) desa, sedangkan KMP 2015-2017 1 (satu) KMP adalah 5 desa dengan lingkup kecamatan;
   - Tahapan pelaksanaan KMP 2018, yaitu pengembangan, kemandirian dan keberlanjutan/*exit strategy*. Sedangkan tahapan KMP 2015-2017, yaitu : persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan keberlanjutan/*exit strategy*.

Perubahan KMP tersebut dimaksudkan untuk memperbesar dampak yang diperoleh dimasyarakat pedesaan terutama Rumah Tangga Miskin, dan menurunkan angka stunting dan angka rawan pangan.

e) Pada tahun 2019, kegiatan KMP bertransformasi menjadi Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU). Adapun sebagai justifikasi transformasi tersebut adalah:

- Dari budidaya, pada KMP dilaksanakan dalam skala spot-spot kecil dan tersebar, sehingga tidak efisien dan belum memenuhi skala ekonomi. Sedangkan pada PKU dilaksanakan dalam hamparan lebih luas, sehingga lebih efisien dan memenuhi skala ekonomi;
- Dari pengolahan dan pemasaran, pada KMP produk dijual dalam bentuk segar. Sedangkan pada PKU dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu periode yang sama, sehingga produk dijual dalam bentuk olahan.
- Dari pasokan, pada KMP tidak ada jaminan pasokan bahan baku secara kontinyu. Sedangkan pada PKU pasokan bahan baku terjamin secara memadai dan kontinyu dalam menunjang proses pengolahan.

f) Pada kegiatan PKU 2019, penentuan lokasi PKU adalah 13 lokasi di daerah rentan rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya pangan untuk pengembangan usaha berdasarkan data FSVA Nasional 2018 prioritas 3, 4 dan 5, dan/atau Rumah Tangga Miskin-Petani (RTM-P) dan/atau stunting. Lingkup PKU 2019 adalah 1 kabupaten, 1 kecamatan, 1 desa, 1 gapoktan, 5 kelompok tani.

g) Kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*, FSVA*)* sebagai berikut:

- Tahun 2015, kembali disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) Nasional. Peta ini memperbaharui FSVA 2013 yang tidak jadi di *launching* mengingat situasi pada saat tersebut bertepatan dengan pemilihan dan pergantian presiden. Kegiatan penyusunan FSVA Nasional 2015 menghasilkan output berupa tersusunnya FSVA Nasional sebanyak 1 Buku atau terealisasi 100 persen.
- Tahun 2016, sebagai kelanjutan dari penyusunan FSVA Provinsi dengan tujuan untuk mengetahui ketahanan pangan di tingkat wilayah kabupaten yang analisisnya sampai tingkat desa, disusun FSVA kabupaten di 58 kabupaten, terdiri dari 44 kabupaten prioritas 1 dan 14 kabupaten prioritas 2 berdasarkan FSVA Nasional tahun 2015.
- Tahun 2017 penyusunan FSVA untuk 52 kabupaten dari prioritas 3 berdasarkan FSVA Nasional tahun 2015.
- Tahun 2018 dilaksanakan *updating* data FSVA Nasional dan FSVA 34 Provinsi. Perubahan yang dilakukan berupa *updating* indikator dan metodologi.

- Tahun 2019 dilaksanakan *updating* data FSVA Nasional, FSVA 34 Provinsi dan FSVA 160 kabupaten. Perubahan yang dilakukan berupa *updating* indikator dan metodologi.

h) Pelaksanaan SKPG dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dilaksanakan di 34 provinsi, 421 kabupaten dan nasional, pada tahun 2016 hanya dilaksanakan di 34 provinsi dan nasional, sedangkan untuk tahun 2017-2019 hanya dilakukan di tingkat nasional.

i) Kegiatan monitoring stok beras tahun 2019 diperluas sampai ke tingkat pedagang dengan jumlah sampel sebanyak 640 pedagang tersebar di 57 kabupaten pada 18 provinsi sehingga data stok beras di pedagang melengkapi data stok beras yang ada dimasyarakat. Data stok beras di penggilingan dan pedagang bersama dengan data stok di Bulog dan stok di PIBC digunakan untuk menghitung ketersediaan beras nasional.

j) Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan:

- Untuk tahun 2015-2016, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun 2015 terdiri dari 35 laporan penyusunan NBM, 1 laporan analisis situasi akses pangan, 35 laporan kajian evaluasi dampak desa mandiri pangan, 1 laporan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan dan 1 dokumen kemandirian pangan dalam mendukung swasembada pangan.
- Untuk tahun 2017, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun 2017 terdiri dari 35 laporan penyusunan NBM,1 laporan analisis akses pangan tingkat rumah tangga dan 1 laporan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan.
- Untuk tahun 2018, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun 2017 terdiri dari 35 laporan penyusunan NBM, 1 laporan analisis akses pangan masyarakat dan 1 laporan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan.
- Pada tahun 2016, hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan, outputnya berupa bahan rekomendasi pengembangan ketahanan pangan dan energi untuk kawasan perbatasan.
- Pada tahun 2017, hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan berupa bahan rekomendasi bantuan pangan non tunai serta wilayah penyangga kota besar.
- Pada tahun 2018, hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan berupa rumusan alternatif kebijakan peningkatan akses pangan melalui sistem distribusi perdagangan beras dan cabai antar wilayah yang lebih efisien.
- Pada tahun 2019, hasil kajian kebijakan program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa rekomendasi kebijakan untuk memberikan peran khusus kepada Bulog dalam program BPNT dalam menjaga kesinambungan

pengadaan gabah dan beras dalam negeri serta meningkatkan peran Kementerian Pertanian dalam Serap Gabah (Sergab) Petani.

- Pada tahun 2019, hasil kajian ketersediaan dan kerawanan pangan berupa bahan rekomendasi untuk kegiatan : (1) regionalisasi PPH, (2) NBM skala desa, (3) eksplorasi, pemanfaatan dan sistem SDP, dan (4) validitas data stok beras di penggilingan.

k) Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat:

- Pada tahun 2013-2017 dilaksanakan penguatan kapasitas aparat dan masyarakat dengan capaian kinerja 100 persen.
- Pada tahun 2017 peningkatan kapasitas aparatKabupaten dan Provinsi berupa : pelatihan penyusunan analisis penanganan kerawanan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk 34 provinsi dimana setiap provinsi diwakili oleh 2 orang aparat dari Provinsi dan Kabupaten. Output yang diharapkan berupa tersedianya laporan hasil situasi kerawanan pangan dan gizi secara bulan di provinsi dan kabupaten/kota.
- Pada tahun 2017 Kawasan Mandiri Pangan mengadakan Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan untuk pendamping, pengurus LKK, FKK, di 78 kawasan. Dengan output Kawasan Mandiri Pangan di tahap pengembangan secara umum adalah memberikan pemahaman bagi peserta dalam pengelolaan Kawasan Mandiri Pangan serta memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat.
- Pada tahun 2017 penguatan kapasitas aparat berupa Apresiasi Akses Pangan berupa pelatihan aparat daerah yang menangani akses pangan dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta dapat melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan akses pangan masyarakat.
- Pada tahun 2019 peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di provinsi berupa :

  (1) Pelatihan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability* Atlas – FSVA untuk 160 kabupaten stunting.

  Output yang diharapkan berupa tersedianya laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability* Atlas – FSVA di 160 kabupaten.

  (2) Bimtek Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Tahun 2019.

  Output kegiatan ini adalah membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman bagi apparat daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data dan penyampaian laporan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di pengilingan.

(3) Pertemuan Evaluasi Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan

Output kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja koordinator provinsi dan enumerator kabupaten/kota serta memberikan motivasi agar lebih aktif dan disiplin dalam menyampaikan laporan ke pusat dan diharapkan dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan.

(4) Bimbingan Teknis (Bimtek) Kegiatan Monitoring Stok Beras di Pedagang

Output kegiatan ini adalah membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman bagi aparat daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data dan penyampaian laporan kegiatan monitoring stok beras di pedagang.

(5) Pertemuan Evaluasi Monitoring Stok Beras di Penggilingan dan Pedagang

Output kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring stok beras di penggilingan dan pedagang pada tahun 2019, khususnya kepada coordinator dan enumerator dalam pengumpulan data dan penyampaian laporan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Hasil pertemuan evaluasi berupa rumusan pertemuan sebagai bahan kebijakan perbaikan pelaksanaan kegiatan monitoring stok ditahun depan.

(6) Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.Output kegiatan ini yaitu terbangunnya kesamaan persepsi dan sinergi aparat daerah dalam melakukan analisis situasi pangan dan gizi serta meningkatnya pemahaman dan kemampuan pejabat/aparat dalam menganalisis situasi pangan dan gizi.

3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

a) Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional

Capaian rasio ketersediaan terhadap kebutuhan yang tinggi disebabkan oleh meningkatnya produksi beberapa komoditas pangan strategis dibandingkan tahun 2017. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis masing-masing komoditas sebagai berikut: beras sebesar 1,13; jagung sebesar 1,24; kedelai sebesar 1,36; cabai sebesar 3,67; bawang merah sebesar 1,04; gula sebesar 0,92; dan daging sebesar 0,88 sehingga total dari 1,463 atau 146,32%.

b) Indeks keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi

Berdasarkan perhitungan variabel ketersediaan pangan (beras) terhadap kebutuhan pangan diperoleh rasio sebesar 1,02, dapat dikategorikan Surplus (kategori 3) karena rasio ketersediaan terhadap kebutuhan >1. Sementara perhitungan variabel pangsa pengeluaran untuk pangan diperoleh hasil sebesar

49,51 masuk pada kategori skala 3, yakni baik (<50% dari total pengeluaran). Hasil perhitungan dua variabel tersebut kemudian di *croostabulasi*, diperoleh indeks komposit keterjangkauan fisik dan ekonomi sebesar 6 berada di zona hijau, yakni kategori baik dalam arti akses pangan masyarakat secara fisik dan ekonomi tidak mengalami permasalahan.

c) Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan

Hasil perhitungan angka PoU Tahun 2018 sementara berdasarkan data Susenas bulan Maret 2018 adalah 8,23 persen atau menurun 1,61 persen jika dibandingkan angka PoU tahun 2017 sebesar 9,84 persen.

4) Hambatan/permasalahan dan upaya perbaikan ke depan

a) Hambatan dan Permasalahan

Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019 sebagai berikut:

(1) Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk menghasilkan analisis yang akurat, karena data dan informasi sering dianggap bukan kegiatan prioritas;

(2) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi menyebabkan petugas Kabupaten/Kota jarang melakukan kunjungan lapangan ke kelompok sasaran;

(3) Tingginya mutasi pegawai di daerah, sangat mempengaruhi kinerja satker daerah dan kemampuan pegawai daerah dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

(4) Masalah dalam pelaksanaan Pengembangan Korporasi Usahatani adalah : (a) pembinaan pendamping masih belum optimal; dan (b) kurangnya dukungan daerah dalam keterpaduan/sinergitas kegiatan untuk mempercepat pembangunan di lokasi;(c) masih ada beberapa provinsi yang terlambat panen; (d)Gapoktan belum bisa mengotimalkan peralatan

(5) Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SKPG diantaranya yaitu:

(a) Ketersediaan data untuk analisis SKPG yaitu data yang sesuai dengan indikator SKPG yang ditetapkan, tidak seluruhnya dapat tersedia disetiap wilayah;

(b) Terkait Koordinasi Tim/Pokja SKPG: (i) beberapa provinsi dan kabupaten belum membentuk Tim/Pokja SKPG; (ii) efektifitas kerja Tim/Pokja SKPG belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada proses analisis data dan pelaporan rutin oleh provinsi; (iii) Koordinasi dengan dinas terkait dalam melakukan pemantauan dan mengumpulkan data tidak semuanya berjalan dengan baik;

(c) Aparat di beberapa daerah masih belum memahami kegiatan SKPG sebagai sistem pemantauan pangan dan gizi serta alat analisis;

(d) Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan SKPG, sehingga menghambat proses analisis SKPG.

(6) Permasalahan dalam penyusunan analisis ketersediaan pangan di daerah antara lain :

a. Kurangnya aparat yang memiliki kemampuan menangani analisis ketersediaan pangan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan analisis ketersediaan pangan.

b. Belum semua Provinsi/Kabupaten terbentuknya tim NBM sehingga sulit untuk berkoordinasi lintas instansi dalam hal pengumpulkan data.

c. Belum adanya angka konversi wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang lebih bisa menggambarkan kondisi wilayah setempat.

d. Banyak komoditas atau jenis pangan lokal yang belum masuk dalam NBM padahal komoditas tersebut merupakan potensi wilayah.

e. Belum dimanfaatkannya hasil analisis ketersediaan pangan sebagai dasar mengambil kebijakan.

f. Kurangnya dukungan dana APBD untuk kegiatan analisis ketersediaan pangan, walaupun hasil analisis tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan kebijakan atau perencanaan.

g. Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan analisis ketersediaan pangan, sehingga menghambat proses penyusunan analisis ketersediaan pangan.

h. SDM yang belum paham mengenai analisis ketersediaan pangan, karena baru menangani.

(7) Permasalahan kegiatan monitoring stok beras di penggilingan antara lain :

a. Data populasi penggilingan yang ada sampai saat ini adalah data berdasarkan hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA) tahun 2012 yang sudah terlalu lama dan perlu dilakukan pembaharuan (*updating*) data;

b. Berdasarkan data PIPA BPS tahun 2012 yang digunakan untuk sampel setelah dilakukan verifikasi di lapangan terdapat beberapa penggilingan yang sudah tidak aktif atau beralih fungsi (khusus penggilingan padi kecil). Oleh karena perlu dilakukan pendataan ulang sampel penggilingan.

c. Dalam mengumpulkan data stok beras di penggilingan, enumerator dihadapkan pada lokasi penggilingan yang cukup jauh sehingga tidak memungkin dalam satu hari dapat mengumpulkan data secara lengkap sehingga perlu strategi yang tepat agar laporan dari penggilingan dapat dikirim dengan tepat waktu.

d. Kurang aktifnya koordinator provinsi dalam mengkoordinir enumerator kabupaten sehingga data yang dikirim ke pusat seringkali mengalami keterlambatan, selain itu data yang dikirim tidak dilakukan validasi terlebih dahulu.

(8) Permasalahan kegiatan monitoring stok beras di pedagang antara lain :

a. Data populasi pedagang yang ada saat ini adalah data berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2016 perlu dilakukan pembaharuan (*updating*) data, karena saat dilakukan verifikasi banyak pedagang yang sudah tidak beroperasi atau beralih fungsi;

b. Keterlambatan penyampaian laporan dari enumerator menyebabkan data kurang up to date (jumlah data yang masuk ontime per minggu kurang lebih 50-60%);

c. Kurang berperannya koordinator provinsi dalam mengkoordinir enumerator kabupaten menyebabkan pengiriman data ke pusat mengalami keterlambatan;

d. Koordinator kurang aktif melakukan validasi data yang dikirim enumerator, seperti data yang sama dari minggu ke minggu sehingga diragukan keakuratan datanya.

e. Pedagang yang menjadi sampel sebaiknya dipilih yang kooperatif untuk menjaga kontinuitas data.

b) Upaya perbaikan ke depan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam rangka mengatasi permasalahan antara lain :

1) Peninjauan terhadap klasifikasi kapasitas penggilingan dan klasifikasi skala usaha pedagang;

2) Perlu dilakukan penambahan sampel terutama sampel untuk penggilingan kapasitas kecil untuk meningkatkan validitas data;

3) Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Pangan Daerah (Provinsi/Kabupaten) untuk pembaharuan (*update*) terhadap data penggilingan dan pedagang beras;

4) Koordinasi dengan provinsi dan kabupaten perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian laporan sehingga data yang diterima tidak terlambat dan tepat waktu.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan TA. 2019 telah dialokasikan anggaran pada pusat dan daerah melalui Satker Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebesar Rp. 47.475.000.000,- dan telah

direalisasikan sebesar Rp. 45.299.617.213,- atau 95,42 persen (posisi per tanggal 31 Desember 2019) dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

Tabel 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Anggaran			Capaian Output (%)
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Kawasan Mandiri Pangan	6.890.000.000	6.683721.348	97,01	100
2	Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	25.874.000.000	24.665.668.942	95,33	100
3	Analisis ketersediaan pangan wilayah	14.711.000.000	13.950.226.923	94,83	100
Total		**47.475.000.000**	**45.299.617.213**	**95,42**	

Alokasi anggaran kegiatan di pusat tahun 2019 untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.642.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.022.973.381,- atau 97,00 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 yang dikelola di Pusat

No	Nama Kegiatan	Anggaran			Capaian Output (%)
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	18.931.000.000	18.314.149.718	96,74	100
2	Analisis ketersediaan pangan wilayah	1.711.000.000	1.708.823.663	99,87	100
Total		**20.642.000.000**	**20.022.973.381**	**97,00**	

Sementara alokasi anggaran di daerah untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan pada tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.833.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.276.643.832,- atau 84,20 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 yang dikelola di Daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran			Capaian Output (%)
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Kawasan Mandiri Pangan	6.890.000.000	6.683.721.348	97,01	100
2	Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	6.943.000.000	6.351.519.224	91,48	100

No	Nama Kegiatan	Anggaran			Capaian Output (%)
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
3	Analisis ketersediaan pangan wilayah	13.000.000.000	12.241.403.260	94,16	100
Total		**26.833.000.000**	**25.276.643.832**	**94,20**	

C. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2019

Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2017, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian anggaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^{n}(PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Ket :
E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah −20%. Setelah dilakukan perhitungan dengan mengikuti formula di atas diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 adalah sebesar 1,26. Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar itu dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 cukup efisien.

D. Hasil Kinerja Tahun 2019

Hasil kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan

Kegiatan pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan di bidang dengan bentuk kegiatan pemantauan, analisis, kajian dan penyusunan pedoman. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.642.000.000,- dengan realisasi kegiatan Rp. 20.022.973.381,- atau 97,00%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

a. Analisis Ketersediaan Pangan (NBM dan SDP)

Penyusunan neraca bahan makanan dilakukan setiap tahun sehingga dapat menggambarkan perkembangan tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Dengan demikian neraca bahan makanan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan ketersediaan pangan khususnya dan pembangunan ketahanan pangan pada umumnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan analisis ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk energi, protein dan lemak. Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan ketersediaan pangan dengan indikator kinerja kegiatan berupa Buku Neraca Bahan Makanan Nasional 2017 Tetap dan 2018 Sementara. Output yang dihasilkan dari NBM adalah data ketersediaan pangan dalam satuan volume dan satuan gizi dari berbagai komoditas bahan pangan. Berdasarkan hasil perhitungan NBM Tahun 2017 angka tetap, 2018 angka sementara dan 2019 (angka sangat sementara) sebagai berikut:

Tabel 16. Perhitungan NBM Tahun 2017, 2018 dan 2019

Tahun	Energi (kalori/hari)	Protein (gram/hari)			Lemak (gram/hari)
		Nabati	Hewani	Total	
2017*)	2.973	58,59	26,24	84,84	56,61
2018**)	3.110	58,94	30,89	89,82	65,55
2019**)	2.926	53,17	19,68	72,85	73,91

Ket. :
*) 2017 (angka tetap); **) 2018 (angka sementara)
***) 2019 (angka sangat sementara)

Berdasarkan hasil perhitungan neraca bahan makanan, pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada tahun 2017 dalam bentuk energi sebesar 2.973 Kalori/kapita/hari; protein 84,84 gram/kapita/hari (58,59 gram/kapita/hari protein nabati dan 26,24 gram/kapita/hari protein hewani); dan lemak 56,61 gram/kapita/hari. Pada tahun 2018 (angka sementara) pangan yang tersedia untuk dikonsumsi dalam bentuk energi sebesar 3.110 Kalori/kapita/hari; protein 89,82 gram/kapita/hari (58,94 gram/kapita/hari protein nabati dan 30,89 gram/kapita/hari protein hewani); dan lemak 65,55 gram/kapita/hari. Sementara pada tahun 2019 (angka sangat sementara) pangan yang tersedia untuk dikonsumsi dalam bentuk energi sebesar 2.926 Kalori/kapita/hari; protein 72,85 gram/kapita/hari (protein nabati 52.63 gram/kapita/hari dan protein hewani 19,63 gram/kapita/hari); serta lemak 73,91 gram/kapita/hari.

Ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan dari 2.973 Kalori menjadi 3.110 Kalori atau naik 4,62%, ketersediaan protein naik dari 84,84 gram per kapita per hari menjadi 89,82 gram per kapita per hari atau naik 5,88%. Kenaikan ketersediaan energi disebabkan oleh meningkatnya produksi CPO dari 37,96 juta ton tahun 2017 menjadi 40,57 juta ton tahun 2018 dan produksi ikan dari 1,93 juta ton tahun 2017 menjadi 3.99 juta ton tahun 2018. Trend kenaikan ini tidak berlanjut pada tahun 2019 karena perkiraan ketersedian energi tahun 2019 hanya tercatat sebesar 2.926 atau turun 185 Kalori/kapita/hari dibandingkan ketersediaan energi tahun 2018. Perkiraan ketersediaan energi, protein dan lemak tahun 2019 ini masih bisa berubah mengingat angka produksi dan impor komoditas perikanan yang digunakan sampai dengan saat ini masih berupa angka semester I dan angka produksi umbi-umbian baru tercatat sampai dengan bulan September 2019.

Ketersediaan energi, protein dan lemak total masih didominasi oleh kontribusi ketersediaan dari bahan pangan nabati. Kontribusi pangan nabati terhadap ketersediaan energi tahun 2017 sebesar 91,48%, terhadap ketersediaan protein sebesar 69,06%, dan terhadap ketersediaan lemak sebesar 73,56%.

Dominasi tersebut masih terlihat pada tahun 2018 dan 2019, dimana kontribusi pangan nabati terhadap perkiraaan ketersediaan energi, protein dan lemak masing-masing sebesar 91,13%, 65,61%, 76,67% (2018) dan 92,44%, 72,99%, 80,27% (2019).

Kelompok padi-padian/serealia yang meliputi padi, jagung dan gandum masih menjadi penyumbang terbesar ketersediaan energi (48-52%) dan protein (41-47%). Sementara komoditas sumber protein seperti kelompok buah biji berminyak dan pangan hewani hanya menyumbang antara 1-21% dari total ketersediaan protein. Kelompok padi-padian/serealia juga mempunyai kontribusi sebesar 8 – 12% terhadap ketersediaan lemak. Kontribusi terhadap ketersediaan lemak terbesar masih berasal dari kelompok minyak dan lemak (33– 51%) dan kelompok buah biji berminyak (20 – 27%).

Ketersediaan energi, protein dan lemak dari kelompok padi-padian/serealia selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Ketersediaan energi turun dari 1.546 Kalori/kapita/hari pada 2017 menjadi 1.496 Kalori/kapita/ hari dan 1.390 Kalori/kapita/hari pada tahun 2018 dan 2019. Sementara ketersediaan protein turun dari 38,22 gram (2017) menjadi 36,86 gram (2018) dan 34,28 gram (2019). Ketersediaan lemak per kapita per hari juga turun dari 6,59 gram pada tahun 2017 menjadi 6,45 gram dan 5,98 gram pada tahun 2018 dan 2019. Banyak hal yang menyebabkan turunnya ketersediaan energi, protein dan lemak kelompok serealia, namun utamanya adalah berkurangnya jumlah impor gandum dalam kurun waktu 2017-2019. impor gandum pada tahun 2017 tercatat sebesar 11,44 juta ton, sedangkan tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 10,11 juta ton dan 10,94 juta ton.

Makanan berpati memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap ketersediaan energi total. Komoditas ubi kayu menjadi komoditas yang memberikan kontribusi energi tertinggi pada kelompok makanan berpati dengan produksi sebesar 19,34 juta ton pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 0,29 juta ton (1,52%) dibanding tahun 2017 yang produksinya hanya mencapai 19,05 juta ton.

Ketersediaan energi per kapita per hari dari kelompok gula pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017, yaitu dari 261 Kalori menjadi 269 Kalori. Sumbangan energi tersebut didominasi oleh ketersediaan gula pasir yang mengalami peningkatan, yaitu dari 239 Kalori/kapita/hari atau 23,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2017 menjadi 247 Kalori/kapita/hari atau 24,73 kg/kapita/tahun pada tahun 2018.

Kelompok buah/biji berminyak meliputi komoditas kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan kelapa. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari dari kelompok buah/biji berminyak meningkat dari 238 Kalori, 15,90 gram

protein dan 15,10 gram lemak pada tahun 2017 menjadi 251 Kalori, 17,31 gram protein, dan 15,74 gram lemak. Peningkatan tersebut secara umum disebabkan oleh meningkatnya produksi kacang tanah dan kedelai.

Dari sekian banyak jenis komoditas buah-buahan, komoditas yang mempunyai kontribusi energi per kapita per hari cukup besar pada tahun 2018 adalah pisang, salak, mangga dan jeruk yaitu masing-masing 35 Kalori (26,07 kg/tahun), 8 Kalori (3,16 kg/tahun), 6 Kalori (9,24 kg/tahun) dan 5 Kalori (9,07 kg/tahun).

Kontribusi sayur-sayuran terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari mengalami peningkatan dari 44 Kalori, 2,02 gram protein dan 0,49 gram lemak pada tahun 2017 menjadi 46 Kalori, 2,09 gram protein dan 0,52 gram lemak pada tahun 2018. Adapun komoditas penyumbang ketersediaan energi terbesar pada kelompok yaitu cabe rawit sebesar 13 Kalori/kapita/hari dan kentang sebesar 6 Kalori/kapita/hari pada tahun 2018 .

Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari komoditas daging meningkat dari 90 Kalori, 5,91 gram protein dan 7,21 gram lemak pada tahun 2017 menjadi 94 Kalori, 6,35 gram protein dan 7,43 gram lemak pada tahun 2018.

Komoditas kelompok telur mencakup telur ayam buras, telur ayam ras dan telur itik serta telur puyuh. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari kelompok telur pada tahun 2018 masing-masing sebesar 65 Kalori, 5,12 gram protein dan 4,61 gram lemak, meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan per kapita per hari pada tahun 2017 yaitu 65 Kalori, 5,15 gram protein, dan 4,66 gram lemak. Pada tahun 2019 ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari diperkirakan meningkat menjadi sebesar 66 Kalori, 5,18 gram protein, dan 4,68 gram lemak.

Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2018 dari komoditas susu masing-masing sebesar 12 Kalori, 0,63 gram protein dan 0,69 gram lemak. Angka ketersediaan tersebut menurun apabila dibandingkan dengan ketersedian energi, protein dan lemak per kapita per hari tahun 2017 yang sebesar 14 Kalori, 0,74 gram protein dan 0,81 gram lemak. Menurunnya ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari dari komoditas susu tersebut disebabkan oleh menurunya impor susu pada tahun 2018.

Diantara kelompok penyumbang energi, protein dan lemak dari sumber hewani, kelompok ikan merupakan penyumbang terbesar ketersediaan energi dan protein per kapita per hari. Pada tahun 2018, kontribusi kelompok ikan terhadap energi, protein dan lemak masing-masing sebesar 103 Kalori, 18,94 gram protein dan 1,92 gram lemak. Ketersediaan tersebut meningkat bila dibandingkan ketersediaan per kapita per hari tahun 2017 sebesar 77 Kalori, 14.45 gram protein dan 1.49 gram lemak.

Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari kelompok minyak dan lemak mengalami peningkatan yang cukup besar, dari masing-

masing 335 Kalori, 0,02 gram protein dan 18,67 gram lemak pada tahun 2017 menjadi 472 Kalori, 0,04 gram protein dan 26,55 gram lemak pada tahun 2018. Kenaikan tersebut terjadi karena peningkatan produksi minyak goreng sawit dari 9,9 juta ton tahun 2017 menjadi 12,15 juta ton tahun 2018.

Berdasarkan data NBM 2017-2019 dan menggunakan angka kecukupan energi (AKE) tingkat ketersediaan 2.400 Kalori per kapita per hari, maka skor PPH ketersediaan masih belum mencapai PPH ideal skor 100. Skor PPH Tahun 2018 sebesar 92,94 naik 4,02 poin dari skor PPH tahun 2017 sebesar 88,92.

Peningkatan skor PPH Ketersediaan tersebut disebabkan oleh meningkatnya skor kelompok pangan hewani dan kelompok sayuran dan buah. Skor dari kelompok pangan hewani pada tahun 2017 sebesar 20,02 dan tahun 2018 sebesar 21,83 masih dibawah skor ideal pangan hewani sebesar 24. Sementara itu capaian kelompok sayuran dan buah baru mencapai skor 22,90 pada tahun 2017 dan 25,10 pada tahun 2018 dari skor 30 yang direkomendasikan untuk kelompok ini.

Skor PPH Ketersediaan tahun 2019 yang dihitung dengan menggunakan data sangat sementara baru mencapai 85,49. Rendahnya skor tahun 2019 dibandingkan dengan skor tahun 2018 karena turunnya skor kelompok umbi-umbian dari 2,5 pada tahun 2018 menjadi 0,95 pada tahun 2019, turunnya skor kelompok pangan hewani dari 21,83 menjadi 17,25, dan turunnya skor kelompok sayuran dan buah dari 25,10 menjadi 23,80. Turunnya skor kelompok umbi-umbian ini disebabkan oleh masih rendahnya angka produksi ubi jalar dan ubi kayu yang dilaporkan baru sampai dengan bulan September 2019. Penurunan skor kelompok pangan hewani disebabkan oleh masih rendahnya data realisasi produksi, ekspor dan impor yang dilaporkan untuk komoditas perikanan, sedangkan turunnya skor kelompok sayur dan buah terjadi karena turunnya produksi beberapa komoditas buah seperti pisang, salak, apel, jeruk, durian, jambu biji, manga dan nenas serta turunnya produksi sayuran seperti tomat, jamur dan paprika. Penurunan skor ini juga disebabkan oleh berkurangnya perkiraan impor untuk komoditas bawang putih pada tahun 2019 (data tetap sampai dengan November 2019, data perkiraan untuk Desember 2019).

b. Kajian Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Regionalisasi PPH

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relative). Susunan PPH beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Pendekatan PPH dilihat dari skor pangan dan

dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

PPH dapat diimplementasikan dalam perencanaan kebutuhan konsumsi dan penyediaan pangan untuk dikonsumsi. Berkaitan dengan kegunaan ini, maka PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk. baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan PPH, maka perencanaan produksi dan penyediaan pangan dapat didasarkan pada patokan imbangan komoditas seperti yang telah dirumuskan dalam PPH untuk mencapai sasaran kecukupan pangan dan gizi penduduk. PPH yang disajikan dalam bentuk kelompok pangan memberi keleluasaan untuk menentukan pilihan jenis pangan yang diinginkan di antara kelompoknya disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya-ekonomi dan potensi setempat.

Penetapan PPH regional dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu kemampuan wilayah dalam memproduksi bahan pangan, pola konsumsi pangan dan kebiasaan makan setempat, serta kondisi social ekonomi, misalnya pendapatan (daya beli) serta memperhatikan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Untuk wilayah Indonesia pada umumnya, konsumsi kelompok pangan padi-padian memberikan kontribusi energi 55-60% dan kelompok pangan umbi-umbian memberikan kontribusi energi kurang dari 6%. Wilayah Indonesia bagian timur (Maluku Utara dan Papua), konsumsi kelompok pangan padi-padian memberikan kontribusi energi kurang 50% dan kelompok pangan umbi-umbian memberikan kontribusi energi 9% dan 30% dari AKG. Pola konsumsi di Maluku dan Papua Barat memiliki kontribusi energi padi-padian sekitar 51% AKG dan kontribusi konsumsi umbi-umbian sebesar 9% dan 12% dari AKG. Oleh karena itu perlu disusun suatu Pola Pangan Harapan spesifik wilayah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam Perencanaan Pangan di wilayahnya masing-masing.

Kajian Regionalisasi Skor PPH bertujuan untuk mengkaji PPH berdasarkan pendekatan wilayah/regional, mengupdate proporsi kebutuhan pangan ideal, untuk perencanaan konsumsi atau ketersediaan serta bahan kebijakan pemerintah pusat/daerah.

1) Keragaman agro-ekosistem dan budaya makan di Indonesia memungkinkan adanya PPH regional, terutama apabila ada perbedaan tajam dalam hal pola ketersediaan dan konsumsi antar kelompok pangan dengan PPH nasional. Misalnya, di Papua konsumsi umbi-umbian sangat tinggi; di Maluku konsumsi sagu tinggi sehingga memerlukan PPH Regional.

2) Beberapa wilayah Indonesia bagian timur, seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat memiliki rata-rata konsumsi kelompok pangan

padi-padian dengan kontribusi energi kurang dari 50% AKE, kelompok pangan umbi-umbian memberikan kontribusi energi 8 – 34% AKE. Selain itu, rata-rata kontribusi konsumsi pangan hewani di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah (Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, DIY, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Selatan) melebihi 12% AKE. Dengan demikian, perlu disusun suatu Pola Pangan Harapan spesifik wilayah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pangan di wilayahnya masing-masing.

Tabel 17. Pola Konsumsi Padi-padian, Umbi-umbian dan Pangan Hewani (% AKE per Provinsi Rerata Tahun 2013-2018)

Provinsi	Padi-padian	Provinsi	Umbi-umbian	Provinsi	Pangan Hewani
NTB	80.7	Papua	34.0	Kepri	18.7
Sulsel	72.2	Maluku	9.0	DKI Jakarta	15.5
NTT	71.0	Papua Barat	8.0	Bali	13.6
Banten	71.0	Sulteng	4.7	Kalteng	13.6
Bali	70.9	Sultra	4.1	DIY	12.9
Sultra	70.5	Malut	3.6	Babel	12.9
DIY	69.0	Sulut	2.7	Kaltim	12.8
Gorontalo	68.7	Sulsel	2.4	Kaltara	12.7
Jabar	68.4	NTT	2.4	Riau	12.5
Sumut	66.2	Gorontalo	2.3	Kalsel	12.4
Sumbar	65.8	Kepri	2.3	Banten	12.0
Sulbar	65.0	Jatim	2.2	Kalbar	11.6
Bengkulu	64.5	Sumsel	2.2	Sulut	11.6
Sulut	64.4	DIY	2.1	Papua Barat	11.3
Sulteng	63.8	Jambi	2.1	Jambi	11.1
Sumsel	62.0	Kaltara	2.0	Jabar	10.9
Aceh	62.0	Kaltim	2.0	Sumut	10.6
Kalsel	61.8	Jateng	2.0	Sumsel	10.4
Jatim	60.8	Kalteng	1.9	Sumbar	10.0
Jambi	59.8	Sumut	1.9	Bengkulu	9.8
Kalteng	58.2	Lampung	1.9	Sulsel	9.7
Riau	57.4	Riau	1.9	Sultra	9.7
Maluku	57.4	Sumbar	1.8	Papua	9.4
Kaltara	57.2	Babel	1.8	Maluku	9.2
Lampung	56.7	Jabar	1.8	Gorontalo	9.1
Babel	56.2	Banten	1.8	Sulteng	8.9
Jateng	55.9	NTB	1.7	Aceh	8.7
Kepri	55.4	Bengkulu	1.7	Jateng	8.2
Kaltim	54.7	Sulbar	1.6	Jatim	8.1
Kalbar	53.8	Kalbar	1.6	Lampung	8.1
DKI Jakarta	53.8	Kalsel	1.5	Sulbar	7.4
Malut	47.0	DKI Jakarta	1.5	NTB	7.2
Papua Barat	45.0	Bali	1.4	Malut	6.8
Papua	41.9	Aceh	0.9	NTT	6.1
Indonesia	**61.8**	Indonesia	**2.5**	Indonesia	**10.2**
	> 50%		> 6%		>12%
	40 - 50%		3-6%		10-12%
	<40%		< 3%		5-10%

Sumber: Susenas 2013-2018, BPS diolah

3) Konsumsi energi kelompok pangan padi-padian dan umbi-umbian di Provinsi Papua, sebagai berikut:

Tabel 18. Konsumsi Energi Kelompok Pangan Padi-padian dan Umbi-umbian di Provinsi Papua Tahun 2013-2018

Kelompok Bahan Pangan	MALUKU UTARA												PAPUA												PAPUA BARAT												ANJURAN KONSUMSI	
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2013		2014		2015		2016		2017		2018		kkal	%
	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%	kkal	%		
I. Padi-padian	**784**	**39.2**	**823**	**41.2**	**881**	**44.1**	**933**	**46.7**	**917**	**45.9**	**1305**	**65.3**	**764**	**38.2**	**748**	**37.4**	**901**	**45.1**	**868**	**43.4**	**993**	**49.7**	**759**	**38.0**	**752**	**37.6**	**775**	**38.8**	**932**	**46.6**	**965**	**48.3**	**901**	**45.1**	**1072**	**53.6**	**1000**	**50**
a. Beras	684	34.2	721	36.1	693	34.7	763	38.2	728	36.4	1051	52.6	677	33.9	668	33.4	731	36.6	714	35.7	813	40.7	609	30.5	653	32.7	675	33.8	757	37.9	820	41.0	743	37.2	843	42.2		
b. Jagung	1	0.05	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	62	3.1	3	0.2	3	0.2	2	0.1	2	0.1	2	0.1	2	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.1		
c. Terigu	98	4.9	102	5.1	187	9.4	169	8.5	188	9.4	193	9.7	84	4.2	76	3.8	168	8.4	152	7.6	179	9.0	148	7.4	96	4.8	100	5.0	174	8.7	143	7.2	157	7.9	227	11.4		
II. Umbi-umbian	**81**	**4.05**	**80**	**4.0**	**80**	**4.0**	**76**	**3.8**	**82**	**4.1**	**38**	**1.9**	**589**	**29.5**	**662**	**33.1**	**818**	**40.9**	**814**	**40.7**	**720**	**36.0**	**479**	**24.0**	**188**	**9.4**	**123**	**6.2**	**183**	**9.2**	**155**	**7.8**	**187**	**9.4**	**116**	**5.8**	**120**	**6**
a. Singkong	47	2.35	48	2.4	36	1.8	39	2.0	49	2.5	24	1.2	46	2.3	39	2.0	40	2.0	34	1.7	66	3.3	52	2.6	40	2.0	36	1.8	47	2.4	37	1.9	64	3.2	34	1.7		
b. Ubi jalar	12	0.6	12	0.6	12	0.6	11	0.6	11	0.6	7	0.4	412	20.6	458	22.9	615	30.8	622	31.1	516	25.8	340	17.0	23	1.2	16	0.8	38	1.9	22	1.1	31	1.6	18	0.9		
c. Kentiang	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1		
d Sagu	21	1.05	19	1.0	32	1.6	24	1.2	21	1.1	5	0.3	100	5.0	123	6.2	109	5.5	102	5.1	89	4.5	63	3.2	101	5.1	49	2.5	80	4.0	78	3.9	66	3.3	45	2.3		
e Umbi lainnya	1	0.05	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.1	30	1.5	42	2.1	53	2.7	56	2.8	47	2.4	24	1.2	23	1.2	21	1.1	16	0.8	16	0.8	26	1.3	18	0.9		
Skor PPH	**72.6**		**74.3**		**73.2**		**74.2**		**79.2**		**75.5**		**85.9**		**85.7**		**85.2**		**82.7**		**87.6**		**70.6**		**87.4**		**88.2**		**93.8**		**91.9**		**94.1**		**80.5**		**100**	

Sumber : Susenas 2013-2108, BPS; diolah dan dijustifikasi oleh BKP
Keterangan:
- Persentase berdasarkan total konsumsi energi (9 kelompok bahan pangan)
- Skor PPH dan anjuran konsumsi berdasarkan AKE 2000 kkal/kap/hari.

4) Berdasarkan pola konsumsi pangan penduduk Indonesia dapat ditetapkan tiga pola jenis komposisi PPH, yaitu:

   (1) Pola Nasional (PPH yang telah diharmonisasi tahun 2001 oleh BKP.

   (2) Pola Pangan Harapan Regional (Pola 2)

   Komposisi PPH regional pola 2 dengan kontribusi konsumsi kelompok pangan umbi-umbian sebesar 3%. Rata-rata kontribusi energi di wilayah barat dan tengah (selain Maluku Utara, Papua Barat dan Papua), yaitu:

   - kelompok padi-padian melebihi 50%
   - kelompok umbi-umbian kurang dari 3%
   - kelompok pangan hewani diatas 12%

   Oleh karena itu dapat disusun Pola Pangan Harapan Wilayah/Regional sebagai berikut : (agar dapat memenuhi kaidah gizi seimbang/triguna makanan, peningkatan konsumsi protein baik hewani maupun nabati serta sayur dan buah pemilihannya disesuaikan dengan kebiasaan dan ketersediaan setempat).

Tabel 19. Pola Pangan Harapan Regional (Pola 2)

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	% AKG (PPH NAS)	PPH REGIONAL			
				Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Padi - padian	40.0 – 60.0	50.0	1050	50.0	0.5	25.0
2.	Umbi-umbian	0.0 – 8.0	6.0	**63**	**3.0**	0.5	1.5
3.	Pangan Hewani	5.0 – 20.0	12.0	**294**	**14.0**	1,7	24.0
4.	Minyak dan Lemak	5.0 – 15.0	10.0	210	10.0	0.5	4.0
5.	Buah/Biji	0.0 – 3.0	3.0	63	3.0	0.5	1.0
6.	Berminyak	2.0 – 10.0	5.0	105	5.0	1,7	8.5
7.	Kacang-kacangan	2.0 – 15.0	5.0	105	5.0	0.5	2.0
8.	Gula	3.0 – 8.0	6.0	**147**	**7.0**	5.0	34.0
9.	Sayur dan Buah Lain - lain	0.0 – 5.0	3.0	63	3.0	0.0	0.0
Jumlah			**100.0**	**2100**	**100.0**	**-**	**100.0**

PPH regional pola 2, persentase AKG untuk kelompok pangan umbi-umbian diturunkan dari 6% (*kolom 4*) menjadi maksimal 3 %, sesuai pola konsumsi riil (*kolom 6*), dan untuk kelompok pangan hewani dinaikkan dari 12% (*kolom 4*) menjadi 14% (*kolom 6*), untuk kelompok sayur dan buah dinaikkan dari 6% (*kolom 4*) menjadi 7% (*kolom 6*). Dengan adanya perubahan % AKG tersebut di atas, maka akan terjadi perubahan rating/bobot (*kolom 7*), yaitu:

- Kelompok sumber karbohidrat (pangan pokok, gula dan lemak) tidak ada perubahan rating/bobot.
- Kelompok pangan sumber protein/lauk-pauk (kacang-kacangan dan pangan hewani dengan kontribusi energi 19%, diperoleh rating 1,7 (berasal dari nilai 33,3 dibagi 19).
- Kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) tidak ada perubahan rating/bobot.

Pembobotan Pola Pangan Harapan (Pola 2) dalam tiga guna makanan, yaitu :

- Sumber tenaga (karbohidrat, lemak): serealia 50%, umbi-umbian/makanan berpati 3%, minyak dan lemak 10%, biji dan buah berminyak 3%, gula 5%.
  Didapatkan bobot sumber tenaga: 33,3%:71% = 0,5.
- Sumber zat pembangun (protein): pangan hewani 14%, kacang-kacangan 5%
  Didapatkan bobot sumber zat pembangun: 33,3%:19% = 1,7
- Sumber zat pengatur (vitamin dan Mineral) : sayur dan buah 7%

Didapatkan bobot sumber zat pengatur: 33,3%:7 = 5

- Lain-lain 3%

(3) Pola Pangan Harapan Provinsi Papua (Pola 3)

Kontribusi energi dari kelompok padi-padian untuk Provinsi Papua sebesar 37%-47%, sedangkan kontribusi energi dari kelompok umbi-umbian sebesar 24% - 40,9%.

Tabel 20. Pola Pangan Harapan Regional (Pola 3)

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	% AKG (PPH NAS)	PPH REGIONAL			
				Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Padi - padian	40.0 – 60.0	50.0	**600**	**45.0**	0.5	22.0
2.	Umbi-umbian	0.0 – 8.0	6.0	**460**	**12.0**	0.5	6.0
3.	Pangan Hewani	5.0 – 20.0	12.0	**300**	**12.0**	2.0	24.0
4.	Minyak dan Lemak	5.0 – 15.0	10.0	200	10.0	0.5	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	0.0 – 3.0	3.0	60	2.0	0.5	1.0
6.	Kacang-kacangan	2.0 – 10.0	5.0	100	5.0	2.0	10.0
7.	Gula	2.0 – 15.0	5.0	100	5.0	0.5	2.0
8.	Sayur dan Buah	3.0 – 8.0	6.0	120	6.0	5.0	30.0
9.	Lain - lain	0.0 – 5.0	3.0	60	3.0	0.0	0.0
Jumlah			**100.0**	**2100**	**100.0**	**-**	**100.0**

PPH regional pola 3, % AKG untuk kelompok pangan padi-padian diturunkan dari 50% (*kolom 4*) menjadi 45% (*kolom 6*), untuk kelompok pangan umbi-umbian dinaikkan dari 6% (*kolom 4*) menjadi 12% (*kolom 6*).

Adanya perubahan % AKG tersebut di atas, jika dihitung kembali pembobotannya maka tidak mengalami perubahan (*kolom 7*) seperti penjelasan berikut:

- Kelompok pangan sumber karbohidrat dan energi (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), total kontribusi energi (% AKG) adalah 71%. Bobot untuk kelompok pangan ini adalah 0,5 (berasal dari nilai 33,3 dibagi 71).
- Kelompok pangan sumber protein/lauk-pauk (kacang-kacangan dan pangan hewani) dengan kontribusi energi 17%, diperoleh bobot 2 (berasal dari nilai 33,3 dibagi 17).
- Kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) tidak ada perubahan rating/bobot.

2. NBM Skala Desa

Dalam rangka pemuktahiran NBM sampai dengan level Kecamatan. Kami melakukan project NBM Kecamatan yang dilakukan di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Lebak. Kabupaten Cirebon dengan

jumlah kecamatan sebanyak 40 kecamatan. Adapun sampel NBM kecamatan yang kami lakukan di Kecamatan Losari. Sedangkan di Kabupaten Lebak dengan jumlah kecamatan sebanyak 28 kecamatan. Adapun sampel NBM kecamatan yang kami lakukan di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak. Kami memilih kecamatan tersebut karena datanya sampai dari berbagai komoditas baik itu dari pertanian maupun perikanan tersedia. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembuatan NBM kecamatan sebagai berikut :

a. Tidak semua data produksi per kecamatan per komoditas yang ada di dalam tabel nbm tersedia, hanya beberapa komoditas saja yang tersedia di instansi terkait.
b. Untuk data peternakan, didalam tabel nbm adalah produksi peternakan sedangkan data yang tersedia di instansi terkait adalah data populasi. Sehingga data produksi peternakan per kecamatan dilakukan estimasi.
c. Data perikanan mengalami kesulitan dalam pengumpulan data, hal ini disebabkan karena data yang dikumpulkan oleh penyuluh perikanan langsung dikirimkan ke pusat. Data perikanan tangkap tidak semua wilayah di kabupaten Cirebon adalah wilayah pantai hanya 8 kecamatan yang merupakan daerah pantai yaitu Kecamatan Losari, Kecamatan Gebang, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Gunung Jati, Kecamatan kapetakan dan Kecamatan Suranenggala. sedangkan data perikanan budidaya seperti lele, patin, gurame, mas dan nila hanya ada di beberapa kecamatan.
d. Data keluar masuk barang per kecamatan tidak tersedia.
e. Tidak ada nya ada data industri makanan per kecamatan di dinas terkait.
f. Data yang ada di instansi terkait kurang terinventarisir dengan baik.
g. Data konsumsi level kecamatan tidak tersedia, sehingga pendekatannya menggunakan konsumsi kabupaten.

Hasil dari NBM skala desa di Kecamatan Losari (Kabupaten Cirebon) dan Kecamatan Bojongmanik (Kabupaten Lebak)

A. Kabupaten Cirebon

1. NBM Kecamatan Losari Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan Neraca Bahan Makanan untuk Kecamatan Losari tahun 2017 dan 2018 (sementara) seperti pada Tabel 17. Secara keseluruhan, ketersediaan energi, protein, dan lemak pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, baik peningkatan yang sedikit maupun sangat tinggi. Peningkatan ini terjadi secara total, nabati, maupun hewani.

Tabel 21. Perbandingan Energi, Protein, dan Lemak Kecamatan Losari Tahun 2017 dan 2018

	Energi (kalori/hari)		Protein (gram/hari)		Lemak (gram/hari)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total	2432	4034	86,19	118,24	71,11	212,09
Nabati	1741	1966	30,73	36,49	20,72	21,01
Hewani	691	2069	55,45	81,75	50,39	191,08

Ketersediaan energi di Kecamatan Losari pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Energi total pada tahun 2017 sebesar 2.432 kalori/hari meningkat di tahun 2018 sebesar 1,6 kali lipat menjadi 4.034 kalori/hari. Energi yang berasal dari nabati pada tahun 2017 sebesar 1.741 kalori/hari meningkat menjadi 2.069 kalori/hari di tahun 2018. Peningkatan sebesar 3 kali lipat terjadi pada energi yang berasal dari hewani yaitu sebesar 2.069 kalori/hari di tahun 2018, dari yang sebelumnya 691 kalori/hari di tahun 2017. Ketersediaan energi di Kecamatan Losari dapat dilihat pada gambar 1.

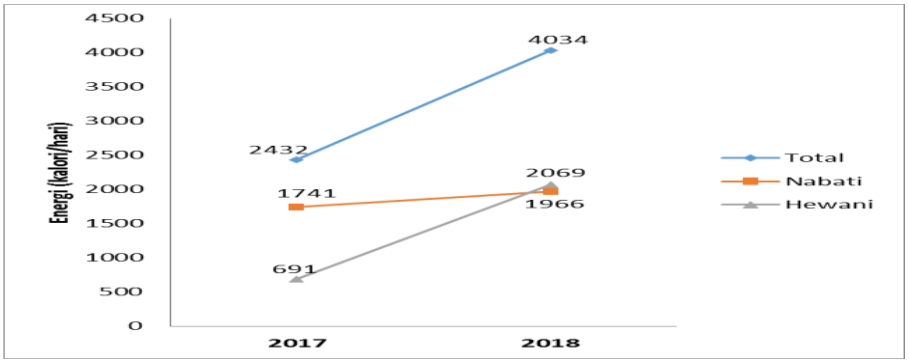

Gambar 1. Ketersediaan Energi (Total, Nabati dan Hewani) Kecamatan Losari Tahun 2017 dan 2018

Ketersediaan protein di Kecamatan Losari pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Protein total pada tahun 2017 sebesar 86,19 gram/hari meningkat di tahun 2018 sebesar 1,3 kali lipat menjadi 118,24 gram/hari. Protein berasal dari hewani yaitu sebesar 81,75 gram/hari di tahun 2018, dari yang sebelumnya 55,45 gram/hari di tahun 2017. Protein yang berasal dari nabati pada tahun 2017 sebesar 30,73 gram/hari meningkat menjadi 36,49 gram/hari di tahun 2018. Ketersediaan protein di Kecamatan Losari dapat dilihat pada gambar 2.

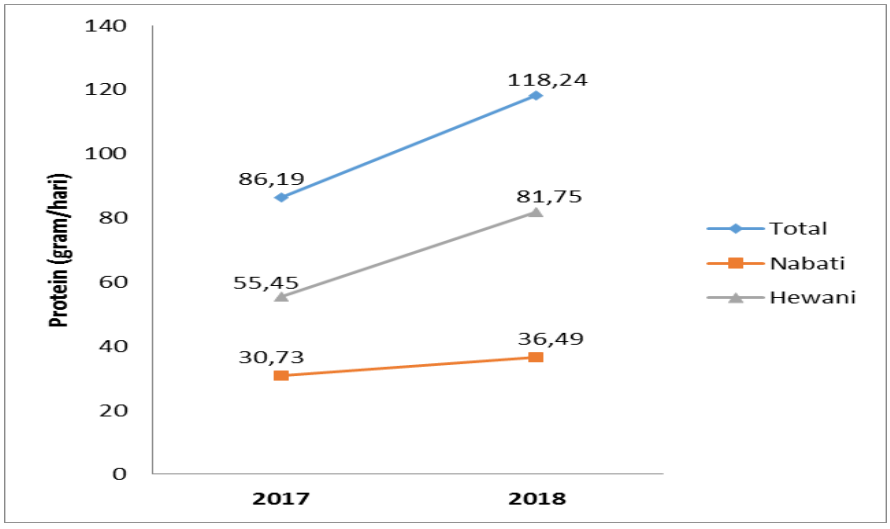

Gambar 2. Ketersediaan Protein (Total, Nabati dan Hewani) Kecamatan Losari Tahun 2017 dan 2018

Ketersediaan lemak di Kecamatan Losari pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Lemak total pada tahun 2017 sebesar 71,11 gram/hari meningkat di tahun 2018 sebesar hampir 3 kali lipat menjadi 212,09 gram/hari. Lemak yang berasal dari hewani pada tahun 2017 sebesar 50,39 gram/hari meningkat 3,7 kali lipat menjadi 191,08 gram/hari di tahun 2018. Lemak berasal dari hewani sebesar 20,72 gram/hari di tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 21,01 gram/hari di tahun 2018. Ketersediaan lemak di Kecamatan Losari dapat dilihat pada gambar 3.

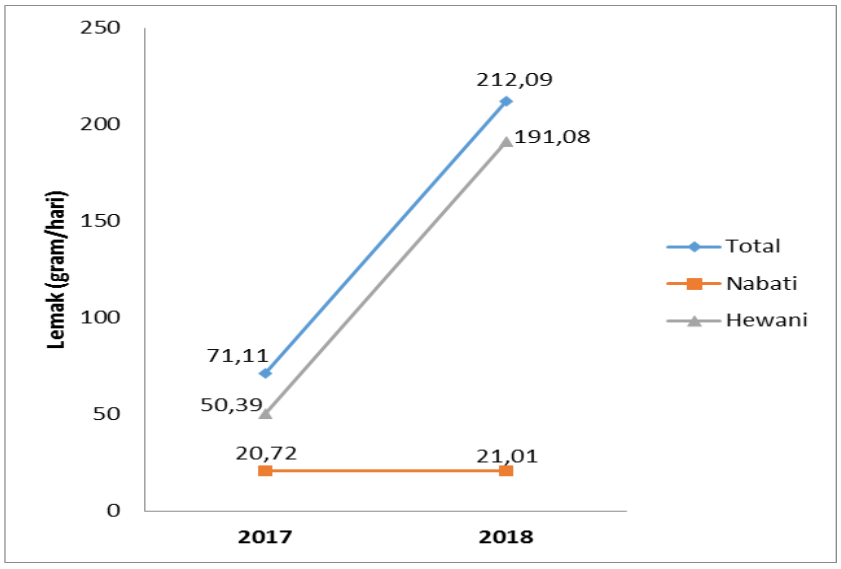

Gambar 3 Ketersediaan Lemak Kecamatan Losari Tahun 2017 dan 2018

2. NBM Kecamatan Losari Tahun 2017

Adapun hasil NBM Kecamatan Losari tahun 2017 (angka tetap) dengan beberapa estimasi seperti data keluar masuk komoditas, data produksi peternakan. Produksi yang tersedia di kecamatan Losari adalah padi, jagung, kacang tanah, bawang merah, cabe besar, petai, mangga, pisang, papaya, nangka, jambu air, jambu biji, sawo, terung, ketimun, kangkung, sapi, kerbau, domba, kambing, ayam buras, itik, udang, bandeng, kakap, belanak, kerang dara, kepiting, nila, sidat, lele, gurame dan nila.

Hasil perhitungan neraca bahan makanan dalam bentuk zat gizi per kapita dari segi produksi Kecamatan Losari tahun 2017 tanpa memperhitungkan keluar masuk barang, total ketersediaan energi sebesar 103.621 kalori/hari, protein sebesar 6.472,76 gram/hari dan lemak sebesar 8.235,37 gram/hari. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan estimasi terhadap keluar masuk komoditas pangan yang berlebih dan komoditas yang tidak ada data produksi. Sehingga setelah dilakukan estimasi keluar masuk komoditas, total ketersediaan energi berdasarkan nbm kecamatan losari sebesar 2.432 kalori/hari, protein sebesar 86,19 gram/hari dan lemak sebesar 71,11 gram/hari. Adapun total energi, protein dan lemak per masing-masing kelompok pangan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 22. Perkembangan energi, protein dan lemak per kapita per hari berdasarkan NBM Kecamatan Losari Tahun 2017.

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
Padi-padian	930	22,54	4,36
Makanan berpati	21	0,16	0,11
Gula	303	-	-
Buah biji berminyak	6	0,36	0,22
Buah-buahan	84	0,86	1,25
Sayur-sayuran	137	6,82	1,31
Daging	360	32,83	24,53
Telur	40	2,94	2,98
Susu	0	0,03	0,03
Ikan	109	19,32	2,83
Minyak dan Lemak	442	0,33	33,50
Total	**2.432**	**86,19**	**71,11**
Nabati	**1.741**	**30,73**	**20,72**
Hewani	**691**	**55,45**	**50,39**

Ketersediaan energi dan protein pada tahun 2017 lebih tinggi dari Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 Kal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari yang secara rinci disampaikan pada Tabel 19.

Tabel 23. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2017 terhadap Rekomendasi WNPG X Tahun 2012

Tahun	Ketersediaan (Per Kapita Per Hari)		Persentase Ketersediaan Terhadap Rekomendasi WNPG Th 2012	
	Energi Kalori	Protein gram	Energi (%)	Protein (%)
2017	**2.432**	**86,19**	101,34	136,80

3. NBM Kecamatan Losari Tahun 2018

Hasil NBM Kecamatan Losari untuk tahun 2018 (sementara) dengan beberapa estimasi seperti data keluar masuk komoditas, data produksi peternakan dan perikanan. Produksi yang tersedia di kecamatan Losari adalah padi, kacang tanah, kacang hijau, alpokat, jambu biji, jambu air, mangga, pepaya, pisang, sawo, belimbing, nangka, bawang merah, kacang panjang, cabe besar, terong, kangkung, dan petai.

Hasil perhitungan neraca bahan makanan dalam bentuk zat gizi per kapita dari segi produksi Kecamatan Losari tahun 2018 setelah dilakukan estimasi keluar masuk komoditas, total ketersediaan energi berdasarkan NBM Kecamatan Losari tahun 2018 sebesar 4.034 kalori/hari, protein sebesar 118,24 gram/hari dan lemak sebesar 212,09 gram/hari. Adapun total energi, protein dan lemak per masing-masing kelompok pangan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 24. Perkembangan energi, protein dan lemak per kapita per hari berdasarkan NBM Kecamatan Losari Tahun 2018

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/hari)	Protein (gram/hari)	Lemak (gram/hari)
Padi-padian	1.098	26,73	4,84
Makanan berpati	21	0,16	0,10
Gula	303	-	-
Buah biji berminyak	2	0,17	0,15
Buah-buahan	88	0,97	0,45
Sayur-sayuran	192	8,46	1,99
Daging	1.082	74,80	85,06
Telur	28	2,17	1,96
Susu	0	0,03	0,03
Ikan	17	3,02	0,41
Minyak dan lemak	1.202	1,73	117,09
Total	**4.034**	**118,24**	**212,09**
Nabati	**1.966**	**36,49**	**21,01**
Hewani	**2.069**	**81,75**	**191,08**

Ketersediaan energi dan protein pada tahun 2018 lebih tinggi daripada ketersediaan energi dan protein pada tahun 2017 dan lebih tinggi pula dari Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 Kal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari yang secara rinci disampaikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan Rekomendasi WNPG X Tahun 2012

Ketersediaan tahun 2018 (Per Kapita Per Hari)		Persentase Ketersediaan Terhadap tahun 2017		Persentase Ketersediaan Terhadap Rekomendasi WNPG tahun 2012	
Energi (Kalori)	Protein (gram)	Energi (%)	Protein (%)	Energi (%)	Protein (%)
4.034	118,24	165,87	137,19	168,08	187,68

B. Kabupaten Lebak

1. NBM Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan Neraca Bahan Makanan untuk Kecamatan Bojongmanik tahun 2017 dan 2018 (sementara) seperti pada Tabel 6. Secara keseluruhan, ketersediaan energi, protein, dan lemak pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, baik peningkatan yang sedikit maupun sangat tinggi. Peningkatan ini terjadi secara total, nabati, maupun hewani.

Tabel 26. Perbandingan Energi, Protein, dan Lemak Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017 dan 2018

	Energi (Kalori/hari)		Protein (Gram/hari)		Lemak (Gram/hari)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total	2.159	2.540	72,19	104,39	36,93	47,89
Nabati	1.900	2.158	36,19	50,06	26,42	32,4
Hewani	259	382	36,00	54,33	10,51	15,5

Ketersediaan energi di Kecamatan Bojongmanik pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Energi total pada tahun 2017 sebesar 2.159 kalori/hari meningkat di tahun 2018 menjadi 2.540 kalori/hari (117,64 persen). Energi yang berasal dari nabati pada tahun 2017 sebesar 1.900 kalori/hari meningkat menjadi 2.158 kalori/hari di tahun 2018. Sedangkan energi yang berasal dari hewani tahun 2017 sebesar 259 kalori/hari menjadi 382 kalori/hari. Ketersediaan energi di Kecamatan Bojongmanik dapat dilihat pada gambar 4.

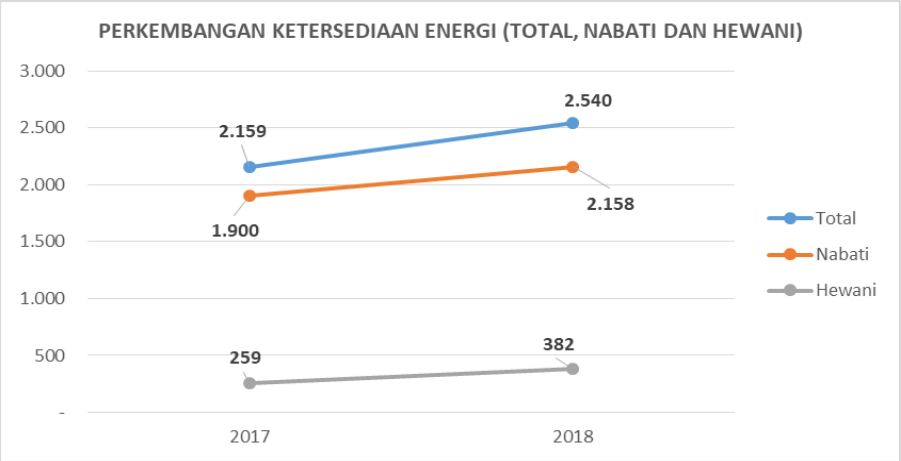

Gambar 4 Ketersediaan Energi (Total, Nabati dan Hewani) Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017 dan 2018

Ketersediaan protein Kecamatan Bojongmanik dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan dari 72,19 gram/hari menjadi 104,39 gram/hari. Protein yang berasal dari nabati pada tahun 2017 sebesar 36,19 gram/hari naik menjadi 50,06 gram/hari. Sedangkan protein yang berasal dari hewani tahun 2017 sebesar 36 gram/hari meningkat menjadi 54,33 gram. Ketersediaan protein di Kecamatan Bojongmanik dapat dilihat pada gambar 5.

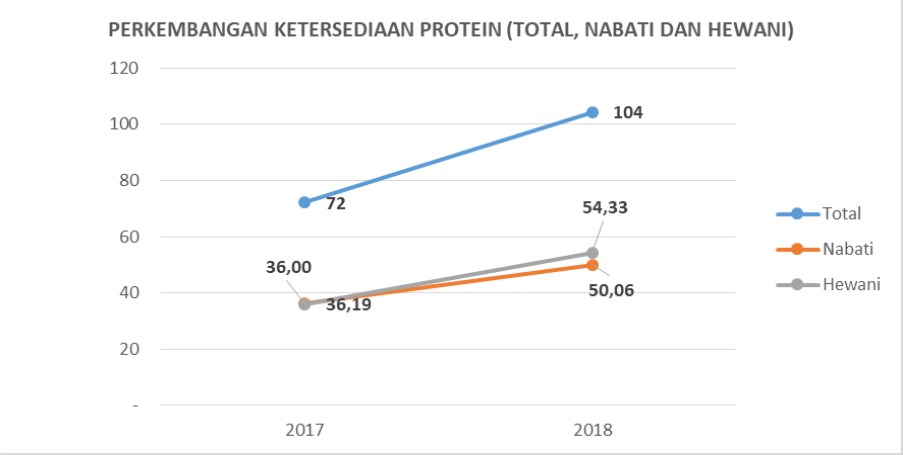

Gambar 5. Ketersediaan Protein (Total, Nabati dan Hewani) Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017 dan 2018

Ketersediaan lemak di Kecamatan Bojongmanik pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Lemak total pada tahun 2017 sebesar 71,11 gram/hari meningkat di tahun 2018 sebesar hampir 3 kali lipat menjadi 212,09 gram/hari. Lemak yang berasal dari

hewani pada tahun 2017 sebesar 50,39 gram/hari meningkat 3,7 kali lipat menjadi 191,08 gram/hari di tahun 2018. Lemak berasal dari hewani sebesar 20,72 gram/hari di tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 21,01 gram/hari di tahun 2018. Ketersediaan lemak di Kecamatan Bojongmanik dapat dilihat pada gambar 6.

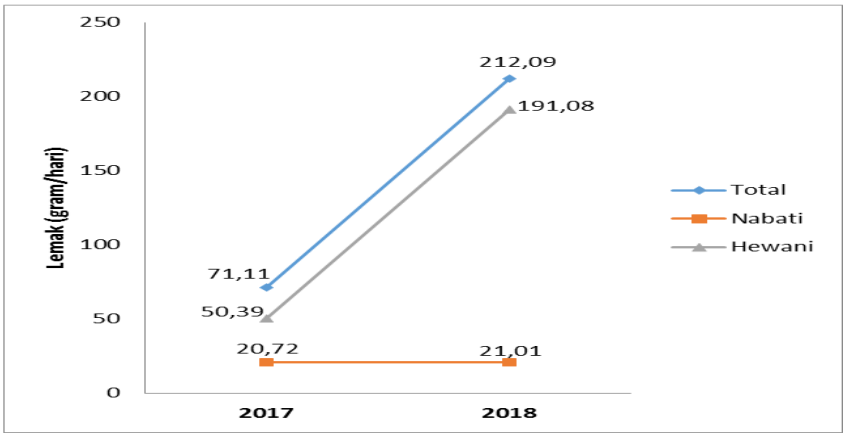

Gambar 6. Ketersediaan Lemak (Total, Nabati dan Hewani) Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017 dan 2018

2. NBM Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017

Adapun hasil NBM Kecamatan Bojongmanik tahun 2017 (angka tetap) dengan beberapa estimasi seperti data keluar masuk komoditas, data produksi peternakan. Produksi yang tersedia di Kecamatan Bojongmanik adalah padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, alpokat, duku, durian, jambu biji, jambu air, manga, nanas, papaya, pisang, rambutan, manggis, nangka, sirsak, sukun, kacang panjang, cabe besar, terong, buncis, melinjo, petai, daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras, itik, telur ayam buras, telur itik, ikan mas, ikan lele. dan ikan nila.

Hasil perhitungan neraca bahan makanan dalam bentuk zat gizi per kapita dari segi produksi Kecamatan Bojongmanik tahun 2017 tanpa memperhitungkan keluar masuk barang, total ketersediaan energi sebesar 33.620 kalori/hari, protein sebesar 2.049,04 gram/hari dan lemak sebesar 2.475,32 gram/hari. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan estimasi terhadap keluar masuk komoditas pangan yang berlebih dan komoditas yang tidak ada data produksi. Sehingga setelah dilakukan estimasi keluar masuk komoditas, total ketersediaan energi berdasarkan nbm Kecamatan Bojongmanik sebesar 4.914 kalori/hari, protein sebesar 82,39 gram/hari dan lemak sebesar 365,96 gram/hari. Adapun total energi, protein dan lemak per masing-masing kelompok pangan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 27. Perkembangan energi, protein dan lemak per kapita per hari berdasarkan NBM Kecamatan Bojongmanik Tahun 2017

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/H	Protein (Gram/Ha	Lemak (Gram/Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	1.325	31,87	6,71
Makanan berpati	0	0,00	0,00
Gula	60	-	-
Buah biji berminyak	5	0,40	0,12
Buah-buahan	56	0,75	0,31
Sayur-sayuran	37	2,36	0,38
Daging	524	40,67	38,94
Telur	8	0,51	0,61
Susu	-	-	-
Ikan	3	0,51	0,07
Minyak dan Lemak	2.898	5,31	318,82
Total	**4.914**	**82,39**	**365,96**
Nabati	**1.482**	**35,38**	**7,52**
Hewani	**3.432**	**47,01**	**358,44**

Ketersediaan energi dan protein pada tahun 2017 lebih tinggi dari Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 Kal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari yang secara rinci disampaikan pada Tabel 24.

Tabel 28. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2017 terhadap Rekomendasi WNPG X Tahun 2012

Tahun	Ketersediaan (Per Kapita Per Hari)		Ketersediaan Terhadap Rekomendasi WNPG Th 2012	
	Energi Kalori	Protein gram	Energi (%)	Protein (%)
2017	**4.914**	**82,39**	204,74%	130,77%

3. NBM Kecamatan Bojongmanik Tahun 2018

Hasil NBM Kecamatan Bojongmanik untuk tahun 2018 (sementara) dengan beberapa estimasi seperti data keluar masuk komoditas, data produksi peternakan dan perikanan. Produksi yang tersedia di kecamatan Bojongmanik adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, alpukat, mangga, rambutan, duku, durian, jambu biji, papaya, pisang, nenas, sirsak, nangka, manggis, jambu air, kacang panjang, cabai besar, terung, ketimun, kangkung, cabai rawit, petai,

daging kerbau, daging domba, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam pedaging, daging itik.

Hasil perhitungan neraca bahan makanan dalam bentuk zat gizi per kapita dari segi produksi Kecamatan Bojongmani tahun 2018 setelah dilakukan estimasi keluar masuk komoditas, total ketersediaan energi berdasarkan NBM Kecamatan Bojongmanik tahun 2018 sebesar 2.540 kalori/hari, protein sebesar 104,39 gram/hari dan lemak sebesar 47,89 gram/hari. Adapun total energi, protein dan lemak per masing-masing kelompok pangan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 29. Perkembangan energi, protein dan lemak per kapita per hari berdasarkan NBM Kecamatan Bojongmanik Tahun 2018

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
Padi-padian	1.226	29,35	6,44
Makanan berpati	10	0,07	0,04
Gula	1	-	-
Buah biji berminyak	103	10,89	4,53
Buah-buahan	416	4,89	1,65
Sayur-sayuran	75	4,83	1,10
Daging	62	5,32	4,33
Telur	80	7,45	4,94
Susu	-	-	-
Ikan	231	41,54	5,22
Minyak dan Lemak	337	0,05	19,63
Total	**2.540**	**104,39**	**47,89**
Nabati	**2.158**	**50,06**	**32,42**
Hewani	**382**	**54,33**	**15,47**

Ketersediaan energi dan protein pada tahun 2018 lebih tinggi daripada ketersediaan energi dan protein pada tahun 2017 dan lebih tinggi pula dari Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 Kal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari yang secara rinci disampaikan pada Tabel 26.

Tabel 30 Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan Rekomendasi WNPG X Tahun 2012

Ketersediaan tahun 2018 (Per Kapita Per Hari)		Persentase Ketersediaan Terhadap tahun 2017		Persentase Ketersediaan Terhadap Rekomendasi WNPG tahun 2012	
Energi (Kalori)	Protein (gram)	Energi (%)	Protein (%)	Energi (%)	Protein (%)
2.540	104	164,39	261,35	105,83	165,70

3. Eksplorasi, Pemanfaatan dan Sistem SDP

Kajian Eksplorasi, Pemanfaatan dan Sistem Sumberdaya Pangan bertujuan untuk mengidentifikasi komoditas pangan lokal yang memiliki nilai keunggulan komparatif dan kompetitif; memetakan sebaran komoditas pangan lokal unggulan; menilai kesesuaian komoditas pangan lokal yang dikembangkan dengan potensi sumberdaya alam lainnya seperti lahan, air, dan sebagainya; mengetahui nilai ekonomis komoditas pangan lokal dan; dan mengetahui model pengembangan komoditas pangan lokal.

1) Evaluasi Tanaman Lokal di Kabupaten Kupang dan NTT

   - Inventarisasi sumberdaya pangan yang dilakukan mahasiswa IPB di NTT dengan mengembangkan aplikasi yang dimuat di Aplikasi Store. Namun, proses identifikasi manual masih diperlukan untuk validasi tetapi semakin lama semakin tidak efisien.
   - Saran agar BKP bisa menjadi *leading* untuk mengidentifikasi sumberdaya pangan dengan aplikasi. Karena jika secara manual, perubahan *land use* nya (terutama di daerah luar Pulau Jawa) sangat cepat. Untuk melibatkan partisipasi warga desa bisa dengan memberikan insentif.

2) Potensi Sumberdaya Lahan dan Kesesuaian Lahan Pengembangan Komoditas Pangan di Kabupaten Kupang (NTT) dan Kabupaten Pandeglang

   - Data biofisik sudah ada di beberapa instansi, contoh data iklim (BMKG), data digital tanah.
   - BKP dapat melakukan kerjasama antara BBLSDM dengan PSP3, IPB.

3) Pemetaan Sumberdaya Pangan Berbasis DPM

   - Perlu disiapkan *drone*, untuk pemetaan dan proses penjahitan citra dapat menggunakan *software free*.
   - Biaya untuk pembuatan citra desa dengan alat dipinjamkan ke warga desa dan melibatkan partisipasi warga desa butuh sekitar 15 juta, termasuk partisipasi warga. Untuk *pilot project* di Desa Suka Damai butuh dana 20 juta. Penyusunan peta desa dengan 15 tematik (kesehatan, pemukiman, dll) butuh waktu 3 bulan.
   - Pengunaan *drone* sudah di 80 titik di wilayah Indonesia, antara lain untuk klarifikasi CPCL. Penggunaan *drone* bisa memotret 250 Ha, sedangkan Copter bisa memotret 80 Ha. Harga Drone Fikswing 30 juta dan Copter 25 juta.
   - PSP3 siap membantu untuk bimtek *transfer knowledge* kepada petugas BKP untuk penerapan teknologi DPM. Aspek yang perlu di lapangan adalah contoh hara tanah, dapat di-overlay antara citra desa dengan contoh unsur tanah. DPM dapat menunjukkan heterogenitas tanah di desa tersebut.

- BKP memiliki tugas menyusun FSVA 160 Kabupaten. BKP dapat bekerjasama untuk pemanfaatan teknologi DPM untuk validasi data FSVA level desa.

a. Inventarisasi Sumberdaya Pangan di Tingkat Kabupaten

Inventarisasi Sumberdaya Pangan di tingkat Kabupaten dilaksanakan di Kabupaten Kupang dan Pandeglang. Hasil inventarisasi sumberdaya pangan di Kabupaten Kupang sebagai berikut:

1) Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Kupang cukup besar. Sebagian besar lahan pertanian di wilayah ini merupakan lahan kering berupa ladang dan tegalan seluas 35.898,72 Ha (7,09%). Lahan sawah irigasi seluas 4.856,76 Ha (0,96%) dan lahan perkebunan seluas 39.731,45 Ha (7,84%). Meskipun demikian masih terdapat potensi lahan yang belum dimanfaatkan, yaitu lahan terbuka dan semak belukar masing-masing seluas 38.942,14 Ha (7,69%) dan 72.459, 35 Ha (14,3%).

2) Komoditas yang potensial untuk dikembangkan sebagai pangan pokok di Kabupaten Kupang diantaranya jagung dan kacang hijau. Pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu kesesuaian dengan potensi wilayah, potensi kandungan gizi, nilai ekonomis dan pangan telah dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari.

   - Jagung

     Jagung telah lama dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat Kupang sebagai salah satu pangan pokok. Sebagian besar pertanaman jagung dilakukan dilahan kering (tegalan dan ladang) dan sebagian kecil ditanam di pekarangan rumah.

     Jagung memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pangan pokok di Kabupaten Kupang karena memiliki kandungan gizi yang besar. Jika dibandingkan kandungan gizi jagung dengan beras, maka 100 gram jagung mengandung kalori dan protein yang lebih besar dibandingkan beras, yaitu masing-masing 365 kkal dan 9,42 gram. Bahkan jagung memiliki kandungan lemak, vitamin A dan vitamin B-6 yang tidak terdapat dalam beras.

     Produksi jagung tahun 2017 di Kabupaten Kupang mencapai 31.331 ton dan tersebar di seluruh kecamatan. Sentra produksi jagung meliputi Kecamatan Semau Selatan, Takari, Kupang Tengah, Kupang Timur, Amarasi Selatan dan Kecamatan Kupang Barat. Potensi produksi jagung tertinggi di Kecamatan Semau Selatan mencapai 4.203 ton.

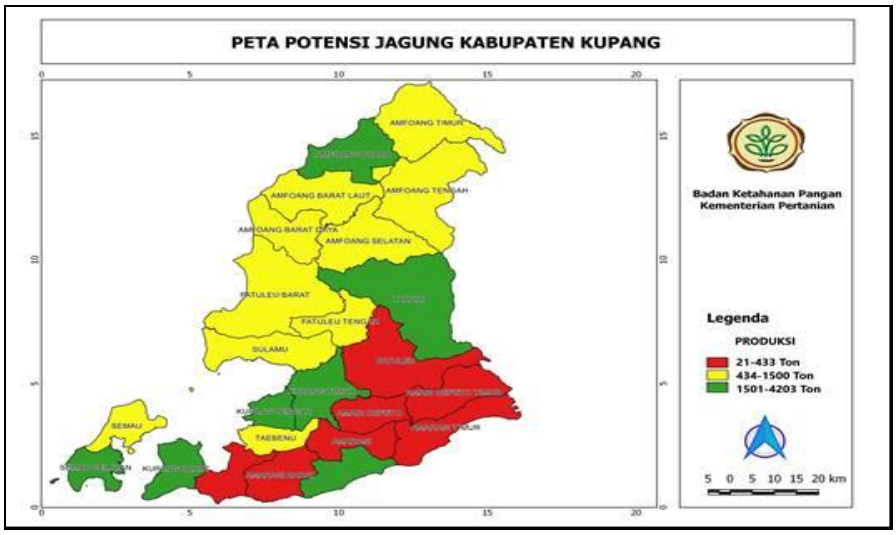

Gambar 7. Peta Potensi Jagung Kabupaten Kupang

Jagung lokal yang dibudidayakan di wilayah Kabupaten Kupang, antara lain jagung pulut (jagung ketan). Produktivitas jagung pulut lokal masih relatif rendah, yaitu 2-3 ton/ha. Sementara itu permintaan pasar terhadap jagung pulut cukup besar. Jagung ini umumnya dimanfaatkan untuk bahan pangan secara langsung dan industri pangan berbasis jagung.

Makanan tradisional berbahan baku jagung yang biasa dikonsumsi masyarakat, antara lain: jagung bose (pena bose), jagung ketemak (pena pasu), boras, pena tutu, pena beti, pena boto dan ut pena. Sementara produk pangan olahan berbahan baku jagung yang telah dikembangkan oleh industri pengolahan pangan, baik *home industri* maupun UKM di Kabupaten Kupang, antara lain jagung bose instan, jagung titi, emping jagung, marning jagung, jagung pulut goreng dan lepa jagung. Alat pengolahan yang digunakan relatif masih sederhana. Produk pangan olahan tersebut telah dipasarkan di Kabupaten Kupang dan di luar kabupaten.

- Kacang Hijau

Kacang hijau telah lama dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat Kupang sebagai salah satu pangan pokok. Sebagian besar pertanaman kacang hijau dilakukan di lahan kering (tegalan dan ladang) dan sebagian lagi ditanam di pekarangan rumah dan lokasi sekitar rumah.

Kacang hijau memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pangan pokok di Kabupaten Kupang karena memiliki kandungan gizi yang besar. Setiap 100 gram kacang hijau mengandung kalori 323 kkal, karbohidrat 56,8 gram, protein 22 gram, lemak 1,5 gram. Jika dibandingkan kandungan gizi kacang

hijau dengan beras, maka kacang hijau mengandung protein, zat fosfor dan zat besi yang lebih besar dibandingkan beras. Bahkan kacang hijau memiliki kandungan vitamin A, vitamin B dan vitamin C yang tidak terdapat dalam beras.

Produksi kacang hijau tahun 2017 di Kabupaten Kupang mencapai 157 ton dan tersebar di sebagian besar kecamatan. Sentra produksi kacang hijau di Kabupaten Kupang meliputi Kecamatan Kupang Timur, Fatuleu, Semau Selatan, Sulamu dan Kecamatan Fatuleu Barat. Produksi jagung tertinggi di Kecamatan Kupang Timur mencapai 29 ton.

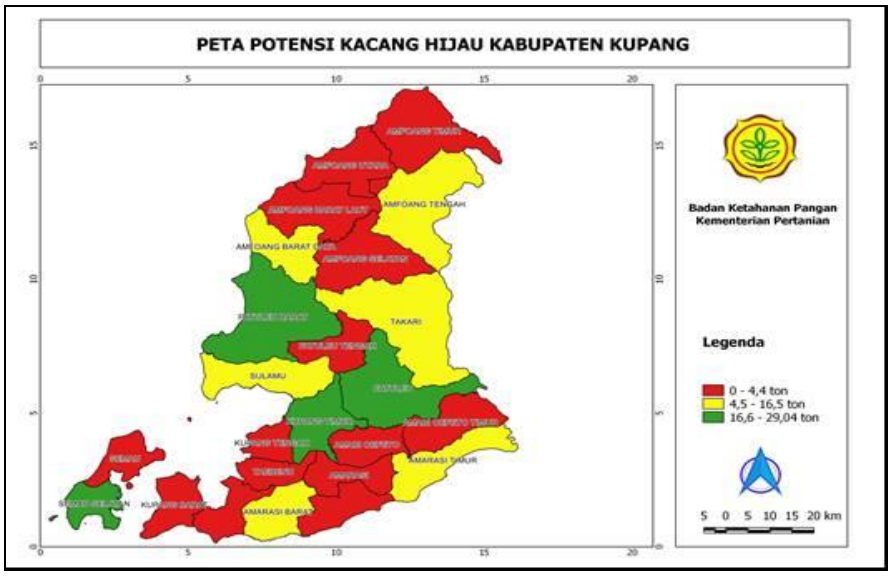

Gambar 8. Peta Potensi Kacang Hijau Kabupaten Kupang

Beberapa menu makanan tradisional yang menggunakan kacang hijau sebagai salah satu bahannya adalah jagung bose, jagung katemak dan kue-kue tradisional yang biasa dikonsumsi masyarakat.

Produk pangan olahan berbahan baku kacang hijau yang telah dikembangkan oleh industri pengolahan pangan, baik home industri maupun UKM di Kabupaten Kupang, antara lain tepung kacang hijau. Tepung kacang hijau merupakan bahan baku pembuatan cake kacang hijau. Produk pangan olahan tersebut telah dipasarkan di Kabupaten Kupang dan diluar kabupaten.

3) Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri pengolahan produk pangan di Kabupaten Kupang, antara lain:

- Jenis produk pangan yang dihasilkan masih terbatas.
- Teknologi pengolahan produk pangan yang digunakan relatif sederhana. Produsen masih menggunakan alat pengolahan manual dan sederhana.

- Skala produksi relatif kecil karena keterbatasan modal, peralatan dan teknologi pengolahan.
- Kebutuhan bahan baku dari industri pengolahan jagung belum dapat dicukupi oleh produksi domestik di Kabupaten Kupang. Sebagian bahan baku jagung didatangkan dari luar Kabupaten Kupang.

4) Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan komoditas pangan potensial di Kabupaten Kupang, antara lain:

- Peningkatan teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi
- Pengembangan inovasi teknologi pengolahan pangan untuk meningkatkan ragam produk turunan sesuai dengan selera pasar terutama generasi muda
- Pengembangan distribusi dan promosi untuk memperluas jangkauan pemasaran

Hasil inventarisasi sumberdaya pangan di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1) Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Pandeglang cukup besar. Sebagian besar lahan pertanian di wilayah ini didominasi untuk kebun campuran seluas 86.517,33 Ha (31,01%). Penggunaan lahan untuk perkebunan besar seluas 5.272,54 Ha (1,89%), tegalan/ladang seluas 47.893,65 Ha (17,61%), persawahan seluas 34.391,28 Ha (12,32%). Masih terdapat potensi lahan yang belum dimanfaatkan, yaitu hutan belukar dan tanah terbuka masing-masing seluas 50.888,90 Ha (18,24%) dan 1.139,78 Ha (0,41%).

2) Komoditas yang potensial untuk dikembangkan sebagai pangan pokok di Kabupaten Pandeglang diantaranya ubi kayu, kedelai dan talas beneng. Pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu kesesuaian dengan potensi wilayah, potensi kandungan gizi, nilai ekonomis dan pangan telah dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari.

- Ubi Kayu

Ubi kayu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pangan pokok di Kabupaten Pandeglang karena memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Setiap 100 gram ubi kayu mengandung energi 160 kkal, karbohidrat 38,06 gr, protein 1,36 gr, lemak 0,28 gr, Potasium 271 mg dan vitamin C 20,6 mg.

Masyarakat Kabupaten Pandeglang sudah mengolah ubi kayu menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah. Beberapa produk olahan berbahan baku ubi kayu yang telah diproduksi masyarakat Pandeglang, antara lain: tepung mocaf, tapioka, keripik singkong, kerupuk singkong, muffin mocaf, kacang umpet mocaf, kue jahe mocaf dan eggroll mocaf. Industri pengolahan produk pangan berbahan baku ubi kayu tersebar di Kecamatan Karang Tanjung, Cipeucang, Bojong, Saketi dan Kecamatan Mandalawangi.

Sentra produksi ubi kayu di Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Cimanggu, Bojong, dan Picung. Produksi ubi kayu tertinggi di Kecamatan Cimanggu mencapai 5.960 ton. Sementara produksi terendah di Kecamatan Mandalawangi sebesar 20 ton sedangkan Kecamatan Cigeulis merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupatan Pandeglang yang tidak membudidayakan ubi kayu.

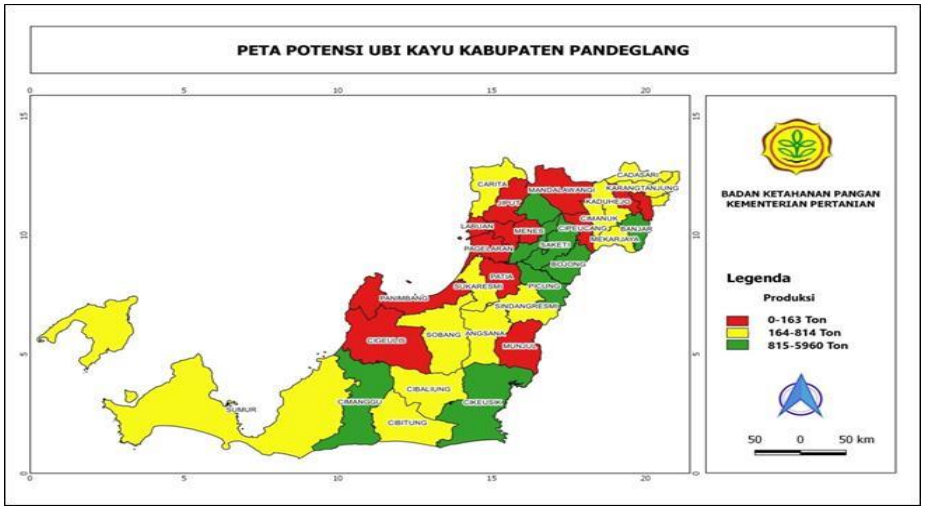

Gambar 9. Peta Potensi Ubi Kayu Kabupaten Pandeglang

- Kedelai

Kedelai memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pandeglang karena hasil produksi dan benihnya bahkan sudah diekspor ke luar daerah, seperti Serang dan Lampung. Selain itu kedelai juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Setiap 100 gram kedelai mengandung energi 446 kkal, karbohidrat 30,16 gram, protein 36,49 gram, lemak 19,94 gram. Kandungan Potasium tinggi sebesar 1.797 mg, Fosfor 704 mg dan Kalsium 277 mg (USDA National Nutrient Database, 2011).

Kedelai telah diolah menjadi berbagai produk olahan. Produk pangan olahan berbahan baku kedelai yang memiliki peluang untuk dikembangkan, antara lain: rengginang ampas kedelai, sari kedelai

Sentra produksi kedelai di Kabupaten Pandeglang tersebar di Kecamatan Cigeulis, Cimanggu, dan Munjul. Produksi kedelai tertinggi di Kecamatan Cigeulis mencapai 2.431 ton. Sementara produksi terendah di Kecamatan Pandeglang sebesar 30 ton, sedangkan Kecamatan Cadasari dan Karang Tanjung tidak membudidayakan kedelai.

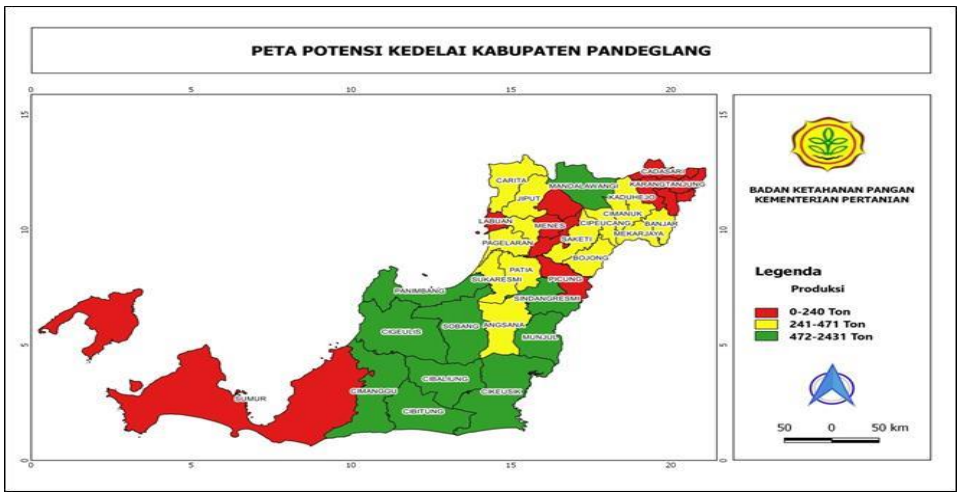

Gambar 10. Peta Potensi Kedelai Kabupaten Pandeglang

- Talas Beneng

  Sebagian besar budidaya talas beneng dilakukan dilahan kering (tegalan dan ladang) dan sebagian kecil ditanam di pekarangan rumah. Talas benang merupakan komoditas pangan lokal khas Pandeglang yang dapat menjadi sumber pangan alternatif, karena memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Agroekologi talas beneng tersebar di wilayah sekitar Gunung Karang Kabupaten Pandeglang. Kandungan gizi dalam 100 gr talas beneng, yaitu energy 343 kkal, karbohidrat 78,87 gr, protein 5,42 gr, lemak 0,60 gr, Vitamin B1 0,73 mg, Vitamin B2 0,78 mg

  Beberapa makanan tradisional berbahan baku talas beneng yang biasa dikonsumsi masyarakat adalah talas kukus dan talas goreng. Perlu pengembangan inovasi produk pangan berbahan baku talas beneng, seperti aneka kue dan cake talas beneng, tepung talas beneng dan lain-lain. Makanan tradisional tersebut masih diproses dengan teknologi sederhana.

  Umbi talas beneng mencapai berat 20 kg dalam umur 2 tahun. Di daerah Juhut, Pandeglang produksi tepung talas pada tahun 2016 mencapai 3 ton/bulan. Permintaan tepung talas beneng saat ini minimal 4 ton per bulan, terutama ke Bogor, bahkan ke daerah lain seperti ke Banjarmasin, Lampung dan Semarang. Tepung. Olahan tepung talas dan umbi beneng diantaranya berupa cake beneng, lapis talas, brownies kukus, cake marmer beneng dan lain-lain.

3) Industri pengolahan produk pangan yang telah dikembangkan di Kabupaten Pandeglang, yaitu:

   - Produk pangan berbahan baku talas beneng, yaitu gaplek, tepung, brownies, kue kering, keripik talas beneng.
   - Produk pangan berbahan jagung, yaitu keripik dan marning jagung.

- Produk pangan berbahan baku durian, yaitu dodol dan wajik durian.
- Produk pangan berbahan baku kelapa, yaitu nata de coco dan tepung kelapa.

4) Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan komoditas pangan potensial di Kabupaten Pandeglang, antara lain:

- Penyediaan bibit untuk regenerasi dan peningkatan produksi.
- Peningkatan inovasi teknologi pengolahan pangan dan skala produksi produk pangan.
- Pengembangan distribusi dan promosi pangan.

b. Inventarisasi Sumberdaya Pangan di Tingkat Desa/Kelurahan

Berdasarkan eksplorasi, pemanfaatan dan sistem sumberdaya pangan yang dilaksanakan di Kelurahan Juhut dapat diinventarisasi jenis komoditas pangan, potensi, sebaran, dan arah pengembangan komoditas pangan di tingkat wilayah terkecil, yaitu:

1) Kelembagaan petani di Kelurahan Juhut sudah tertata baik. Terdapat satu gapoktan di wilayah tersebut, yaitu Gapoktan Juhut Mandiri yang terdiri dari 8 kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Cinyurup Mandiri, Karya Mandiri I, Karya Mandiri II, Taruna Mandiri, Noval, Jaya Mandiri, Ciodeng Mandiri, Juhut Mandiri. Anggota Gapoktan membudidayakan kambing, tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan. Selain itu terdapat 2 KWT (Kelompok Wanita Tani) dan 1 Poktan (Kelompok Tani) yang bergerak di bidang usaha home industri pengolahan produk pangan, yaitu KWT Bina Mandiri, Cibal Mandiri dan Poktan Karya Mandiri. Gapoktan Juhut Mandiri diketuai oleh Juliana dengan wakil ketua M. Utin. Gapoktan ikut berperan dalam pengembangan komoditas pangan di wilayah Kelurahan Juhut, antara lain dengan menampung hasil produksi anggota gapoktan dan mendistribusikan/memasarkannya ke luar wilayah Kelurahan Juhut.

2) Potensi sumberdaya alam di Kelurahan Juhut cukup beragam. Potensi lahan pertanian seluas 429 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 30 ha dan lahan kering seluas 399 ha. Lahan kering sebagian besar berkontur lereng landai. Masih terdapat potensi lahan yang belum dimanfaatkan, yaitu lahan milik perhutani. Terdapat kerjasama antara Gapoktan dengan perhutani, yaitu anggota gapoktan dapat memanfaatkan lahan perhutani untuk budidaya tanaman perkebunan, palawija, umbi-umbian dan sayur-sayuran.

3) Kelurahan Juhut dibagi menjadi 5 zona berdasarkan potensi dan pengembangan komoditas pangannya, yaitu:

- Zona 1: Komoditas yang dikembangkan adalah kambing, talas beneng dan sayuran. Zona ini mencakup wilayah RW 5, yaitu Kampung Kadukebo, Cinyurup.

- Zona 2: Komoditas yang dikembangkan adalah kambing, palawija (kacang tanah, jagung, ubi jalar). Zona ini mencakup wilayah RW 6, yaitu Kampung Balangendong, Ciodeng, Sanim, Kadukupa.
- Zona 3. Komoditas yang dikembangkan adalah tanaman perkebunan (cengkeh, durian matahari, durian cikoneng, kopi) dan talas beneng. Zona ini mencakup wilayah RW 4, yaitu Kampung Canggoang.
- Zona 4: Komoditas yang dikembangkan adalah kambing, padi. Zona ini mencakup wilayah RW 2, yaitu Kampung Kadusalak dan Kadulimus.
- Zona 5: Komoditas yang dikembangkan adalah padi, itik. Zona ini mencakup wilayah RW 1, yaitu Kampung Juhut.
- Non Zona: Sebagian penduduk memiliki mata pencaharian sebagai pedagang ikan laut. Non zona mencakup wilayah RW 3, yaitu Kampung Mauk.

Zona 1 dan zona 2 mengelola hutan di lahan perhutani 53 Ha: ditanami kopi, cengkeh, sayuran, palawija (jagung).

4) Produksi komoditas pangan yang dipasarkan dalam bentuk bahan mentah/segar, yaitu kambing, sayur-sayuran, cengkeh, pisang dan durian. Sedangkan produksi komoditas talas beneng, kopi, cengkeh, pisang dan melinjo telah dikembangkan industri pengolahan pangannya.
5) Industri pengolahan produk pangan olahan yang telah dikembangkan, antara lain: gaplek, tepung, brownies, donat, dacron, kue kering dan keripik berbahan baku talas beneng; emping dan keceprek berbahan baku melinjo; keripik pisang; kopi butir dan kopi bubuk premium.
6) Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam budidaya komoditas pangan potensial di Kelurahan Juhut, antara lain:
   - Penyediaan pakan hijau untuk ternak kambing agak sulit karena lokasi pengambilan pakan hijau/rumput jauh.
   - Teknologi budidaya tanaman talas beneng, sayur-sayuran, kopi, cengkeh, pisang, durian dan melinjo yang digunakan relatif sederhana. Penggunaan alsintan terkendala topografis Kelurahan Juhut yang sebagian besar wilayahnya berupa lereng, bukan hamparan.
   - Lahan pengembangan budidaya kopi terbatas karena mulai tahun 2020 lahan perhutani hanya boleh ditanami cengkeh dan kakao.
   - Lokasi budidaya sayur-sayuran di dekat puncak Gunung Karang dan tidak dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor. Hal ini menyulitkan pengangkutan hasil panen sayur-sayuran dari lokasi tanam.

7) Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri pengolahan produk pangan di Kelurahan Juhut, antara lain:

   - Teknologi pengolahan produk pangan yang digunakan masih sedehana. Sebagian besar alat pengolahan produk pangan yang digunakan masih manual dan relatif sederhana.
   - Jenis produk pangan yang dihasilkan masih terbatas.
   - Skala produksi pengolahan produk pangan relatif kecil dan belum dapat memenuhi permintaan pasar.
   - Permintaan gaplek dan tepung talas beneng cukup tinggi, namun ketersediaan bahan baku talas beneng masih terbatas.

8) Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan komoditas pangan potensial di Kelurahan Juhut, antara lain:

   - Peningkatan produksi komoditas pangan melalui penerapan teknologi budidaya komoditas pangan, seperti penggunaan bibit unggul dan peningkatan teknik budidaya.
   - Peningkatan teknologi pengolahan produk pangan, antara lain melalui pemberian pelatihan pengolahan produk pangan dan pemberian bantuan alat/mesin pengolahan pangan.
   - Peningkatan skala produksi pengolahan produk pangan, diantaranya dengan penggunaan mesin pengolahan berkapasitas lebih besar dan meningkatkan ketersediaan bahan baku.
   - Perluasan jangkauan pemasaran, antara lain dengan meningkatkan promosi produk pangan melalui pameran, bazaar, agro expo dan sebagainya.

4. Validitas Data Stok di Penggilingan

Berdasarkan data stok beras di penggilingan secara nasional yang dihitung setiap minggu oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, berkisar antara 1,2 - 1,6 juta ton beras. Data stok ini berdasarkan laporan yang dikirim dari 100 enumerator yang tersebar di 64 kabupaten pada 22 provinsi yang setiap minggu pada hari selasa mengambil data stok di Penggilingan dan melaporkan ke pusat.

Data stok beras di penggilingan yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan ini merupakan hasil survei, sehingga penting untuk terus diuji validitasnya. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan metode sampling dengan menghitung jumlah riil pada lokasi terpilih. Uji ini selanjutnya dapat digunakan untuk memverifikasi akurasi sampling yang dikirim oleh enumerator.

Tujuan kajian ini adalah: (1) Menguji keakuratan data stok beras di penggilingan yang dikirim oleh enumerator, dan (2) Menghasilkan

rekomendasi sebagai bahan acuan dalam perbaikan pengelolaan data stok gabah dan beras di penggilingan. Sasaran kajian ini mencakup 3 (tiga) provinsi, yakni Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan dengan total sampel sebanyak 232 penggilingan.

Kajian uji validitas data stok beras menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang berbasis pada data primer maupun sekunder. Pendekatan kuantitatif yang berbasis pada data primer digunakan untuk memperoleh gambaran tentang data stok gabah dan beras di penggilingan. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk melakukan *cross check* atas data yang diambil oleh enumerator kabupaten. Kemudian, pendekatan kuantitatif yang berbasis pada data sekunder digunakan untuk memetakan implikasi yang timbul dari validitas data stok penggilingan. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memetakan hambatan yang ada terkait validitas data stok Penggilingan. Pemetaan hambatan ini diawali dengan mengindentifikasi mekanisme dan pelaksanaan pengumpulan data stok penggilingan yang dilakukan oleh enumerator kabupaten. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk memetakan opini para pengusaha penggilingan terhadap pelaksanaan pengumpulan data setiap minggu oleh enumerator kabupaten.

Teknik penarikan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti sendiri yang menentukan sampel yang diambil (tidak secara acak). Dipilih keseluruhan populasi pada lokasi sampling yaitu :

Tabel 31. Sampel Kajian Uji Validitas Monitoring Stok Beras di Penggilingan

No	Provinsi	Kab.	Tipe Penggilingan			
			Besar	Sedang	Kecil	Total
1	Sulawesi Selatan	Bantaeng	4	3	5	12
		Gowa	-	4	29	33
		Bone	1	2	36	39
Jumlah			**5**	**9**	**70**	**84**
2	Sumatera Selatan	OKI	-	1	17	18
		Ogan Ilir	1	-	9	10
		Lahat	-	1	9	10
Jumlah			**1**	**2**	**35**	**38**
3	Jawa Barat	Indramayu	1	3	26	30
		Karawang	1	2	37	40
		Subang	5	3	32	40
Jumlah			**7**	**8**	**95**	**110**
Total			**13**	**19**	**200**	**232**

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer berupa cek lapangan (ground *check*) dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada beberapa pihak yang terkait langsung

dengan data stok penggilingan, meliputi: (1) Koordinator Provinsi; (2) Enumerator Kabupaten; (3) Penggilingan; (4) Berbagai stakeholder terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sejumlah Kementerian/Lembaga yang terkait, di antaranya Badan Pusat Statistik, dan Perpadi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung ke responden dengan mendatangani pemilik Penggilingan. Pertanyaan ke responden menggunakan kuesioner. Pengambilan data dan informasi ditetapkan pada hari Selasa selama satu bulan terakhir untuk menguji keakuratan data. Pengumpulan data dilakukan secara independen tanpa melibatkan enumerator untuk menghindari bias data.

Pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi kebenaran data dan informasi stok dari Penggilingan yang dilakukan pada saat survei. Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi deskriptif analitik. Metode deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Analisis dilakukan untuk melihat kisaran jumlah stok yang ada di masing-masing kapasitas penggilingan yang akan digunakan sebagai kontrol validitas data.

Ukuran-ukuran yang digunakan dalam analisis variabilitas/konsistensi ini hanya digunakan untuk membandingkan jawaban responden pada kondisi pengambilan data oleh enumerator dengan jawaban responden pada kondisi pengambilan data oleh Tim Kajian. Ukuran-ukuran tersebut dihitung untuk seluruh kategori yang respon dalam suatu karakteristik yang dihitung sebagai satu kesatuan. Perbedaan data isian yang dikumpulkan oleh enumerator dan data yang dikumpulkan oleh tim kajian menggunakan Analisis Deskriptif, dengan melihat besarnya nilai perbedaan antara data enumerator dan data kajian. Data yang disajikan terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai selisih kemudian didapatkan selisih relatif yang membandingkan nilai selisih dengan nilai data enumerator. Berikutnya diberikan keterangan data yang berbeda antara enumerator dan kajian maka diketahui besarnya rataan perbedaan kedua data. Besarnya persentase keakuratan data dilihat dari persentase rataan perbedaan terhadap rataan data enumerator. Selanjutnya, uji statistika yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan nyata antara data enumerator dan data tim kajian dapat dilakukan dengan menggunakan uji t test (uji beda nyata) antara dua populasi pada selang kepercayaan 95 persen. Perhitungan di atas akan menghasilkan skor yang dapat menunjukkan keakuratan data yang dikumpulkan oleh enumerator.

Berdasarkan hasil kajian validitas data stok beras di penggilingan yang dilakukan pada 3 (tiga) provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Sumatera Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara kepatuhan pengumpulan data oleh enumerator telah sesuai dengan prosedur dan melaporkan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

2. Hasil uji stok di penggilingan besar pada provinsi Sumatera Selatan menunjukan bahwa data stok GKP, GKG dan beras yang dicatat oleh tim kajian dan enumerator sama datanya. Sampel penggilingan besar ini tidak dilakukan uji independent sample t test karena jumlah sampel hanya satu.
3. Hasil uji independent sample t test data stok GKP, GKG dan beras pada kapasitas penggilingan sedang dan kecil di Provinsi Sumatera Selatan, menunjukan nilai Hipotesi nol (H0) diterima artinya tidak ada perbedaan secara nyata antara GKP enumerator dan kajian sehingga dapat dikatakan data tersebut valid pada taraf alpha (5 persen) atau selang kepercayaan 95 persen.
4. Hasil uji independent sample t test data stok GKP, GKG dan beras pada penggilingan besar, sedang dan kecil di Provinsi Jawa Barat, menunjukan Hipotesis nol (H0) diterima yang berarti tidak ada perbedaan secara nyata antara enumerator dan kajian sehingga dapat dikatakan data tersebut valid pada taraf alpha (5 persen) atau selang kepercayaan 95 persen. Sementara data stok GKP pada kapasitas Penggilingan kecil menunjukan Hipotesis nol (H0) ditolak yang berarti ada perbedaan secara nyata antara GKP enumerator dan kajian sehingga dapat dikatakan data tersebut tidak valid.
5. Hasil uji independent sampel t test untuk mengetahui perbedaan data stok GKP, GKG dan beras antara enumerator dan kajian pada penggilingan besar, sedang dan kecil di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan Hipotesis nol (H0) diterima yang berarti tidak ada perbedaan secara nyata antara GKP enumerator dengan Kajian sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut valid pada taraf alpha (5 persen) atau selang kepercayaan 95 persen. Sementara pada kapasitas Penggilingan kecil Hipotesis nol (H0) ditolak artinya ada perbedaan secara nyata antara beras enumerator dan beras kajian sehingga dapat dikatakan tidak valid pada taraf alpha (5 persen) atau selang kepercayaan 95 persen.

Saran Rekomendasi

1. Perlu dilakukan pendataan ulang pada sampel penggilingan kecil yang sudah berjalan karena banyak ditemukan penggilingan kecil yang tidak memiliki stok lebih ke layanan jasa.
2. Meningkatkan jumlah sampel penggilingan agar validitas datanya meningkat.
3. Melakukan updating data penggilingan padi yang dilakukan oleh Dinas Pangan di provinsi dan kabupaten/kota, karena data penggilingan yang dikeluarkan BPS tahun 2012 sudah tidak relevan datanya dengan kondisi saat ini.
4. Memberikan perhatian kepada penggilingan yang selama ini menjadi mitra Badan Ketahanan Pangan dalam memberikan data stok beras agar data yang diberikan kontinyu dan akurat datanya.

5. Menaikan honor enumerator dan menambah frekuensi perjalanan ke lokasi Penggilingan agar data yang diambil dipenggilingan benar-benar akurat.

c. Pembinaan, Supervisi dan Pendampingan Upsus Pajale

Untuk menjamin tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi perlu adanya jaminan produksi pangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan adalah melalui Luas Tambah Tanam (LTT) Program Upaya Khusus (UPSUS). Program UPSUS swasembada pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 2019. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, tebu, cabai dan bawang merah sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada pangan.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian Republik Indonesia No 222/KPTS/OT.050/M/3/2019 tentang upaya khusus peningkatan produksi jagung dan kedelai, Pusat Ketersediaan Pangan menjadi penanggung jawab program UPSUS di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain :

1. Melakukan rapat Koordinasi dengan stakeholder yang terlibat dalam upsus seperti TNI, Ditjen Tanaman Pangan Kementan, PJ UPSUS masing-masing Kabupaten, Pertanian dan Peternakan Sulut, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Sulut, Penyuluh dan seluruh Petugas Data Upsus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Monitoring dan evaluasi langsung LTT UPSUS Pajale langsung di daerah sentra Kabupaten Bolmong Raya
3. Memantau perkembangan LTT Upsus Pajale yang direalisasikan
4. Memantau realisasi bantuan benih dan optimalisasi alat mesin pertanian (Alsintan)
5. Mendukung penambahan pemetaan bahan baku sawah.

Hasil Kegiatan Upsus 2019

1. Dengan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terlibat dapat ditetapkan target LTT UPSUS Pajale dan *stakeholder* berusaha secara optimal merealisasikan target LTT tersebut sehingga menjadi SP BPS.
2. Memberi penghargaan/apresiasi kepada kabupaten/kota yang meningkat secara signifikan
3. Penambahan lahan baku sawah yang di petakan sebesar 643 Ha di Sulawesi Utara.

Kesimpulan

1. PJ Kabupaten bersama Petugas Data Kabupaten mengawal dan memperjuangkan data Upsus agar menjadi data SP BPS 2019 cukup baik.
2. Capaian LTT Pajale di Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup bagus, namun masih perlu di tingkatkan, utamanya untuk komoditas Jagung dan Kedelai.
3. Selain upaya khusus melalui LTT Pajale, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan juga memiliki tanggungjawab untuk memantau optimalisasi alat dan mesin pertanian.
4. Berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini terkait alat dan mesin: (1) bantuan seringkali tidak sesuai SPEK dan LOKASI, (2) kurang tenaga operator alat dan mesin dan pengetahuan rendah, (3) alat dan mesin banyak yang rusak dan bengkel terbatas, (4) medan bergelombang dan bergunung serta hamparan kecil.

Solusi yang telah dan sedang dilakukan saat ini dianyaranya: (1) penempatan alat dan mesin sesuai keadaan lokasi dan kebutuhan bagi petani, (2) pelatihan bagi tenaga operator melalui pemagangan ke perusahaan penyedia alat dan mesin atau mengoptimalkan UPJA di daerah, (3) menyediakan bengkel alat dan mesin terutama di sentra produksi, dan (4) realokasi alat dan mesin yang tidak sesuai dengan lokasi dan kebutuhan.

d. Monitoring Stok di Penggilingan

Penggilingan padi merupakan bagian dari rantai pasok beras nasional dan memiliki kontribusi penting dalam penyediaan stok gabah dan beras dari segi kuantitas dan kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penggilingan padi memiliki peranan penting antara lain: (1) menyediakan stok beras sebagai cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; (2) sebagai titik sentral pengolahan atau perubahan bentuk gabah menjadi beras; (3) menentukan jenis kuantitas dan kualitas beras; (4) menentukan tingkat harga gabah dan beras; dan (5) membuka peluang lapangan pekerjaan di wilayah sekitar.

Berdasarkan hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2012, jumlah penggilingan yang ada di Indonesia sebanyak 182.198 unit, terdiri dari 169.043 unit (92,78%) kapasitas kecil, 8.628 unit (4,74%) kapasitas sedang, 2.075 unit (1,14%) kapasitas besar, dan 2.452 unit (1,35%) tidak tercatat golongan kapasitasnya.

Berdasarkan survei Kajian Cadangan Beras tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian pada tiga waktu pengamatan yaitu 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September 2015, berdasarkan musim kemarau, panen, dan musim gadu diperoleh informasi besaran stok gabah dan beras yang ada di penggilingan. Total stok gabah di masing-masing musim sebanyak 0,36 juta ton, 1,34 juta ton, dan 0,6 juta ton. Total stok beras di penggilingan masing-masing sebanyak 0,56

juta ton, 1,27 juta ton dan 0,73 juta ton. Total stok beras tersebut mencakup gabah yang dikonversi ke beras, beras pecah kulit, menir, serta tepung beras/ketan.

Hasil kajian ini menjadi bahan Informasi bagi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melakukan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan setiap mingguan. Kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan telah berjalan sejak tahun 2015, dengan sampel 1.000 penggilingan tersebar di 64 kabupaten pada 22 provinsi. Kegiatan ini melibatkan 22 koordinator provinsi dan 100 enumerator kabupaten yang setiap minggu melaporkan data stok gabah dan beras ke pusat untuk diolah menjadi angka stok beras nasional.

Hasil pengumpulan data stok gabah dan beras di penggilingan yang dilakukan dari Januari – Desember 2019 diperoleh rata-rata persentase data yang masuk dari seluruh penggilingan sebesar 94,7%. Persentase tertinggi data yang masuk pada bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober 2019 sebesar 100% dan terendah pada bulan Desember 2019 sebesar 78,6%.

Hasil monitoring stok gabah dan beras di penggilingan pada bulan Januari – Desember 2019 diperoleh data sebagai berikut :

- Data stok setara beras di pengilingan tertinggi pada bulan April 2019 sebesar 1.601.413 ton, dan stok terendah bulan Januari 2019 sebesar 1.111.705 ton.;
- Berdasarkan kapasitas penggilingan, keragaan ketersediaan stok gabah dan beras dapat diterangkan sebagai berikut :
  - Pada penggilingan dengan kapasitas besar stok setara beras tertinggi terjadi pada bulan Februari 2019 sebanyak 430.708 ton, sedangkan stok terendah pada bulan Januari 2019 sebesar 103.011 ton;
  - Pada penggilingan dengan kapasitas sedang stok setara beras tertinggi pada bulan Mei 2019 sebesar 209.061 ton dan stok terendah pada bulan Oktober 2019 sebesar 83.768 ton;
  - Pada penggilingan dengan kapasitas kecil, stok setara beras tertinggi pada bulan April sebesar 1.236.468 ton dan stok terendah pada bulan Januari sebesar 862.223 ton.

e. Monitoring Stok di Pedagang

Dalam rangka melengkapi data stok beras di masyarakat, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2019 memperluas monitoring stok beras ke tingkat pedagang. Beradasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS Tahun 2016, terdapat jumlah pedagang beras di Indonesia sebanyak 21.218 pedagang, terdiri dari 13.961 pedagang mikro (65,8%), 5.010 pedagang kecil (23,61%), 2.152 pedagang menengah (10,14%), dan 95 pedagang besar (0,45%), yang tersebar di 343 kabupaten/kota.

Kegiatan Monitoring stok beras di pedagang dilakukan pada 640 sampel pedagang tersebar di 57 kabupaten pada 18 provinsi di Indonesia, bertujuan untuk mengetahui jumlah stok beras nasional yang ada di pedagang setiap mingguan.

Pengumpulan data stok beras di pedagang dilakukan mulai bulan April – Desember 2019. Berdasarkan persentase data yang masuk dari seluruh pedagang rata-rata setiap bulan sebesar 96,5%. Persentase data yang masuk tertinggi pada bulan April 2019 sebesar 99,4%, dan terendah pada bulan Desember 2019 sebesar 88,9%.

Hasil monitoring stok beras di pedagang pada bulan Maret – Desember 2019, dijelaskan bahwa data stok beras di pedagang tertinggi pada bulan Mei 2019 sebesar 1.320.547 ton, dan stok terendah pada bulan Juli 2019 sebesar 1.106.617 ton;

Berdasarkan skala usaha pedagang, stok beras dapat diterangkan sebagai berikut:

- Pedagang dengan skala besar, stok beras tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019 sebanyak 1.195.488 ton, sedangkan stok terendah pada bulan Juli 2019 sebesar 796.452 ton.;

- Pedagang dengan skala menengah, stok beras tertinggi pada bulan Agustus 2019 sebesar 340.877 ton dan stok terendah pada bulan Mei 2019 sebesar 92.450 ton;
- Pedagang dengan skala kecil, stok beras tertinggi pada bulan Oktober 2019 dimana stok beras sebesar 25.376 ton dan stok terendah pada bulan Agustus 2019 sebesar 15.934 ton;
- Pedagang dengan skala mikro, stok beras tertinggi pada bulan Juni 2019 dimana stok beras sebesar 21.336 ton dan stok terendah pada bulan Oktober 2019 sebesar 11.131 ton.
- Informasi tambahan dari pelaporan monitoring stok beras di pedagang adalah persentase stok beras medium di pedagang rata-rata 20%, sedangkan persentase beras premium rata-rata 80%. Persentase stok beras premium jauh lebih besar dibandingkan dengan stok beras medium di setiap bulannya.

f. Analisis Akses Pangan

1. Indeks Akses Pangan

Keterjangkauan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketahanan pangan. Stok pangan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara karena gejolak politik, sosial, ekonomi maupun bencana alam yang mengakibatkan terhambatnya bahkan terhentinya pasokan pangan.

Untuk mengetahui pangan yang tersedia mampu dikonsumsi oleh masyarakat maka diperlukan suatu pengukuran indek keterjangkauan pangan. Tujuan kegiatan Indeks Akses Pangan adalah mengetahui tingkat keterjangkauan pangan nasional secara fisik dan ekonomi.

Indeks Keterjangkauan adalah ukuran capaian untuk mengetahui tingkat keterjangkauan pangan masyarakat yang dilihat dari aspek fisik dan ekonomi. Keterjangkauan pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menjamin rumah tangga atau penduduk dalam mengakses pangan yang cukup baik secara fisik maupun ekonomi, melalui saluran distribusi yang baik, pemasaran, perdagangan, pasokan dan harga pangan pokok yang stabil, serta bantuan pangan.

Indikator keterjangkauan dalam pengukuran kecukupan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan. Akses pangan dikatakan baik apabila semua rumah tangga atau semua anggota rumah tangga mempunyai sumberdaya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup baik dari segi kuantitatif, kualitatif dan keragaman pangan.

Indikator yang berpengaruh pada keterjangkauan pangan, antara lain : 1) Daya beli rumah tangga terhadap pangan, menyangkut variabel pendapatan dan harga pangan, 2) Produksi pangan mencerminkan aspek ketersediaan pangan, 3) Infrastruktur terkait dengan distribusi pangan, dan 4) Perilaku konsumsi pangan.

Dalam pengukuran indeks keterjangkuan pangan secara fisik dan ekonomi ini menggunakan 2 (dua) indikator, yakni produksi pangan yang mencerminkan ketersediaan pangan sebagai aspek fisik. Sedangkan daya beli rumah tangga berkaitan dengan variabel distribusi pengeluaran untuk pangan.

Data yang digunakan untuk mengitung Indeks Keterjangkuan Pangan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data produksi padi BPS tahun 2019 diolah datanya oleh Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan data Pangsa Pengeluaran Pangan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019.

Hasil perhitungan Indeks Keterjangkauan Pangan Secara Fisik dan Ekonomi, sebagai berikut :

1. Variabel produksi/ketersediaan Pangan (beras) terhadap kebutuhan di peroleh rasio sebesar 1,06, masuk dalam kategori skala 3 berarti surplus, dimana rasio ketersediaan terhadap kebutuhan >1.
2. Variabel pangsa pengeluaran Pangan diperoleh hasil sebesar 49,14 masuk pada kategori skala 3 yakni baik, dimana <50 dari total pengeluaran pangan.
3. Penentuan Indeks Keterjangkauan Pangan menggunakan metode *croostabulasi* dimana dari 2 variabel disandingkan dalam satu tabel

sehingga diperoleh indeks komposit 3 dan 3 berada pada indeks 6, yakni berada di wilayah warna hijau yang berarti kondisi akses Pangan secara fisik dan ekonomi dapat dikategorikan baik.

4. Faktor yang mempengaruhi baiknya keterjangkauan Pangan disebabkan kondisi ketersediaan pangan yang cukup yang diindikasikan dari surplus produksi beras didalam negeri sehingga memberikan dampak terhadap harga Pangan (beras) didalam negeri relatif stabil dan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau.

Saran:

1. Perlu dilakukan perbaikan metodologi pengukuran Indeks Keterjangkauan Pangan Secara Fisik dan Ekonomi sehingga dapat diketahui Indeks Keterjangkauan Pangan per wilayah (Provinsi dan Kabupaten)
2. Variabel yang digunakan sebaiknya lebih dari satu dari setiap Indikator dan setiap variabel didukung dengan ketersediaan datanya.

2. Kajian Kebijakan Program Rastra dan BPNT

Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Sesuai arahan Presiden RI tentang bantuan sosial dan keuangan inklusif, maka sejak tahun 2017 Rastra yang merupakan kebijakan subsidi sebagian ditransformasi menjadi pola bantuan melalui Program BPNT. Program Bantuan Pangan BPNT dinilai potensial menurunkan angka kemiskinan karena melibatkan stakeholder dan dukungan inovasi berbasis teknologi informasi sehingga penerima manfaat tepat sasaran, proses lebih cepat, tepat waktu dan efesien.

Namun dalam pelaksanaan Program BPNT masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-waroeng di semua wilayah.

Kajian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji karakteristik pelaksanaan Rastra-BPNT; (2) mengkaji implikasi Rastra-BPNT terhadap Serapan Gabah/Beras di Lokasi Kajian dan nasional; (3) mengkaji implikasi Rastra-BPNT terhadap kemiskinan, inflasi, dan kesejahteraan petani; (4) mengkaji perspektif Rastra-BPNT kedepan; (5) merumuskan saran rekomendasi kebijakan.

Kajian dilaksanakan pada bulan Juni s.d September 2019 dengan menggunakan data sekunder di 33 provinsi dan uji petik di 2 lokasi pelaksana Rastra-BPNT (Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis). Berdasarkan hasil kajian ada beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Bulog perlu diberikan peran khusus dalam program BPNT demi kesinambungan program pengadaan gabah/beras dalan negeri sekaligus menjaga ketahanan pangan. Oleh sebab itu Program SERGAP harus

lebih ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan beras program BPNT dan sekaligus sebagai instrument stabilisasi dan menjaga harga gabah di tingkat petani.

2. Perlu ditetapkan standarisasi spesifikasi komoditi beras yang digunakan dalam program Rastra-BPNT untuk memudahkan dalam menyiapkan, menyalurkan dan mengawasi pelaksanaannya. Oleh sebab itu, peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) harus bersinergi dengan Bulog dan Dinas Sosial untuk memastikan kualitas dan keamanan beras yang akan didistribusikan kepada ewaroeng.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pangan melalui program BPNT, maka: a) Penggilingan Padi diberikan kemudahan dalam menjadi Mitra Bulog untuk menyalurkan beras kepada outlet/e-waroeng; dan b) outlet Rumah Pangan Kita (RPK), Toko Tani Indonesia (TTI), dan outelet lain perlu di dorong dan difasilitasi mesin EDC untuk menjadi salah satu e-waroeng yang bekerjasama dengan Bank Himbara.
4. Untuk mempertahankan eksistensi Bulog sebagai penyangga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, serta mempertahankan kualitas beras Bulog, maka proses penyediaan beras dalam program BPNT harus melalui mekanisme “In-out circulation”, artinya setiap beras dari Gudang yang keluar untuk program BPNT harus di iringi dengan pengadaan hasil penyerapan dari petani.
5. Mengingat sentra produksi beras/padi tidak menyebar secara merata, maka khusus untuk wilayah-wilayah non-sentra Padi, sebaiknya Progam Rastra tetap dipertahankan, sementara BPNT lebih difokuskan ke wilayah-wilayah sentra padi dan wilayah perkotaan. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk wilayah-wilayah yang jaringan internet belum cukup memadai, maka Rastra bisa dipertahankan sampai ketersediaan infrastruktur terpenuhi.

g. Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU)

Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) merupakan kegiatan usahatani dari hulu dan hilir yang dijalankan secara terintegrasi pada satu atau lebih tahapan pengolahan untuk menghasilkan produk pangan dan non pangan dan diharapkan menjadi lembaga usaha yang berbadan hukum. PKU pada tahun 2019 dilaksanakan di 12 provinsi, pada 13 kabupaten, 13 desa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan. Kegiatan PKU dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan penerapan teknologi. Diharapkan kegiatan PKU ini dapat membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan serta memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah rentan rawan pangan melalui pemberian bantuan pemerintah sebagai *trigger*. Justifikasi penentuan lokasi adalah lokasi di

daerah rentan rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya pangan untuk pengembangan usaha berdasarkan data FSVA Nasional 2018 prioritas 3, 4 dan 5, dan/atau Rumah Tangga Miskin-Petani (RTM-P) dan/atau stunting. Setiap 1 PKU terdiri 1 desa, dimana 1 PKU tersebut terdiri dari 1 gapoktan, 5 kelompok tani.

Dalam komponen anggaran PKU terdapat Bantuan Pemerintah (Banper), dimana setiap PKU mendapat dana Banper sebesar Rp. 250.000.000,- untuk budidaya 5 kelompok tani, dan Rp100.000.000,- untuk gapoktan. Total anggaran Banper yang dibarikan untuk satu lokasi PKU tersebut adalah Rp. 350.000.000,- yang bersumber dari APBN. Dana banper budidaya dimanfaatkan oleh kelompok tani sesuai dengan RUK yang diajukan. Pemanfaatan dana dipergunakan untuk usaha budidaya dengan pilihan komoditas tanaman pangan (kecuali padi), hortikultura, ternak (unggas/domba/kambing), dengan jumlah 2-3 jenis komoditas dan dapat dimanfaatkan maksimal 20 persen dari dana Banper untuk biaya kerja (HOK)/pembuatan kandang/olah tanah. Sedangkan dana untuk gapoktan berupa bantuan alat pengolahan hasil dan perbaikan mutu produk dan pemasaran hasil kelompok tani yang pengadaannya dilakukan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Untuk melaksanakan kegiatan PKU tersebut dialokasikan anggaran dekonsentrasi di provinsi dan kabupaten untuk pembinaan dan pendampingan sebesar Rp. 6.316.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.071.348.610,- atau 96,13%.

Dana Banper budidaya tersebut terealisasi 100% kepada kelompok tani PKU yang ada di 13 lokasi. Usaha budidaya kelompok tani PKU TA 2019 adalah: sereh wangi 5%, jagung 17%, padi 10%, itik 5%, kambing/domba 33%, nenas 5%, cabe 5%, ayam 5%, sayur 5%, dan babi 5%. Sedangkan dana Banper pengolahan terealisasi 100% kepada gapoktan, dalam bentuk olahan selai nanas, keripik kentang, pisang dan ubi jalar.

a. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU)

Perkembangan kegiatan PKU di 13 lokasi yang sudah dilakukan dari awal pelaksanaan hingga Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. PKU Kab Samosir, Prov Sumut

   Kegiatan PKU tahun 2019 di Kabupaten Kabupaten Samosir berlokasi di desa Partungkonaginjang, Kecamatan Harian dan dilaksanakan oleh 5 Kelompok Tani (Kelompok Tani Pasorba, Kelompok Tani Permata Tani Utama, Kelompok Tani Asiniroha, Kelompok Tani Karya Subur Jaya dan Kelompok Tani Maduma) yang beranggotakan 75 orang. Komoditas yang dikembangkan adalah Kentang dan Ubi Jalar. Adapun komoditas kentang yang diusahakan masing-masing kelompok seluas 0,6 ha dan untuk komoditas ubijalar masing-masing kelompok seluas 1 ha. Sedangkan untuk pengolahan dilaksanakan oleh gapoktan

Baniara dan focus usaha pengolahan pada kripik Kentang dan Kripik Ubijalar.

Perkembanngan PKU Samosir, sampai saat ini untuk budidaya kentang sudah selesai panen dengan produksi 10 ton/ha. Sedangkan untuk komoditas ubijalar diperkirakan produksi 12 ton/ha. Komoditas ubijalar sampai saat ini masih belum panen dan diperkirakan bulan Feb 2020.

Untuk pengadaan alat pengolahan di Gapoktan, sudah dilaksanakan oleh provinsi dan sudah diserahkan ke gapoktan pada tanggal 24 okt 2019. Saat ini sudah dilakukan pelatihan serta penggunaan alat untuk pembuatan kripik kentang dan kripik ubi jalar. Pemasaran kripik masih bersifat terbatas di sekolat lokasi PKU dan untuk pemasaran akan dilakukan kerjasama usaha dan pemasaran dengan UD. Kreasi Lutfi.

2. PKU Kab Tanjung Jabung Barat, Prov Jambi

Kegiatan PKU di Provinsi Jambi berlokasi di Desa Jati Emas, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan komoditas yang diusahakan berupa susu kambing dan DOC (Day Old Chick) ayam buras. Gapoktan Agro Tani terdiri atas 5 kelompok yang masing-masing beranggotakan 20 orang yaitu Kelompok Tani Jaya, Tani Makmur, Sido Mulyo, Maju Jaya dan Suka Maju. Total bantuan yang diberikan berupa 65 ekor kambing dan 250 ekor ayam buras dengan rincian masing-masing kelompok menerima bantuan berupa kambing PE sebanyak 13 ekor dan 50 ekor ayam buras.

Kegiatan yang dkembangkan adalah budidaya ternak dan pengolahan pasca panen. Dari usaha budidaya kambing akan diperoleh hasil berupa susu sebagai produk utama dan pupuk organikan sebagai produk sampingan. Sedangkan dari usaha budidaya ayam akan difokuskan pada penetasan ayam buras berupa DOC yang kesemuanya direncanakan untuk memenuhi permintaan pasar lokal di Provinsi Jambi.

Hasil olahan susu telah dilakukan promosi dan sosialisasi minum susu oleh Wakil Bupati Tanjab Barat. Selain itu juga dilakukan promosi susu kambing etawa pada acara Sosialisasi Bea Cukai Provinsi di kantor Kecamatan Bram Itam.

3. PKU Kab Bengkulu Utara, Prov Bengkulu

Gapoktan Bhakti Bersama sebagai pelaksana PKU berlokasi di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, komoditas yang dikembangkan berupa budidaya tanaman nanas, pisang dan ubi kayu, dengan hasil olahan selai nanas, kripik pisang, dan kripik singkong. PKU ini memiliki lima Kelompok Tani yang tergabung sebagai anggota Gapoktan Bhakti Bersama, yaitu (1) Kelompok

Tani Tunas Muda; (2) Kelompok Wanita Tani Tunas Jaya; (3) Kelompok Tani Kuripan; (4) Kelompok Wanita Tani Srikandi Mandiri; (5) Kelompok Wanita Tani Lembur Kuring.

Gapoktan yang memiliki anggota 116 orang ini sudah melakukan penanaman nanas seluas 6,115 ha, komoditas pisang seluas 6,55 ha, dan ubi kayu seluas 5,65 ha, berdasarkan RUK yang diusulkan. Gapoktan ini juga sudah menerima seperangkat alat dan mesin pengolahan dari PKU yang saat ini sudah dioperasionalkan, sehingga menghasilkan produk olahan yang memiiki nilai tambah.

Kegiatan PKU mulai efektif pada bulan April 2019, yaitu di awali dengan persiapan lahan, pembelian bibit, pemupukan awal, hingga 100 persen tertanam pada akhir Juni 2019, sehingga secara bertahap akan panen untuk masing-masing komoditas pisang, nanas, dan ubi kayu sekitar bulan Maret 2020. Gapoktan sudah mengikuti pelatihan pengolahan oleh BPTP Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan 12 September 2019 di Desa Tanah Tinggi, sehingga usaha gapoktan ini sudah memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan, yang dibuat melalui mekanisasi bantuan PKU.

4. PKU Kab Lampung Selatan, Prov Lampung

Kegiatan PKU Lampung berlokasi di Desa Marga Catur Kecamatan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Gapoktan Gapoktan Marga Jaya merupakan pelaksana PKU dengan 5 anggota kelompok yaitu Kelompok Margo Mulyo, Berkah Tani, karya Tani, Sinar Usaha dan Sukses Bersama. Komoditas yang diusahakan kelompok meliputi cabe, jagung dan ubikayu. Hasil pengolahan di Gapoktan berupa bon cabe, cabe ulek, tortilla jagung, marning dan emping jagung serta kripik singkong. Kelompok Karya Tani dan Usaha Tani yang melakukan budidaya jagung dengan luas tanam @ 5 Ha, sudah panen seluruhnya pada bulan Juli-Agustus sejumlah 65 ton, dimana sejumlah 57 ton dijual segar dengan harga Rp.3.000,-. Sedangkan untuk kelompok Sukses Bersama yang membudidayakan tanaman ubi kayu seluas 5 Ha, secara bertahap dari luasan tersebut dari bulan September-Oktober 2019 telah panen sejumlah 2,334 ton dengan harga jual Rp.1500,- /Kg.

Untuk tanaman cabe merah yang dibudidayakan seluas 3 ha sudah dilakukan panen secara bertahap dari bulan September-Oktober 2019 sebanyak 1,082 ton dengan harga bervariasi dari harga Rp 50.000-Rp13.000/Kg. Untuk pengolahan bahan pangan yang diolah untuk komoditas jagung sebanyak 313 Kg diolah menjadi marning dengan harga jual Rp30.000,-/Kg, sedangkan sebanyak 25 Kg menjadi Tortilla dengan harga Rp50.000/Kg. Untuk cabe merah sebanyak 15 Kg menjadi cabe uleg dengan harga Rp 100.000/Kg. Sedangkan untuk ubi kayu menjadi keripik singkong sebanyak 229 Kg dengan harga Rp20.000/Kg.

5. PKU Kab Pandeglang, Provinsi Banten

Gapoktan Curungbarang Indah sebagai pelaksana PKU Provinsi Banten berlokasi di desa Curugbarang, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang, dengan kelompoktani sebanyak 5 kelompok yaitu Kelompok Subur Makmur I, Kelompok Subur Makmur II, Kelompok Barokah Tani, Kelompok Bina Tani dan Kelompok Margaluyu. PKU Banten mengembangkan 2 komoditas tanaman budidaya berupa tanaman cabe merah dan ubi jalar ungu, yang nantinya akan diolah menjadi abon cabe, cabe kering, tepung ubi dan aneka olahan tepung ubi seperti cake ubi ungu dan brownis ubi ungu. Kelompok Tani Subur Sakmur I, Subur Makmur II telah melaksanakan budidaya cabe merah dengan luas lahan @ 1,5 ha. Untuk luas lahan pertama seluas 1 ha sudah panen seluruhnya pada bulan Agustus hingga Oktober sejumlah @ 2 ton dan dijual dalam bentuk segar dengan kisaran harga Rp 25.000 – 60.000. Sedangkan lahan kedua seluas 2 ha, masih dalam tahap pemeliharaan.

Budidaya tanaman ubijalar ungu diusahakan oleh kelompok Bina Tani, Barokah Tani dan Margaluyu dengan luas lahan yang diusahakan masing-masing 3 ha. Untuk awal penanaman masih-masing kelompok sudah mengusahakan ubijalar ungu dengan lahan seluas masing-masing 1 ha. Panen ubijalar sudah dialkukan secara bertahap dari bulan Juli hingga November 2019 sebanyak 11-13 ton, dengan harga jual segar Rp 3.000. Kondisi pertahanan pada lahan kedua seluas @ 2 ha, saat ini sudah mulai panen secara bertahap.

Untuk kegiatan pengolahan yang dilakukan pada Gapoktan Curugbarang Indah adalah sebagai berikut: komoditas yang diolah adalah ubijalar menjadi kripik ubi dan tepung ubijalar. Pengolahan baru memenuhi pesanan untuk kegiatan pameran atau event2 saja. Komoditas ubi jalar dari hasil panen baru diolah sebanyak 90 Kg diolah menjadi kripik dengan harga jual Rp40.000,-/Kg, sedangkan sebanyak 20 Kg menjadi Tepung ubijalar dengan harga Rp30.000/Kg serta sebanyak 5 kg ubi diolah menjadi sistik ubijalar ungu dengan harga Rp. 40.000,- Untuk komoditas cabe merah belum dilakukan pengolahan karena harga jual segar masih lebih menguntungkan.

6. PKU Kab Garut, Provinsi Jawa Barat

PKU ini berlokasi di desa Cisurupan kecamatan Cisurupan kabupaten Garut melakukan kegiatan usaha kentang dan cabai yang merupakan komoditas yang potensial dikarenakan pasarnya sangat menjanjikan di wilayah Garut ini dengan banyaknya obyek wisata di sekitar Garut serta permintaan kentang dan cabai di pasaran diluar wilayah Garut. Kegiatan PKU yang baru dimulai pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Gapoktan Agro Papandayaan Intan Mandiri yang terdiri dari 5 kelompok

beranggotakan masing-masing 10 – 15 orang yaitu Agro Papandayaan, Mukti Tani, Mekar Rahayu, Karya Tani, dan Artha Mukti III. Kegiatan budidaya kentang dan cabe oleh 5 kelompok dengan luasan masing-masing komoditas sebesar 0,5 hektar. Untuk komoditas kentang dan cabe sudah panen semua dan saat ini proses penanaman tahap ke dua.

Alat pengolahan sudah diserahkan ke Gapoktan, berupa pembuatan kripik kentang dan bon cabe. Pelatihan dan penggunaan alat pengolahan sudah dilaksanakan. Kegiatan temu usaha Gapoktan sudah dilaksanakan dengan hasil berupa penandatanganan MoU pemasaran produk olahan kentang antara Ketua Gapoktan Agro Papandayan Intan dengan pelaku usaha/pedagang kripik kentang. Untuk hasil olahan kripik kentang di pasarkan dengan harga Rp 35.000/kilo sedangkan untuk abon cabe dipasarkan di warung dan pedagang eceran dengan harga Rp 10.000/kilo. Harga komoditi segar sangat tinggi, baik kentang dan cabe, sehingga lebih menguntungkan di jual segar, untuk perizinan PIRT sedang dalam proses sehingga pemasaran masih terbatas.

7. Prov Kab Wonosobo, Prov Jawa Tengah

Kegiatan PKU di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo Desa Jojogan dengan nama Gapoktan Kusuma Jaya, beranggotakan 5 kelompok yaitu Kelompok Tani Sahabat Tani (8 orang anggota), Kelompok Tani Sami Jaya (12 orang anggota), Kelompok Tani Karya mandiri (12 orang anggota), Kelompok Wanita Tani An najah (16 orang anggota) dan Kelompok Wanita Tani Setia Tani (14 orang anggota). Setiap anggota rata-rata memiliki lahan sawah seluas 0,29 ha. Komoditas yang biasa diusahakan oleh kelompok tani adalah kentang, cabai, carica dan kol. Untuk kegiatan PKU, pada kelompok sahabat tani mengusahakan ternak domba yaitu proses penggemukan domba sebanyak 19 ekor, sedangkan pada kelompok tani Sami Jaya dan Karya Mandiri mengusahakan tanaman kentang seluas masing-masing 1 ha serta pada KWT AN Najah dan KWT Setia Jaya memilih tumpangsari komoditas kentang dan carica pada luasan masing-masing komoditas kentang sebesar 0,7 ha dan carica seluas 1 ha. Selanjutnya Gapoktan mengolah kentang menjadi kripik kentang dan carica menjadi sirup carica.

Perkembangan sampai dengan bulan Agustus untuk kegiatan PKU di 5 kelompok sudah panen dan sudah mulai tanam kembali, sedangkan untuk tanam carica baru di mulai pada akhir november hal ini di sebabkan terjadinya kemarau yang berkepanjangan di wilayah wonosobo dan baru terjadi hujan pada bulan November. Untuk tanam carica terjadi keterlambatan penanaman. Untuk budidaya domba masih melakukan penggemukan belum ada yang dijual menunggu pasar yang biasanya pasar pada lebaran haji.

Untuk alat pengolahan sudah dilakukan dengan membuat kripik kentang sedangkan carica sudah dibuat dengan hasil dari anggota

kelompok yang sudah punya tanaman carica. Dari hasil pengolahan belum dapat dipasarkan karena menunggu PIRT yang belum bisa diperoloeh oleh kelompok.

8. PKU Kab Kulonprogo, Prov DI Yogyakarta

Pelaksanaan kegiatan PKU di Provinsi DIY dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo kecamatan samigaluh desa pagerharjo. Dengan nama Gapoktan Tri Manunggal adapun kelompok yang dibawah naungan gapoktan tri manunggal yaitu kelompok Ngudi Mulyo, Mekar tani, sumber rejeki, kerjosembodo, dan sedyo mulyo dengan kegiatan usahanya budidaya caisin dan ternak kambing PE. Jumlah kambing PE setiap kelompok berjumlah 13 ekor sehingga total kambing PE yang diusahakan sebanyak 65 ekor, sedangkan lahan budidaya caisin setiap kelompok 0,2 ha. Kegiatan PKU memberikan solusi bagi permasalahan permodalan kelompok tani, Kegiatan banper ini memberikan bantuan permodalan sebesar Rp 350 juta untuk setiap Gapoktan. PKU Tri Manunggal mengusahakan ternak kambing peranakan etawa (PE) dan sayuran caisim. Total bantuan yang diberikan untuk 5 kelompok berupa 65 ekor kambing peranakan ettawa dan bantuan budidaya caisim seluas 1 Ha. Masing-masing kelompok mendapatkan bantuan 13 ekor kambing dan bantuan budidaya caisim seluas 0,2 Ha. Kambing yang dikelola secara komunal dan dipelihara bersama. Produk akhir yang diprioritaskan adalah susu kambing pasteurisasi dan caisim kemasan. Selain itu, sebagai produk tambahan seperti anak kambing dan kotoran kambing (kompos). Ditargetkan Gapoktan dapat menghasilkan susu pasteurisasi 1.620 liter/bulan, caisim kemasan 3,5 ton/panen dan pupuk kompos 2.000 kg/bulan.

Ternak kambing PE yang sudah memasuki masa produktif sebanyak 20 ekor dengan produktivitas 70 liter susu/minggu. Sementara kambing lainnya belum menghasilkan susu. Harga jual susu kambing segar mencapai Rp 25.000/liter sedangkan susu segar olahan aneka rasa dijual dengan harga Rp 10.000/botol ukuran 330 ml. Sementara produk caisim segar dijual dengan harga Rp 2.000/kg. Untuk meningkatkan keberhasilan PKU Tri Manunggal sudah dirintis kemitraan dengan beberapa pengelola obyek wisata di Desa Pagerharjo dan sekitarnya, sehingga produk olahan susu dapat dipasarkan di lokasi wisata. MoU pun sudah dilakukan antara gapoktan dengan Badan Otorita Borobudur; Mirota Kampus Yogyakarta; dan Desa Wisata Nglinggo.

9. PKU Kab Gianyar, Prov Bali

Kegiatan PKU di Provinsi Bali dilaksanakan di desa Taro kecamatan Tegallalang kabupaten Gianyar. Kegiatan PKU yang baru dimulai pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Gapoktan Tribhuanasari yang

terdiridari 5 kelompok beranggotaka masing-masing 15 orang yaitu Dukuh Sari, Blingsang Sari, Mina Sari, Gunung Mekar dan SatyaKencana.

Kegiatan PKU oleh Gapoktan Tribhuanasari terdiri dari kegiatan budidaya yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok dan kegiatan pengolahan pascapanen yang dilakukan oleh Gapoktan. Adapun komoditas yang diusahakan oleh kelima kelompok tersebut adalah cabai rawit dan kacang tanah. Sedangkan kegiatan pengolahan akan focus pada produk olahan kacang tanah yaitu kacang sangrai, kacang asin dan kacang oven, serta olahan cabai rawit yaitu bubuk cabai.

Potensi luas lahan usahatani yang digunakan untuk kegiatan PKU yaitu budidaya kacang tanah sebesar 3 ha, budidaya cabe rawit 3 ha. Sehingga luas lahan yang diusahakan pada kegiatan PKU sebesar 30 ha. Setiap anggota memiliki lahan rata- rata 0,2 sampai dengan 1 ha, peranggota menggunakan lahannya sebesar 0,2 ha utnuk kegiatan PKU. Progres pelaksanaan kegiatan PKU hingga saat ini, adalah Dana banper Rp 250 juta (@50 juta untuk masing-masing kelompok) telah digunakan untuk membeli input produksi budidaya cabai dan kacang tanah. Untuk kebutuhan biaya lainnya seperti ajir dan tali menggunakan swadaya dari anggota kelompok.

Usaha budidaya cabe sudah panen dan sangat menguntungkan kelompok karena pada panen harga cabe yang mencapai Rp. 80.000/kilo sehingga kelompok menjual hasil cabe segar dan sampai dengan awal Desember masih panen cabe walaupun dengan harga cabai yan tidak lagi melonjat. Untuk Kacang tanah baru panen pada bulan agustus, hasil panen kacang tanah sampai dengan bulan september baru menghasilkan 12.965 kg, untuk 5 (lima) kelompok hasil panen kurang memuaskan dikarenakan pada tanaman kacang tanah terjadi kemarau sehingga banyak yang mati dan adanya binatang kera yang memakan hasil kacang tanah, sehingga hasil panen tidak sesuai dari target yang diinginkan oleh kelompok yaitu sekitar 30.000 kg perkelompok. Untuk kegiatan Pengolahan dan Pemasaran di Gapoktan Tribuanasari sudah dilakukan dengan membuat abon cabe dan kacang oven. Gapoktan Tribuanasari sudah memiliki MoU dengan Swalayan Tiara yang merupakan swalan terbesar di Denpasar.

10. PKU Kab Enrekang, Prov Sulawesi selatan

Gapoktan penerima manfaat kegiatan PKU 2019 di Desa Parinding tersebut adalah Gapoktan Parinding, sedangkan Kelompok Tani penerima bantuan pemerintah adalah 5 (lima) kelompok tani yaitu: (1) Kelompok Tani Tigaruk; (2) Kelompok Tani Buntu Kecu; (3) Kelompok Tani Betteng; (4) Kelompok Tani Bau Parinding 2; dan (5) Kelompok Tani To'Langgogok. Setiap kelompok mendapatkan dana batuan pemerintah untuk budidaya sebanyak Rp50.000.000,00. Kelompok Tani Tigaruk memilih budidaya tomat sebagai usaha produktif PKU. Luas lahan budidaya adalah 1,4 ha

dari potensi lahan yang ada sebanyak 11 ha. Kelompok tani ini memiliki jumlah anggota 20 (dua puluh) orang. Kelompok Tani Buntu Kecu juga memilih komoditas tomat sebagai tanaman budidaya. Luas areal budidaya sama dengan Kelompo Tani Tigaruk yaitu adalah 1,4 ha dari lahan potensial kelompok 9 ha. Jumlah anggota kelompok tani ini adalah 19 orang. Kelompok Tani Betteng, memilih membudidayakan bawang merah. Luas lahan kelompok ini 0,7 ha dari 8 ha. Jumlah anggota kelompok 15 orang. Hamid, ketua Kelompok Betteng sangat senang dengan program PKU ini. Kelompok Tani To'langgogok memilih membudidayakan kambing Jumlah ternak adalah 37 betina dan 3 jantan. Jumlah anggota kelompok adalah 20 orang. Reli ketua Kelompok Tani To'langgogok mengatakan bahwa kelompok yang diketuainya sangat bahagia dengan adanya program PKU. Kelompok tani Bau Parinding 2 memilih budidaya kambing. Jumlah ternak adalah 37 betina dan 3 jantan. Jumlah anggota kelompok adalah 22 orang. Ketua Kelompok Tani Bau Parinding mengucapkan terimkasih atas dipilih kelompoknya sebagai penerima program PKU.

11. PKU Kab Lombok Timur, Prov NTB

PKU di Desa Sembalun dikelola oleh Gapoktan Lendak Kute dengan ketua H Minardi, yang beranggotakan empat kelompok tani dan satu kelompok wanita tani, yaitu Kelompok Tani Tibu Sigara, Kelompok Tani Pelangi, Kelompok Tani Lendang Berkarya, Kelompok Tani Horsela, dan Kelompok Wanita Tani Sejahtera. PKU di Sembalun bergerak dalam budidaya dan pengolahan bawang putih dan kentang, karena bisa berkembang dengan baik dan memiliki prospek menjanjikan.

PKU yang jumlah anggotanya 100 orang ini, selain mengembangkan usaha kentang dan bawang putih, juga sayur mayur lainnya antara lain tomat buah, kol, buncis, brokoli, cabe besar dan wortel. Sebelum ada PKU, masyarakat di Desa Sembalun sudah mengembangkan tanaman bawang putih dan kentang secara swadaya.

Olahan bawang putih berupa black garlic sejak 20 September sampai 15 Desember 2019, telah dilaksanakan 8x pengolahan dengan jumlah total bahan mentah 246 kg, sedangkan olahan kentang menjadi keripik kentang sejak 22 OKtober sampai 15 Desember 2019 telah dilaksanakan 12x pengolahan dengan jumlah total bahan mentah 1.555 kg. Strategi pemasaran black garlic, dan kripik kentang yang dilakukan yaitu: langsung diperkenalkan kepada masyarakat misalnya khasiat black garlic bagi kesehatan; dan langsung menjual black garlic ke konsumen dari rumah ke rumah, instansi pemerintah/swasta, pasar atau melalui kerjasama degan pemasaran yang sudah berjalan. Selanjutnya memasarkan melalui outlet di sembalun seperti kios, toko oleh-oleh, bahkan penjulan secara online melalui media sosial.

12. PKU Kab Lombok Utara, Prov NTB

Salah satu lokasi Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) tahap penumbuhan tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Program PKU di Desa Pendua ini sangat tepat untuk recovery paska gempa bumi di Lombok Utara, karena didukung sumberdaya alam dan tenaga kerja yang memadai, serta pasar yang menjanjikan.

PKU dilaksanakan oleh Gapoktan Serumpun dengan ketua Bapak Mujahidin. Usaha utama adalah budidaya bawang merah, tomat, dan cabai rawit. Gapoktan Serumpun beranggotakan lima kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Horsepen, Kelompok Tani Petani Muda Horsepen, Kelompok Tani Saling Tulung I, Kelompok Tani Baru Mekar I, dan Kelompok Tani Tembang Sinom II. Setiap kelompok tani mendapat dana bantuan pemerintah dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp 50.000.000 yang digunakan untuk budidaya. Komoditas yang ditanam dan diolah adalah cabai rawit, bawang merah, dan tomat dengan luas lahan tanam cabai rawit 4,2 ha, luas lahan tanam bawang merah 5,7 ha dan luas lahan tanam tomat 2,55 ha. Seluruh kelompok tani membudidayakan ketiga komoditas tersebut, untuk komoditas bawang merah semua kelompok tani sudah panen dengan hasil yang cukup menggembirakan yaitu 38.278 kg.

13. Prov Kab Timor Timur Utara, Prov NTT

Pengembangan Korporasi Usaha di Propinsi NTT berada di Timor Tengah Utara tepatnya di Desa Lapeom, di Gapoktan Meo Sapan, masing – masing Kelompok Simpatik mengembangkan komoditas cabe, kacang tanah dan tomat, Kelompok Harapan baru mengembangkan komoditas cabe, kacang tanah dan tomat, Kelompok Daya Karya mengembangkan komoditas cabe, kacang tanah dan tomat demikian juga dengan kelompok Tunas Muda dan Nekmese mengembangkan komoditaa mengembangkan komoditas cabe, kacang tanah dan tomat. Komoditas yang diusahakan ini per November 2019 seluruhnya sudah panen dan mulai diolah antara lain untuk kacang oven, kacang gula, abon cabe dan sambal, serta tomat untuk manisan tomat (torakur).

Pemasaran produk baru sampai dengan lokal kabupaten dipasarkan oleh ibu ibu anggota dan sudah mulai memiliki kemasan yang baik dan branded, untuk memperluas pemasaran di musim panen berikutnya pemasaran akan dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten.

Monitoring dan evaluasi kegiatan PKU juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dengan melihat tiga komponen yang ada di PKU yaitu kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan dukungan lintas sektor. Selain tiga komponen tersebut perlu di evaluasi juga mengenai

kegiatan pendamping, Dinamika kelompok, Peningkatan kesejahteraan, sarana prasarana, dukungan APBD dan kerjasama lintas sektor. Dari hasil evaluasi di 12 provinsi dengan menyebarkan kuesioner ke daerah terlihat bahwa yang mencapai kualitas tinggi dengan skor 75,50 berada di provinsi Jambi, Banten, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Selatan, Bali, dan NTB sedangkan yang mendapatkan skor rendah dengan nilai skor 68,37 berada di Provinsi Jawa Tengah hal ini dikarenakan jaringan pemasaran yang belum ada dan juga keterlambatan penanaman untuk usaha budidaya carica, karena harus menunggu hujan. Gambaran hasil evaluasi di tahap penumbuhan dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 32. Gambaran hasil evaluasi di tahap penumbuhan

No	Provinsi	Aktifitas dan Peran pendamping Budidaya		Aktifitas dan Peran pendamping Pengolahan		Kelompok/ Gapoktan		Pembukuan dan Administrasi (Gapoktan dan kelompok)		Pengembangan Usaha		Jaringan Pasar		Pengemb Kap kelompok		Nilai Akhir	Kualitas Akhir
1	PKU Sumatera Utara	85,83	KT	74,17	KS	74,17	KS	75,71	KT	77,5	KT	67,5	KS	58,75	KS	75,33	KT
2	PKU Jambi	85	KT	75,83	KT	72,22	KS	75	KS	86,07	KT	70	KS	67,5	KS	78,63	KT
3	PKU Bengkulu	74,17	KS	72,5	KS	73,33	KS	85	KT	75,71	KT	85	KT	51,25	KS	74,44	KS
4	PKU Lampung	80,83	KT	76,39	KT	58,89	KS	81,9	KT	74,29	KS	60,83	KS	48,33	KS	71,67	KS
5	PKU Banten	95	KT	95	KT	75	KS	78,57	KT	88,57	KT	50	KS	76,25	KT	84,11	KT
6	PKU Jawa Barat	95	KT	85	KT	80	KT	88,57	KT	89,88	KT	100	KT	81,25	KT	88,07	KT
7	PKU Jawa Tengah	80	KT	80	KT	95	KT	90	KT	39,05	KR	40	KR	72,5	KS	68,37	KS
8	PKU DIY	89,17	KT	87,5	KT	76,67	KT	93,57	KT	85,36	KT	87,5	KT	68,33	KS	84,85	KT
9	PKU Sulsel	95	KT	89,17	KT	86,67	KT	91,67	KT	90,36	KT	64,17	KS	62,92	KS	86,93	KT
10	PKU Bali	90	KT	85	KT	72,5	KS	88,57	KT	89,29	KT	100	KT	85	KT	86,56	KT
11	PKU NTB – Lotim	95	KT	94,17	KT	66,67	KS	78,57	KT	80	KT	50	KS	66,25	KS	79,33	KT
12	PKU NTB – KLU	90	KT	90	KT	73,89	KS	83,57	KT	84,4	KT	100	KT	65	KS	83,33	KT
13	PKU NTT	90	KT	80	KT	57,5	KS	67,86	KS	80,71	KT	40	KR	47,5	KS	72	KS
	Nasional	88,08	KT	83,44	KT	74,04	KS	82,97	KT	80,09	KT	70,38	KS	65,45	KS	79,51	KT

Sedangkan untuk nilai kualitas PKU tahun 2019 hampir 69 persen sudah memasuki kualitas tinggi sedangkan yang mencapai kualitas rendah berada di kisaran 31 persen, sehingga untuk kegiatan PKU dengan melihat 3 (tiga) aspek yaitu kelembagaan, pemberdayaan dan teknologi dapat dikatakan sudah berhasil. Gambaran kegiatan PKU dari hasil kuesioner dapat dilihat di bawah ini.

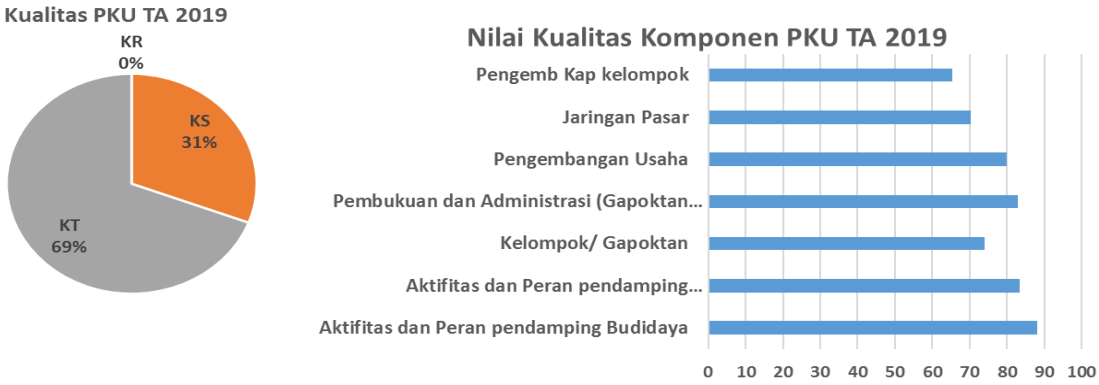

Ket : *) Kategori Rendah (KR) : ≤ 40;
*) Kategori Sedang (KS) : 40 – 75 ; *) Kategori Tinggi (KT) : ≥ 75

Gambar 11. Gambaran kegiatan PKU dari hasil kuesioner

h. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Penyusunan Angka Rawan Pangan (PoU)

Dalam rangka mendeteksi secara dini situasi pangan dan gizi suatu wilayah diperlukan monitoring secara rutin melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG merupakan *instrument*/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara teratur dan terus menerus yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan rekomendasi ketahanan pangan dan gizi.

Selain itu, untuk mengetahui Prevalensi Kekurangan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU), maka dilakukan penyusunan Angka Rawan Pangan melalui pendekatan PoU. Prevalensi Kekurangan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) yaitu proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/minimum dietary energy requirement (MDER) yang diukur dengan satuan kilo kalori per hari (kkal/hari). MDER adalah kebutuhan minimum kalori yang diperlukan seseorang sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya. PoU termasuk dalam salah satu indikator pengukuran Goals 2 pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Penyusunan Angka Rawan Pangan/PoU sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.153.189.154,- atau 92,26%.

Kegiatan SKPG ini terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Analisis bulanan untuk aspek ketersediaan pangan menggunakan data luas tanam dan puso komoditas pangan utama sumber karbohidrat pada tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir. Untuk aspek akses pangan,

data yang dikumpulkan yaitu data komoditas harga pangan utama dan strategis pada bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut selama tiga bulan terakhir. Aspek pemanfaatan pangan digunakan pendekatan melalui data status gizi balita pada bulan berjalan. Sedangkan untuk analisis tahunan merupakan akumulasi analisis bulanan yang menguraikan aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Prevalensi Kekurangan Konsumsi Pangan/PoU digambarkan dengan menghitung persentase populasi yang mengkonsumsi makanan dengan menghasilkan energi yang kurang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan standar minimum yang digunakan sesuai kebutuhan individu menurut jenis kelamin dan umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu sehingga dapat sehat, aktif dan produktif.

i. Serap Gabah Petani (Sergap) dan Mendukung Kegiatan Prioritas

Tujuan dari kegiatan ini adalah : (a) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, supervisi kegiatan sergap dan prioritas nasional dan (b) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sergap dan prioritas nasional.

Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen secara kontinyu serta koordinasi dengan pihak terkait perlu dilakukan sebagai upaya menjaga dan mengendalikan gejolak pasokan dan harga pangan di masyarakat. Cadangan beras pemerintah memiliki peran dalam penyediaan pangan untuk stabilisasi harga beras serta penanganan kondisi darurat, seperti saat terjadi bencana alam dan konflik sosial, serta kerawanan pangan. Pemerintah dalam hal ini menugaskan Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Sejalan dengan tugas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi padi dan penguatan cadangan pagan, maka Kementerian Pertanian juga mendorong pengadaan beras dan gabah produksi dalam negeri oleh Perum Bulog melalui kegiatan serap gabah petani. Kegiatan Sergap dilaksanakan di 22 provinsi sentra di Indonesia, untuk efektifitas pelaksanaan pemantauan maka masing-masing pusat memiliki tugas dan tanggungjawab, tidak terkecuali Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang membawahi 5 provinsi sentra, meliputi: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung.

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG, selanjutnya dalam pasal 5 Perum BULOG melaksanakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam hal ini adalam Program Rastra, yang pengadaanya sesuai pasal 6 dilakukan dengan

mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

Sebagai upaya penyerapan gabah dari petani tersebut, Kementerian Pertanian bersama-sama K/L terkait membentuk Tim Serap Gabah Petani (Tim Sergap) untuk memenuhi kebutuhan beras BULOG. Tim Sergap dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2016 Nomor 248/Kpts/OT.050/5/2016, kemudian dilanjutkan dengan keputusan Nomor 225/KPTS/OT.050/4/2017 tahun 2017, dan terakhir keputusan Nomor 172/Kpts/OT.050/2/2018 tanggal 26 Februari 2018. Dasar penetapan Tim ini adalah Inpres No 5 Tahun 2015 dan arahan Presiden RI pada pertemuan dengan menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Direktur Utama Perum BULOG tanggal 8 Maret 2016.

Tim Sergap beranggotakan dari K/L terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, TNI, Perum BULOG, dan BRI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tim ini berperan: (1) melakukan perencanaan dan pemantauan panen, harga, dan penyerapan gabah petani; (2) membuat laporan hasil pemantauan panen, harga dan penerapan gabah petani; (3) melakukanpenyusunan kerja sama dengan isntitusi terkait dalam serap gabah/beras petani; dan (4) membuat hasil pelaksanaan kerja sama.

Upaya serapan gabah ini sesungguhnya berfungsi ganda, selain melindungi petani dari harga jatuh, pemerintah dalam hal ini diwakili Perum BULOG berkepentingan dalam penyediaan beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau program Rastra-BPNT.

a. Perkembangan Serapan Gabah Beras Bulog Secara umum

Perum Bulog setidaknya mampu menyerap setara beras sebanyak 2,9 juta ton setiap tahunnya saat Program Rastra masih berjalan secara penuh. Angka ini di luar serapan untuk *Public Service Obligation (PSO)* atau untuk keperluan komersil lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2017 serapan setara beras Bulog berkurang menjadi 2,2 juta ton atau menurun 24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengurangan serapan ini dikarenakan terjadi pengurangan kuota alokasi program jaminan sosial sebagai implikasi dari transformasi program bantuan pangan secara non tunai di 44 kota di Indonesia yang sebagian besar lokasinya berada di Pulau Jawa. Serapan setara beras kembali menurun menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2018 dan tersisa 953 ribu ton pada 2019.

Secara umum, penyerapan gabah/beras oleh Bulog mengalami fluktuasi. Pada periode 2014-2015 serap gabah/beras dibawah kuota penyaluran untuk rastra, namun defisit ini mampu ditutupi oleh *carryover* dari impor. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah serapan sepadan dengan alokasi rastra, namun mengingat awal pada tahun berikutnya stok Bulog sudah menipis maka dalam rangka pemenuhan kuota rastra dilakukan impor

beras sekaligus untuk penyaluran pada tahun 2017, ini yang menyebabkan kuota impor pada tahun tersebut menjadi rendah.

Lebih dari separuh penyaluran beras Bulog di dominasi ke wilayah Jawa Bali (64%), sebagian Sumatera (19,6%), Sulawesi (9,6%), dan disusul Nusa Tenggara, Maluku&Papua, serta Kalimantan yang masing-masing 6,5%, 5,1%, dan 4,2%.

Jika dilihat dari pergerakan angka serapan, maka jelas terlihat bahwa di wilayah Pulau Sumatera dan sebagian Maluku dan Papua masih memiliki kuota rastra cukup tinggi (27% dan 22,7%), sementara di Jawa tinggal 4%, artinya kesiapan infrastruktur di wilayah ini lebih siap dibandingkan dengan wilayah lain.

Tabel 33. Serapan Setara Beras Bulog 2017-2019 untuk program jaminan sosial

(ton setara beras/bulan)

No	Pulau	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Jawa&Bali	1,639,879.92	1,477,150	981,617	15,362
2	Sumatera	501,779.16	449,716	123,671	94,995
3	Kalimantan	107,164.80	107,165	20,402	39,607
4	Sulawesi	244,930	232,830	45,301	63,748
5	Nusa Tenggara	166,396	161,773	25,875	58,164
6	Maluku dan Papua	129,652	129,652	6,753	79,686
Total		2,789,801	2,558,286	1,203,620	351,564
	Jawa&Bali	64.1%	57.7%	81.6%	4.4%
	Sumatera	19.6%	17.6%	10.3%	27.0%
	Kalimantan	4.2%	4.2%	1.7%	11.3%
	Sulawesi	9.6%	9.1%	3.8%	18.1%
	Nusa Tenggara	6.5%	6.3%	2.1%	16.5%
	Maluku dan Papua	5.1%	5.1%	0.6%	22.7%

Sumber: Data Kemensos 2019, diolah BKP

b. Perkembangan Sergap 5 Provinsi Sentra (Jatim, Sumsel, Sulsel, NTB, Lampung)

Pada awal pelaksanaan Sergap (Januari-Februari 2019), Jumlah serapan gabah/beras di Provinsi Jawa Timur mencapai 678 ton, Sulawesi Selatan 240 ton, NTB, 43 ton, Sumsel Babel 86 ton, dan Lampung 248 ton. Angka ini tergolong rendah mengingat pada bulan-bulan tersebut merupakan musim panen di wilayah sentra.

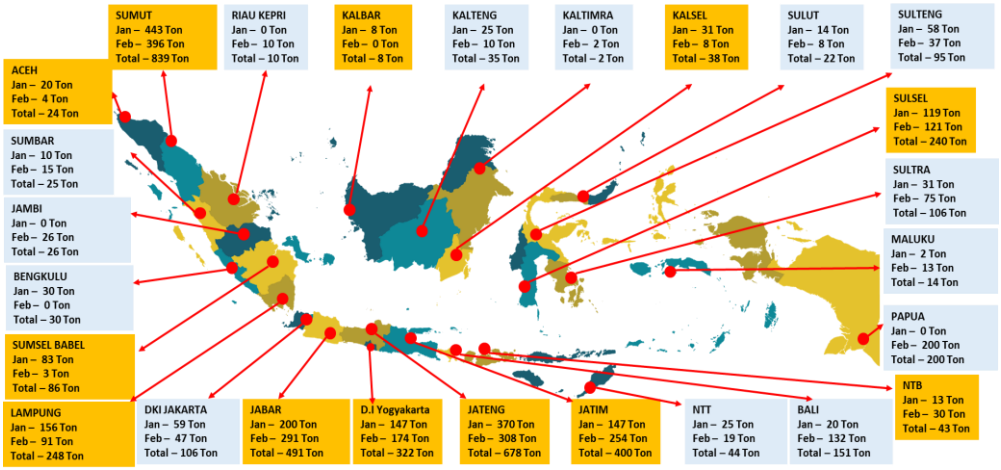

Gambar 12. Perkembangan Serap Gabah Petani (Sergap)

Diawal pelaksanaan kegiatan serapan, hanya Sumatera Selatan dan Lampung yang serapannya cukup tinggi, sementara Jatim, NTB, dan Sulsel masih jauh dari ekspektasi.

Dalam rangka mengoptimalkan serapan gabah/beras di Provinsi Jatim, Sulsel, NTB, Lampung, dan Sumsel maka Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan lakukan rapat koordinasi dan kunjungan ke mitra-mitra untuk memastikan gabah/beras dari petani bisa langsung diserap oleh Bulog dengan syarat dan kualitas yang telah ditentukan.

Tabel 34. Sergap Jan-Feb 2019 Awal

NO	DIVRE	TARGET JAN-FEB (TON)	REALISASI (TON)	PROSENTASE (%)
1	ACEH	11,394	24	0.21
2	SUMUT	6,050	859	14.19
3	SUMSEL	21,263	113	0.53
4	LAMPUNG	30,216	283	0.94
5	JABAR	59,167	540	0.91
6	JATENG	83,151	714	0.86
7	DIY	28,486	334	1.17
8	JATIM	102,077	418	0.41
9	KALBAR	566	8	1.41
10	KALSEL	8,362	39	0.47
11	SULSEL	85,729	459	0.54
12	NTB	41,517	43	0.10
JUMLAH		**477,976**	**3,834**	**0.80**

Hingga akhir Desember 2019, perolehan sergap di 5 provinsi telah mencapai lebih dari 50%. Perolahan sergap tertinggi diperoleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai 239 ribu ton beras, disusul Sulawesi Selatan 214 ribu ton,

kemudian disusul NTB, Sumsel, dan Lampung masing-masing 75 ribu ton, dan 51 ribu.

Tabel 35. Target dan Realisasi Jan-Des 2019 di 5 Provinsi Sentra

No	Prov	Target	Realisasi	%
1	Jawa Timur	351.215	239.079	68.07%
2	NTB	141.654	75.401	53.23%
3	Sulsel	290.920	214.840	73.85%
4	Lampung	102.079	51.345	50.3%
5	Sumsel	70.570	51.585	73.1%
	Indonesia	1.827.475	1.200.588	65.7%

Jika dilihat secara nasional hingga akhir desember 2019, maka dari 5 provinsi yang menjadi lokasi pemantauan, maka 4 diantaranya (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumsel, dan Lampung) menempati 10 besar provinsi dengan penyerapan tertinggi.

Tabel 36. Realisasi 32 Provinsi terbesar, posisi tanggal 30 Desember 2019

No	Kanwil	Target 2019 (Str Beras)		Order	Realisasi hari Ini		Total Realisasi	
		Jan-Des	Jan-Des		str gabah	str beras	str gabah	str beras
1	JATIM	351.215	351.215	244.609	4	2	478.159	**239.079**
2	JABAR	202.429	202.429	228.711	522	261	450.057	**225.029**
3	SULSELBAR	290.920	290.920	220.379	-	-	429.679	**214.840**
4	JATENG	290.398	290.398	130.668	2	1	248.389	**124.194**
5	N.T.B	141.654	141.654	77.129	-	-	150.803	**75.401**
6	SUMSEL & BABEL	70.570	70.570	52.794	524	262	103.170	**51.585**
7	LAMPUNG	102.079	102.079	52.488	2	1	102.691	**51.345**
8	PAPUA & PABAR	48.747	48.747	40.704	91	45	81.291	**40.645**
9	DI. YOGYA	89.376	89.376	34.341	-	-	65.270	**32.635**
10	SUMUT	20.433	20.433	21.989	21	10	42.913	**21.456**
JUMLAH		**1.607.821**	**1.607.821**	**1.103.812**	**1.166**	**583**	**2.152.421**	**1.076.210**

j. Intervensi Rawan Pangan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan intervensi rawan pangan, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan intervensi, dimana diketahui bahwa kondisi alam di Indonesia sering terjadinya bencana rawan pangan. Kondisi rawan pangan dapat dikategorikan sebagai rawan pangan kronis dan rawan pangan transien. Kondisi rawan pangan transien bersifat mendadak dan sementara (kejadian bencana), apabila tidak segera ditangani dengan baik dapat mengarah kepada kondisi rawan pangan kronis. Kondisi kerawanan pangan ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberdayakan masyarakat miskin di daerah rentan rawan pangan, pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pasca bencana alam untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat; memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan di daerah rentan rawan pangan, pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pasca bencana alam untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga. Dengan sasarannya masyarakat miskin di daerah rentan rawan pangan, pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pasca bencana alam berdasarkan usulan dari Kepala dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi meneruskan usulan dari dinas yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.

Pelaksanaan intervensi rawan pangan yang harus dilakukan oleh daerah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dinas yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pangan Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulan bantuan intervensi rawan pangan pasca bencana kepada Kepala Badan Ketahanan pangan atau kepada Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan pangan dengan dilengkapi Calon Penerima manfaat, Lokasi penerima manfaat, rencana kegiatan dan biaya;
2. Setelah mendapat diposisi dari Kepala Badan/Kepala Pusat, maka dilakukan pemantauan ke lokasi terhadap usulan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pangan dan selanjutnya PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat memproses dan menetapkan pihak penyedia.
3. Pihak penyedia yang ditunjuk selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak yang disepakati antara PPK dengan pihak penyedia.
4. Hasil pelaksanaan kegiatan dari Pihak penyedia diserahkan kepada PPK dan selanjutnya PPK menyerahkan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pangan.

Hasil intervensi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 berada di 6 (enam) kegiatan yaitu daerah Sigi, Ponorogo, Konawe, Maluku Tengah, Soralangun dan Merangin. Kegiatan intervensi rawan pangan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 37. Kegiatan intervensi rawan pangan

No	Output	Jadwal Pelaksanaan	Penerima Manfaat	Paket Bantuan	Realisasi
1	Tersalurkannya bantuan intervensi rawan pangan di daerah pasca bencana	Kab.Sigi, Prov.Sulteng (4 April 2019)	Rumahtangga terdampak bencana sebanyak 245 KK	Tanaman : cabe rawit, terung dan tomat buah Ternak : itik	99.981.750
2		Kab. Ponorogo, Prov. Jatim (14 Juni 2019)	Rumahtangga terdampak bencana sebanyak 37 KK	Tanaman : cabe rawit, terung , tomat, jambu Ternak : ikan lele (kolam, pakan,benih)	148.907.900
3		Kabupaten Konawe, Prov. Sultra (7 Nov.2019)	Rumahtangga terdampak bencana sebanyak 283 KK	Itik, ayam, tanaman tomat	198.057.600
4		Kabupaten Ponorogo, Prov. Jatim (14 Nov. 2019)	Rumahtangga terdampak bencana sebanyak 212	Tanaman : cabe kecil Ternak : ikan lele (kolam, pakan,benih)	199.958.400

No	Output	Jadwal Pelaksanaan	Penerima Manfaat	Paket Bantuan	Realisasi
			KK		
5		Kab. Malteng, Provinsi Maluku (22 Nov. 2019)	Rumahtangga terdampak bencana sebanyak 400 KK	Tanaman: cabai, tomat dan terung	199.800.000
6		Kab. Sarolangun, Prov. Jambi (11 Des. 2019)	Rumahtangga terdampak bencana sebanyak 100 KK	Tanaman : cabai, Ternak : Ayam	149.929.000
		Kab. Merangin, Prov. Jambi (11 Des. 2019)	Rumahtangga terdampak bencana sebanyak 23 KK, Suku Anak Dalam		

k. Food Losses dan *Waste*

Food waste sebagai masalah global mendorong berbagai negara melakukan penelitian terkait dengan sampah makanan. Menurut Finn menyatakan bahwa di Amerika Serikat sampah makanan menjadi sampah terbesar ketiga setelah kertas dan sampah jalanan. Hasil penelitian HLPE (2014) menyatakan sebanyak 34% makanan yang disajikan di Arab terbuang sia-sia pada tahap konsumsi. Hal itu dapat meningkatkan ketergantungan pada impor karena sumberdaya alam di wilayah Arab langka (FAO 2015). Di India, hampir 30% buah dan sayuran terbuang karena kurangnya fasilitas penyimpanan (Mukherji dan Pattanayak 2011). Rumah tangga di Inggris membuang 8,3 juta ton makanan dan minuman setiap tahun dengan nilai $18,6 miliar dan bertanggungjawab atas 3% emisi gas rumah kaca. Stenmarck *et al*. (2016) menambahkan pada penelitiannya di Uni Eropa, sebanyak 53% sampah makanan terjadi pada tahap konsumsi.

Permasalahan sampah makanan tidak hanya terjadi di negara maju tetapi juga di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hasil studi yang dilakukan oleh The Economist Intelligent Unit (EIU) bekerja sama dengan BCFN dalam laporannya yang berjudul Food Sustainability Index pada tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memproduksi sampah makanan terbesar kedua setelah Arab Saudi (EIU 2017). Lebih lanjut laporan tersebut menjelaskan bahwa rata-rata setiap orang umumnya menghasilkan sampah makanan sebesar 300 kg per tahun. Hal itu juga didukung oleh data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LHK, komposisi sampah terbesar pada tahun 2017-2018 adalah sampah makanan, yaitu mencapai 93% (SIPSN 2018).

Istilah *food waste* di Indonesia dikenal sebagai sampah makanan, sampah sisa makanan, atau limbah makanan. Sampah makanan memiliki beragam definisi, Parfitt et al. (2010) menyatakan bahwa sampah makanan

adalah makanan yang hilang pada akhir rantai makanan (retail dan konsumsi) yang berhubungan dengan penjual dan konsumen. FAO (2011) memberikan definisi sampah makanan sebagai makanan yang dapat dikonsumsi manusia tetapi tidak dikonsumsi dan dibuang karena alasan-alasan tertentu. Sementara Lipinski et al. (2013) menyebut sampah makanan sebagai makanan yang memiliki kualitas baik, dapat dikonsumsi manusia tetapi karena alasan tertentu tidak dikonsumsi dan dimanfaatkan. Bond et al. (2013) menyebutkan bahwa sampah makanan adalah makanan yang dimakan dan untuk konsumsi manusia tetapi dibuang, hilang, rusak atau dikonsumsi oleh hewan dan tidak termasuk bagian yang dimakan. Dalam rangka mengetahui nilai *Food Losses and Waste,* khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya maka diperlukan kegiatan FGD dan survey ditingkat rumah tangga dan warung/restoran/rumah makan. Selain itu, sebagai upaya untuk mengurangi *Food Losses and Waste* maka dilakukan kampanye di sekolah dasar sebagai upaya peningkatan kesadaran sejak dini.

1. Pelaksanaan Survey

   a. Metode Pelaksanaan Survey Food Waste Rumah Tangga

   - Survey dilakukan pada rumah tangga di Jabodetabek dengan metode purposive sampling. Sampel sebanyak 250 rumah tangga dipilih berdasarkan lokasi tempat tinggalnya yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor.

Tabel 38. Lokasi survey dan jumlah responden

No	Lokasi	Jumlah responden
1	Jakarta Barat	10
2	Jakarta Utara	5
3	Jakarta Pusat	5
4	Jakarta Selatan	65
5	Jakarta Timur	35
6	Tangerang	25
7	Bekasi	20
8	Depok	45
9	Bogor	30
	Total	250

   - Survey dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Enumerator mendatangi responden untuk menjelaskan detail pelaksanaan survey dari mulai pengisian informasi umum rumah tangga sampai dengan pengisian besaran food waste. Survey dilaksanakan selama 4 hari dengan perincian hari sebagaimana tercantum dalam lembar kuesioner.

- Responden dilengkapi dengan satu set kuesioner serta gelas ukur yang digunakan untuk mengukur besaran food waste. Penjelasan kuesioner dilaksanakan dengan mendatangi responden satu per satu atau melalui penjelasan yang diberikan secara berkelompok tergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan. Apabila diperlukan, enumerator juga dapat melakukan monitoring pengisian kuesioner selama survey berlangsung. Pada akhir survey enumerator mengumpulkan kuesioner dari masing-masing responden dan melakukan pengecekan apabila ditemukan data yang masih kurang jelas.
- Hasil survey kemudian dimasukkan ke dalam tabel excel dan dikelompokkan berdasarkan jenis bahan pangan serta hari (*weekend/weekdays*). Data yang besarannya masih berupa ukuran gelas kemudian dikonversi menjadi ukuran gram atau ml berdasarkan tabel konversi bahan pangan yang diperoleh dari Bidang konsumsi pangan. Bahan pangan tersebut juga dikonversi ke dalam bagian yang dapat dimakan.
- Setelah dikonversi ke dalam satuan berat yang sama, kemudian besaran *food waste* dihitung berdasarkan jenis komoditas pangan, pengaruh pendapatan terhadap besaran *food waste*, pengaruh lokasi dan besaran *food waste* dll. sesuai dengan kebutuhan.

b. Metode Pelaksanaan Survey *Food Waste* Restoran

- Lokasi yang dipilih untuk survey food waste restoran/rumah makan adalah wilayah Jakarta Selatan. Untuk itu, surat permintaan sebagai responden survey dikirimkan kepada 72 Restoran/Rumah Makan di wilayah Jakarta Selatan. Namun demikian, dari 72 Restoran/Rumah Makan hanya 34 restoran/rumah makan yang bersedia menjadi responden *survey food waste*.
- Survey dilaksanakan selama 1 hari. Setiap enumerator menemui manajer/pegawai restoran dan menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan survey. Pegawai restoran kemudian mengisikan jumlah sampah makanan baik dari sisa restoran maupun sisa konsumen ke dalam kuesioner.
- Hasil survey kemudian ditabulasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis restoran dan jenis bahan pangan yang terbuang.

c. Kerugian Ekonomi Sebagai Akibat Pembuangan Makanan

- Data survey rumah tangga dikelompokkan berdasarkan jenis bahan pangan dan bentuk (matang/mentah) bahan pangan tersebut. Data tersebut kemudian diolah oleh tim ahli dari IPB untuk mendapatkan besaran potensi kerugian ekonomi akibat food waste rumah tangga.

d. Hasil Survey *Food Waste* Rumah Tangga

- Berdasarkan hasil survey, total food waste rumah tangga sebanyak 113 kg/tahun. Apabila jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang, maka total food waste per orang adalah 28 kg/tahun dengan rincian sebagai berikut: beras 2,7 kg/tahun, sayur 7,3 kg/tahun, buah 5 kg/tahun, ikan dan seafood 1,5 kg/tahun, daging 1,6 kg/tahun, telur 1 kg/tahun, tempe-tahu-oncom 2,8 kg/tahun, susu 1,7 kg/tahun, kacang-kacangan 0,4 kg/tahun, umbi dan jagung 2,4 kg/tahun, dan lain-lain 1,8 kg/tahun. Kelompok bahan pangan beras banyak terbuang dalam bentuk olahan (nasi), sedangkan kelompok buah banyak terbuang dalam bentuk segar/mentah. Adapun kelompok sayur-sayuran sering terbuang dalam bentuk segar maupun matang. Bahan pangan lainnya seperti daging, ikan dan susu lebih banyak terbuang dalam bentuk olahan dibandingkan dengan bahan segar. Bahan pangan yang terbuang dalam keadaan segar biasanya karena rumah tangga membeli terlalu banyak sehingga akhirnya tidak termasak dan terbuang karena sudah kadaluarsa atau busuk.
- Tidak ada perbedaan antara pangan yang terbuang pada saat hari kerja (weekdays) dan akhir pekan (weekends). Hal ini kemungkinan terjadi karena rumah tangga yang lebih banyak di luar rumah banyak membuang pangan pada saat weekend sedangkan rumah tangga yang lebih banyak di rumah membuang pangan pada saat weekdays. Kemungkinan jumlah kedua jenis rumah tangga ini sama sehingga berpengaruh terhadap kesamaan jumlah pangan yang terbuang pada saat hari kerja dan akhir pekan.
- Food waste rumah tangga juga dilaporkan dipengaruhi oleh pendapatan. Berdasarkan hasil survey, semakin tinggi pendapatan semakin sedikit food waste rumah tangga yang dihasilkan setiap hari. Hal ini kemungkinan terkait dengan seringnya rumah tangga dengan pendapatan tinggi untuk makan di luar rumah, sehingga sampah pangan rumah tangga yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga dengan pendapatan dibawahnya. Hal ini juga diperkuat dengan sedikitnya food waste dari rumah tangga yang sering mengakses layanan online untuk memesan makanan.
- Food waste rumah tangga juga dilaporkan berbeda berdasarkan wilayah sampel. Rumah tangga di Jakarta Barat dan Bekasi membuang sampah pangan lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga di wilayah lainnya. Namun, hasil ini bisa juga dipengaruhi oleh jumlah sampel yang diambil. Penyempurnaan desain survey, misal dengan menyamakan jumlah responden di setiap wilayah maupun memilih responden dari semua kelas pendapatan, diharapkan dapat memperbaiki hasil survey yang diperoleh pada saat ini.
- Jenis bahan pangan yang banyak terbuang di setiap wilayah juga berbeda-beda. Responden di Jakarta Barat lebih banyak membuang

buah, sayur dan susu. Di Jakarta Selatan, bahan pangan yang banyak terbuang adalah sayur, buah dan beras. Responden di Jakarta Timur banyak membuang sayur, buah dan tempe. Beras dan umbi-umbian juga banyak dibuang namun dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan ketiga komoditas tersebut. Responden di Jakarta Utara agak sedikit berbeda dengan responden di ketiga wilayah sebelumnya. Di Jakarta Utara responden banyak membuang buah, ikan dan seafood, daging dan sayur. Bahan pangan lain yang terbuang cukup banyak di wilayah ini adalah umbi-umbian, tempe dan beras. Sementara itu, responden di luar Jakarta yakni di Bogor, Bekasi, Tangerang dan Depok juga membuang lebih banyak sayur dan buah dibandingkan kelompok bahan pangan lainnya.

e. Hasil Survey *Food Waste* Restoran

- Hasil survey food waste restoran menunjukkan bahwa total food waste restoran adalah 738,43 ton yang terbagi kedalam food waste sayuran 210,15 kg/tahun, beras sebagai hasil konversi dari nasi yang terbuang sebanyak 205,14 kg/tahun, ayam 125,76 kg/tahun, daging 102,42 kg/tahun, ikan dan seafood 70,01 kg/tahun, buah 17,14 kg/tahun dan tahu tempe 7,80 kg/tahun. Hasil ini sejalan dengan survey food waste rumah tangga bahwa bahan pangan yang banyak terbuang oleh konsumen berupa sayur-sayuran dan beras.
- Besaran food waste bahan makanan juga ditentukan oleh jenis restoran. Pada restoran cepat saji, jenis makanan yang banyak terbuang didominasi oleh beras dan juga ayam. Sementara untuk restoran yang menyajikan makanan barat, bahan makanan yang terbuang sebagian besar adalah sayuran dan daging-dagingan. Sementara di restoran China dan Indonesia, bahan makanan yang terbuang didominasi oleh sayuran dan beras.

f. Kehilangan Secara Ekonomi

- Perhitungan secara ekonomi dilakukan untuk mengetahui tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari pembuangan makanan. Kerugian ekonomi dari 1 kg beras sebagaimana dihitung oleh tim ahli dari IPB dapat dibagi menjadi dua jenis kerugian, yakni kerugian secara langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung dari membuang sebanyak 1 kg beras per tahun adalah sebesar Rp. 11,477.75, yaitu setara dengan rata-rata harga beras. Sementara kerugian tidak langsung dihitung sebesar Rp. 59.213,03/tahun, yang dihitung dari beban pangan yang terbuang tersebut terhadap atmosfir, erosi tanah, kualitas air, penggunaan air, kelangkaan air dan biodiversitas.

g. Kesimpulan dan saran

- Tingginya food loss and waste merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan. Food loss

atau susut hasil panen terjadi dari mulai produksi, panen, penanganan hasil, hingga distribusi/pengangkutan. Semetara food loss umumnya terjadi karena kurangnya perencanaan maupun kebiasan membuang makanan pada saat konsumsi. Food loss dapat dikurangi melalui penggunaan teknologi yang lebih modern dan dapat menjaga keutuhan bahan pangan serta memperpanjang umur simpan, sedangkan food waste dapat dikurangi melalui perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat.

- Besaran food waste rumah tangga secara total adalah 113 kg/tahun. Apabila diaasumsikan bahwa jumlah anggota setiap rumah tangga adalah 4 orang, maka total food waste adalah 28 kg/orang/hari. Jenis bahan pangan yang banyak terbuang adalah sayur dan buah, tahu tempe, oncom dan beras. Masyarakat juga membuang bahan pangan lain, namun dalam jumlah yang relatif lebih kecil dibandingkan ketiga kelompok bahan pangan tersebut. Apabila dikonversikan ke dalam kerugian ekonomi, maka setiap 1 kg beras yang terbuang merugikan ekonomi secara langsung sebesar RP. 11.477,75 dan secara tidak langsung sebesar Rp. 59.213.
- Sejalan dengan gambaran dari food waste rumah tangga, food waste restoran pun didoinasi oleh sayuran dan beras. Namun demikian besaran dari jenis food waste tergantung dari tipe restoran yang mengusahakannya. Restoran cepat saji dan western kebanyakan membuang daging-daginga dan beras, sementara restoran Indonesia dan Chinese lebih banyak membuang sayuran dan beras.
- Kedepan, informasi mengenai food waste rumah tangga perlu diperoleh dari luar Jakarta untuk mengetahui gambaran menyeluruh mengenai food waste rumah tangga di Indonesia.

2. Kampanye

- Food loss and waste terjadi karena adanya kehilangan/susut hasil panen pada saat panen, penanganan pasca panen, pengolahan, penyimpanan maupun distribusi bahan pangan (food loss) dan karena kurangnya perencanaan serta pemborosan makanan oleh konsumen (food waste. Upaya pengurangan food loss/susut hasil panen dilakukan melalui perbaikan teknologi, misalnya penggunaan combine harvester saat pemanenan padi; penggunaan teknologi pengolahan modern untuk mengolah gabah menjadi beras, pengolahan untuk mengurangi susut saat panen raya, maupun penggunaan teknologi penyimpanan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Penggunaan dan perbaikan teknologi tersebut telah terbukti dapat menurunkan susut hasil panen.
- Sementara pemborosan pangan berhubungan dengan perilaku konsumen. Sehingga untuk mengurangi pemborosan pangan, konsumen harus mengubah perencanaan dan kebiasaan mengkonsumsi makanan.

Upaya untuk merubah perilaku konsumen dilakukan melalui kampanye pengurangan food waste. Kampanye yang dilakukan sejak dini kepada anak-anak sekolah dasar diharapkan dapat menanamkan perilaku menghargai makanan, sehingga perilaku tersebut dapat terbawa sampai mereka dewasa.

- Kampanye pengurangan food waste dilaksanakan di 4 lokasi yaitu di SDN Cijahe Curug, Bogor Barat Kota Bogor; SDN Harjasari 01 Caiwi, Kabupaten Bogor ; SD Muhammadiyah 1, Kukusan Kota Depok, dan SDN Bantar Kemang 3, Bogor Timur Kota Bogor. Kampanye pengurangan food waste dilakukan melalui pemutaran video, pemberian materi, games-games seputar pangan beragam dan pengurangan food waste, dan pemberian kit/souvenir dalam rangka pengurangan food waste.
- Kegiatan kampanye di SDN Cijahe Curug diikuti oleh anak-anak kelas 4, 5 dan 6 sebanyak 120 siswa dan 14 orang tenaga pengajar dilaksanakan di lapangan SDN Cijahe Curug, Bogor Barat Kota Bogor.

Gambar 13. Pelaksanaan Kampanye Pengurangan *Food Waste* di SDN Cijahe Curug, Bogor Barat

- Kegiatan kampanye di SDN Harjasari 01 Ciawi, Kabupaten Bogor diikuti oleh anak-anak kelas 3, 4 dan 6 sebanyak 360 siswa dan tenaga pendidik sebanyak 20 orang.

Gambar 14. Pelaksanaan Kampanye Pengurangan *Food Waste* di SDN Harjasari 01 Ciawi

- Kegiatan kampanye di SD Muhammadiyah 1 Kukusan Depok diikuti oleh 183 siswa kelas 4, 5 dan 6 dan 25 orang tenaga pendidik.

Gambar 15. Pelaksanaan Kampanye *Food Waste* di SD Muhammadiyah 1 Kukusan Depok

- Kegiatan kampanye di SDN Bantar Kemang 3, Bogor Barat Kota Bogor diikuti oleh 152 siswa kelas 4, 5 dan 6 dan 25 orang tenaga pendidik.

Gambar 16. Pelaksanaan kampanye *Food Waste* di SDN Bantar Kemang 3, Bogor Barat Kota Bogor.

l. Pertanian Masuk Sekolah (PMS)

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memperkenalkan budidaya pertanian kepada siswa sekolah sebagai bagian dari program Pertanian Keluarga (*family farming*). Hal ini sejalan dengan deklarasi PBB bahwa tahun 2019-2028 sebagai dekade pertanian keluarga (United Nations Decade of Family Farming/UNDFF). Program Pertanian Masuk Sekolah (PMS) dilaksanakan untuk memperkuat pilar 2 dan 4 dari 7 pilar pertanian keluarga, yaitu pilar 2 mendukung kaum muda dan menjamin keberlanjutan generasi pertanian keluarga dan pilar 4 yakni memperkuat organisasi dan kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan.

Kegiatan PMS dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan/pekarangan di sekolah sebagai sarana pembelajaran bagi para siswa dalam usaha budidaya aneka ragam komoditas pertanian. Dengan demikian, melalui kegiatan PMS ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan siswa dalam budidaya pertanian dan manfaatnya, serta sekaligus dapat menarik minat siswa untuk bekerja di sektor pertanian pada masa yang akan datang.

Kegiatan PMS bertujuan untuk: (a) Meningkatkan pengetahuan siswa tentang budidaya pertanian, (b) Menumbuhkan semangat siswa menjadi agripreneur, dan (c) Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan. Sasaran kegiatan PMS yaitu siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA) pada 68 (enam puluh delapan) sekolah di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

PMS adalah kegiatan budidaya pertanian yang dilaksanakan oleh siswa dan guru di lingkungan sekolah di bawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, yang bertujuan: (1) Meningkatkan pengetahuan siswa tentang budidaya pertanian; (2) Menumbuhkan semangat siswa menjadi agripreneur; dan (3) Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan

Komponen kegiatan PMS terdiri dari pembangunan rumah bibit dan pemanfaatan kebun sekolah dan/atau lahan pekarangan sekolah.

Penjabaran komponen kegiatan PMS, sebagai berikut:

- Rumah Bibit adalah sarana yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan yang digunakan untuk penyulaman atau penanaman demplot/lahan budidaya di lingkungan sekolah;
- Demplot atau demontrasi plot sebagai sarana pembelajaran/tempat praktek budidaya pertanian bagi siswa sekolah;
- Pertanaman di lahan / polybag / pot / aquaponik / hidroponik / vertikultur

Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan kegiatan PMS dilaksanakan melalui:

- Sosialisasi dan edukasi, meliputi: pengenalan jenis tanaman, pengenalan cara budidaya beraneka ragam tanaman dan pelatihan agripreneurship.
- Praktik budidaya pertanian: melibatkan siswa SMA/SMK/MA atau sederajat mulai dari penanaman/pembibitan, pemeliharaan hingga panen yang didampingi oleh guru dan pendamping teknis.

Kriteria sekolah pelaksana kegiatan PMS adalah:

- Sekolah berlokasi di Ibukota Provinsi atau di Kabupaten/Kota terdekat dengan Ibukota provinsi.
- Memiliki lahan/kebun sekolah minimal seluas 500 m2.
- Terdapat sumber air untuk budidaya pertanian.
- Diutamakan yang memiliki ekstrakurikuler pertanian.

- Pihak sekolah (guru dan siswa) proaktif dan bersemangat.
- Mempunyai lahan untuk membangun rumah bibit minimal seluas 15 m2.

Pendampingan teknis dilakukan oleh Dinas/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), serta Penyuluh untuk budidaya dan aspek agripreneur dengan melibatkan guru/tenaga pengajar di Sekolah. Ditjen PSP akan memberikan dukungan paket bantuan alat dan mesin pertanian berupa kultivator, pompa, dan hand sprayer.

Anggaran pelaksanaan kegiatan PMS diberikan melalui DIPA dan POK Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019. Pencairan anggaran dilakukan dengan transfer langsung ke masing-masing sekolah pelaksana kegiatan Pertanian Masuk Sekolah. Mata anggaran dalam bentuk Belanja Barang Non Operasional (BB nol) dengan akun 521219. Tiap provinsi menetapkan dua sekolah calon pelaksana Kegiatan PMS. Jumlah alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-masing sekolah sebagai berikut:

- Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp. 100.000.000,- per sekolah
- Provinsi Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara sebesar Rp.75.000.000,- per sekolah.
- Provinsi selain tersebut diatas sebesar Rp. 50.000.000 per sekolah.

1. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PMS

   - Berdasarkan surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor B-493/RC.020/J/11/2019 perihal Usulan Sekolah Calon Pelaksana Kegiatan Pertanian Masuk Sekolah (PMS), Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi melakukan identifikasi, verifikasi dan pengusulan sekolah calon pelaksana kegiatan PMS.

   - Sekolah calon pelaksana kegiatan PMS melakukan perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

   - Penetapan sekolah calon pelaksana kegiatan PMS CPCL oleh PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Sekolah yang telah ditetapkan menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui Kepala Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi, menyampaikan nomor rekening (fotokopi lembar pertama dan terakhir), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pihak sekolah, dan Pakta Integritas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan – Badan Ketahanan Pangan, yang disetujui oleh Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi selaku penanggungjawab provinsi.

   - PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan beserta tim melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan menyetujui dokumen yang telah disampaikan oleh sekolah (RAB, NPWP, Rekening, SPTJM, dan Pakta Integritas).

- PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mentransfer uang ke sekolah pelaksana kegiatan PMS. Sekolah pelaksana kegiatan Pertanian Masuk Sekolah menggunakan dana yang ditransfer sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disetujui PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Badan Ketahanan Pangan.
- Semua pemanfaatan dana oleh sekolah dilaksanakan mulai dari dana diterima sampai dengan tanggal 20 Desember 2019. Setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dengan alat bukti (kuitansi, faktur, pajak, daftar absen) dan dana yang tidak terserap dikembalikan ke kas negara.
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) paling lambat 27 Desember 2019 dari PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ke sekolah pelaksana kegiatan, yang diketahui oleh Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi (dilampirkan fotocopy rekening/tabungan pada halaman uang masuk dan pengambilannya serta foto fisik kegiatan yang diutamakan menggunakan apikasi open camera).
- Sekolah membuat laporan kegiatan PMS ke Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi selaku penanggung jawab provinsi.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- Realisasi anggaran kegiatan Pertanian Masuk Sekolah 99,47%, terdiri dari realisasi dana PMS ke sekolah 100% (untuk 68 sekolah di 34 provinsi) dan dana operasional 97,28%.
- Sosialisasi kegiatan PMS dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019 bertempat di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan dari 34 provinsi. Pada tanggal yang sama dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Sekolah calon pelaksana kegiatan PMS dengan PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan memanfaatkan dana operasional untuk sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah atau instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan PMS.
- Transfer dana kegiatan PMS ke 68 sekolah di 34 provinsi dilakukan pada minggu ke-5 bulan November sampai minggu ke-1 bulan Desember, dengan alokasi Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp. 100.000.000,- per sekolah; Provinsi Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara sebesar Rp.75.000.000,- per sekolah; dan Provinsi selain tersebut diatas sebesar Rp. 50.000.000 per sekolah.

- Setelah dana diterima, sekolah memanfaatkan dana PMS untuk pembangunan rumah bibit, demplot dan pertanaman di lahan/polybag/pot/aquaponik/hidroponik/ vertikultur sesuai dengan RAB yang diusulkan sekolah dan disetujui oleh PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Dalam pelaksanaannya, BPTP melakukan pendampingan teknis budidaya dan edukasi sekolah pelaksana PMS.
- Pembangunan rumah bibit, demplot dan pertanaman mulai dilaksanakan pada minggu I Desember 2019 dan diperkirakan sudah mulai panen pada minggu terakhir bulan Desember 2019.
- Tanaman yang ditanam umumnya adalah sayuran seperti kangkung, cabai rawit, cabai besar, timun, sawi putih, pokcoy, selada, bayam, kembang kol, seledri, terong ungu, tomat, sawi pahit, caisim, serta buah-buahan seperti melon, mangga, jambu kristal, kelengkeng.
- Para siswa dan guru sekolah memberikan respon positif, sangat antusias dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan PMS ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memberikan edukasi serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi siswa dan guru dalam budidaya pertanian dan dalam peningkatan ketahanan pangan di sekolah. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat diperluas ke sekolah-sekolah di kabupaten lainnya.

2. Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan/IKP dan FSVA

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*, FSVA) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.711.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.708.823.663,- atau 99,87%. Pada tahun 2019, dilakukan *updating* FSVA Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Perubahan yang dilakukan berupa *updating* indikator dan metodologi.

a. Penyusunan FSVA Nasional 2019

- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
- FSVA 2019 adalah pemutakhiran dari peta 2018. Pemutakhiran dilakukan pada data yang digunakan sesuai perkembangan kondisi terkini dari setiap indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan bagian dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang

mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota. Sembilan indikator digunakan dalam penyusunan FSVA. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan angka harapan hidup pada saat lahir.

- Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan expert judgement. Wilayah yang dianalisis dalam FSVA 2019 sebanyak 514 kabupaten/kota, terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Analisis komposit dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan.
- Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat ketahanan pangan yang dihitung secara komposit dari 9 indikator. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rentan rawan pangan terbagi atas 3, yaitu Prioritas 1 merupakan wilayah sangat rentan, Prioritas 2 merupakan wilayah rentan, dan Prioritas 3 merupakan wilayah agak rentan. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 merupakan wilayah agak tahan, Prioritas 5 merupakan wilayah tahan, sedangkan Prioritas 6 merupakan wilayah sangat tahan.
- Hasil analisis FSVA tahun 2019 menunjukkan bahwa kabupaten rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 71 kabupaten dari 416 kabupaten (17%) yang terdiri dari 25 kabupaten (6%) Prioritas 1; 19 kabupaten (5%) Prioritas 2; dan 27 kabupaten (6%) Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (delapan belas kabupaten), Papua Barat (lima kabupaten), Maluku dan Sumatera Barat masing-masing satu kabupaten. Karakteristik kabupaten rentan pangan ditandai dengan tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, tingginya prevalensi balita stunting, tingginya penduduk miskin, tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, dan tingginya rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
- Sementara itu, Kota Rentan Pangan Prioritas 1-3 sebanyak 5 Kota dari 98 kota di Indonesia (5%). Pada wilayah perkotaan, terdapat 1 kota (1%) Prioritas 1, yaitu Kota Subulussalam di Aceh; 1 kota (1%) Prioritas 2, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara; serta 3 kota (3%) Prioritas 3, yaitu Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Kota Tual (Maluku). Karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan tingginya prevalensi balita stunting, tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih,

tingginya penduduk miskin, tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, dan rendahnya angka harapan hidup.

- Program pembangunan ketahanan pangan selama satu tahun telah berhasil menurunkan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) dari 88 kab/kota pada tahun 2018 turun menjadi 76 kab/kota (terjadi penurunan sebanyak 12 kabupaten/kota) pada tahun 2019. Secara lebih umum, pembangunan ketahanan yang dilakukan mampu meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 138 kabupaten/kota, yaitu:
  - 11 kabupaten (3%) dan 1 kota (1%) telah berhasil mengalami peningkatan status ketahanan pangan sebanyak dua tingkat atau lebih.
  - 99 kabupaten (24%) dan 27 kota (28%) yang menunjukkan perbaikan satu tingkat
- Fokus lokasi pengentasan kerentanan pangan di wilayah kabupaten diprioritaskan pada:
  - Kabupaten-kabupaten yang terletak di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki daerah Prioritas 1-3 terbesar
  - Kabupaten-kabupaten yang lokasinya jauh dari ibu kota provinsi/daerah perbatasan yang rata-rata memiliki tingkat ketahanan pangan lebih rendah dibandingkan kabupaten lain
  - Kabupaten-kabupaten di Kepulauan dengan tingkat kerentanan pangan tinggi
- Fokus pengentasan kerentanan pangan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada:
  - Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal stabilisasi pasokan dan daya beli masyarakat
  - Kota-kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas ataupun karena buruknya sanitasi.
- Program-program peningkatan ketahanan pangan dan mengentaskan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:
  - Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal
  - Penanganan stunting diantaranya melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; serta penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
  - Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah.

- Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan.
- Peningkatan pendidikan perempuan.

- Program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:
  - Penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif
  - Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
  - Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih
  - Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat
  - Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan.
- Sinergi program pembangunan ketahanan pangan dan gizi dari pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, swasta dan seluruh komponen masyarakat perlu dilakukan konvergen terutama di wilayah rentan rawan pangan agar target pengentasan daerah rentan dapat tercapai sehingga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan dapat terwujud.

b. Penyusunan IKP Nasional 2019

Hasil perhitungan IKP 2019 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (*rangking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah (kabupaten, kota dan provinsi) dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur.

- Lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (90,05), Gianyar (89,76) dan Badung (89,01) di Provinsi Bali; Sukoharjo (87,89) dan Wonogiri (86,55) di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Nduga (10,56), Puncak (12,26), Mamberamo Tengah (16,34), Intan Jaya (16,62) dan Yahukimo (16,99).
- Lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (89,84), Balikpapan (88,74), Jakarta Selatan (88,56), Bukit Tinggi (88,02) dan Jakarta Timur (87,31). Sedangkan Lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (17,40), Gunung Sitoli (37,46), Pagar Alam (41,64), Tual (42,72) dan Lubuk Linggau (51,06).

- Lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (85,15), Di Yogyakarta (83,63), Sulawesi Utara (81,44), Jawa Tengah (78,85) dan Sulawesi Selatan (78,69). Sedangkan Lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (25,13), Papua Barat (30,12), Nusa Tenggara Timur (50,69), Maluku (52,35) dan Kalimantan Barat (55,17).
- IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Sebaran IKP Kabupaten dan Kota berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar di bawah ini.

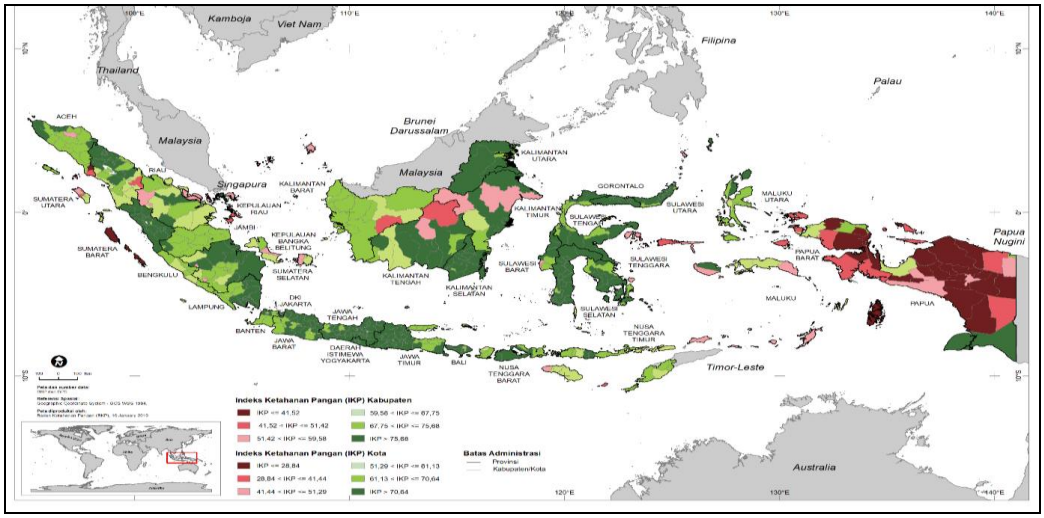

Gambar 17. Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2019

- Sebanyak 71 kabupaten atau 17,1% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 25 kabupaten (6%) masuk kelompok 1, 19 kabupaten (4,6%) masuk kelompok 2 dan 27 kabupaten (6,5%) masuk kelompok 3. Dari 25 kabupaten kelompok 1, sebanyak 18 kabupaten berada di Provinsi Papua, 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat, 1 kabupaten di Provinsi Maluku dan 1 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
- Untuk wilayah kota, terdapat 1 kota (1%) yang masuk kelompok 1 yaitu Kota Subulussalam di Aceh, 1 kota (1%) masuk kelompok 2 yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara, dan 3 kota (3,1%) yang masuk kelompok 3, yaitu Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Kota Tual di Maluku.

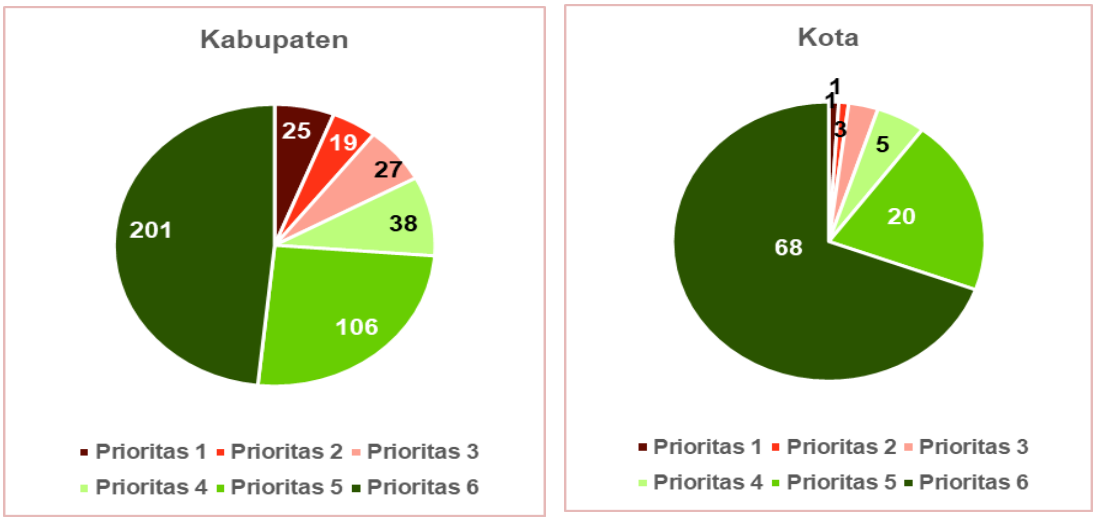

Gambar 18. Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 2019

- Kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan pangan kelompok 1-3 (71 kabupaten) diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya prevalensi balita stunting, dan iii) tingginya penduduk miskin. Rata-rata rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan pangan kelompok 1-3 adalah 4,27. Kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada supply pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.
- Rata-rata persentase balita stunting pada daerah rentan pangan adalah 33,58 persen. Namun demikian, angka tersebut tidak berbeda jauh dengan angka stunting di kabupaten tahan pangan yaitu 33,36. WHO mengklasifikasikan wilayah dengan persentase balita stunting 30-40 persen dikategorikan sebagai wilayah dengan kategori buruk (WHO 2000). Melihat kondisi tersebut, maka penanganan stunting harus menjadi fokus tidak hanya di kabupaten rentan pangan tetapi juga di kabupaten tahan pangan. Rata-rata angka kemiskinan di kabupaten rentan pangan sebesar 22,91 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,82 persen (Susenas Maret 2018).
- Sementara kota-kota di kelompok 1-3 diindikasikan (5 kota) oleh: i) tingginya prevalensi balita stunting, ii) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iii) tingginya penduduk miskin. Kota rentan pangan memiliki rata-rata pengeluaran pangan >65% masih tinggi yaitu sebesar 17,41 persen; rata-rata 37,21 persen penduduknya memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar air bersih dan rata-rata stunting pada balita sebesar 36,96 persen.
- Wilayah provinsi juga dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP provinsi. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan provinsi yang memiliki

ketahanan pangan paling baik. Sebaran IKP provinsi berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 15.

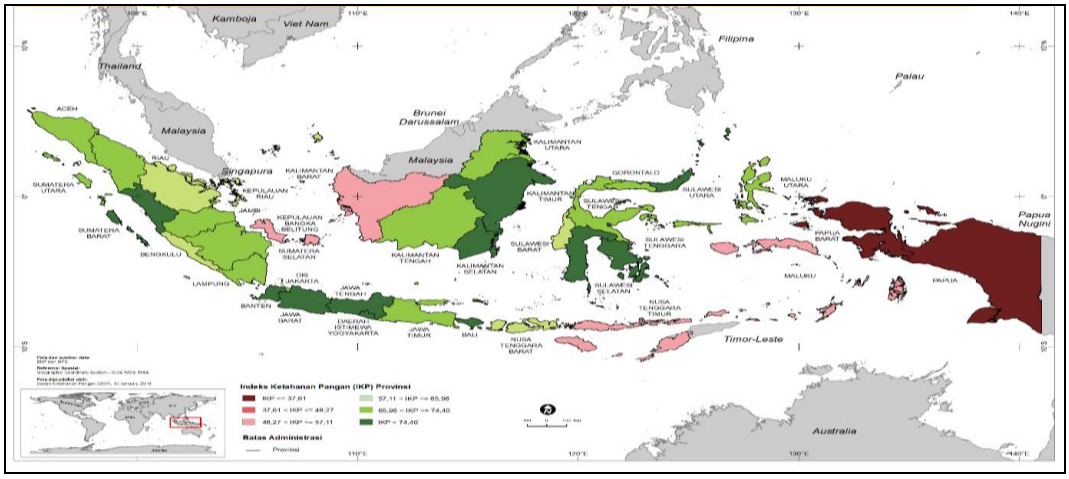

Gambar 19. Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2019

- Ada 6 provinsi atau 17,6% dari 34 provinsi memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 2 provinsi (5,9%) masuk kelompok 1 dan 4 provinsi (11,7%) masuk kelompok 3. Provinsi yang masuk kedalam kelompok 1 adalah Papua dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Barat dan Kep. Bangka Belitung masuk dalam kelompok 3 (Gambar 5).

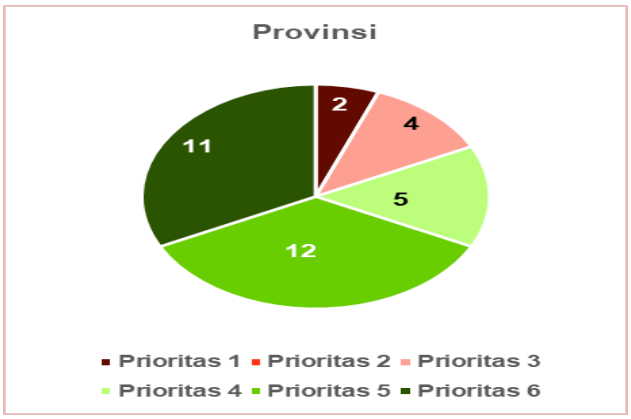

Gambar 20. Distribusi IKP Provinsi Tahun 2019

- Provinsi-provinsi dalam kelompok rentan pangan kelompok 1-3 (6 provinsi) diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya prevalensi balita stunting, dan iii) tingginya penduduk miskin. Rata-rata rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah provinsi rentan pangan kelompok 1-3 adalah 2,66.

Berdasarkan nilai IKP, 71 kabupaten (17,1%), 5 kota (5,1%) dan 6 provinsi (17,6%) perlu mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang

komprehensif. Namun demikian, nilai IKP bersifat dinamis sehingga pembaharuan akan dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil dari intervensi program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah.

E. Capaian Kinerja Lainnya

Di samping kegiatan di atas, kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran adalah peningkatan kapasitas aparat, yaitu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan rawan pangan, pengembagan akses pangan bagi aparat di daerah dan pusat.

1. Penyusunan Indeks Akses Pangan

Akses pangan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat, rumah tangga dan perseorangan untuk memperoleh pangan, baik dari produksi sendiri, pembelian, pemberian maupun bantuan untuk memenuhi kecukupan pangan setiap saat. Akses pangan dipengaruhi oleh aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek fisik terkait dengan situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah, yang sangat tergantung pada jalur distribusi dan infrastruktur dasar seperti sarana transportasi dan pasar. Aspek ekonomi terkait dengan pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan. Aspek sosial terkait dengan pendidikan, bantuan, pemberian dan modal sosial masyarakat, seperti partisipasi dalam lembaga kemasyarakatan, kepercayaan, norma dan jaringan sosial.

Gangguan dalam akses pangan masyarakat yang tidak ditangani dengan baik, lambat laun akan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan. Dari skala kejadiannya, kondisi rawan pangan dapat dikategorikan sebagai rawan pangan kronis dan rawan pangan transien. Kondisi rawan pangan transien bersifat mendadak dan sementara, yang apabila tidak segera ditangani dengan baik dapat mengarah kepada kondisi rawan pangan kronis.

Upaya pencegahan dan penanganan masalah akses pangan harus didasari data dan informasi situasi akses pangan yang tepat dan akurat. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran indeks akses pangan tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dilihat dari aspek fisik, ekonomi dan sosial. Informasi tentang aksesibilitas pangan di suatu wilayah sangat penting sebagai bahan perumusan program dan kebijakan intervensi akses pangan, khususnya di wilayah dengan aksesibilitas pangan yang rendah.

Tujuan penyusunan indeks akses pangan adalah Mengetahui wilayah sebaran situasi akses pangan di suatu wilayah secara komprehensif. Sasaran kegiatan ini adalah Siatuas akses pangan nasional, dan wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa).

Tabel 39. Ringkasan Indikator Indeks Akses Pangan

No.	Akses	Indikator	Keterangan	Sumber Data
1	**Fisik**	1. Proporsi sarana dan prasarana penyedia pangan (kelompok pertokoan dan pasar)	- Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan dengan jumlah rumah tangga desa - Semakin tinggi proporsi sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan ketersediaan pangan di desa tersebut semakin baik - Arah persepsi indikator Positif - Data Numerik	- Podes 2018 diolah BKP
		2. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara	- Desa yang tidak memiliki sarana penghubung darat, air dan udara yang memadai - Masyarakat di wilayah tersebut diasumsikan tidak memiliki kemampuan memperoleh pangan secara maksimal - Arah persepsi indikator Negatif - Data Kategorik	- Podes 2018 diolah BK
		3. Proporsi rumah tangga tanpa akses listrik	- Perbandingan antara jumlah rumah tangga tanpa akses listrik dengan jumlah rumah tangga desa - Masyarakat yang tidak memiliki akses listrik diasumsikan tidak memiliki kesejahteraan yang CUKUP baik yang berdampak terhadap kemampuan memperoleh pangan - Arah persepsi indikator Negatif - Data Numerik	- Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2018 - Proyeksi Rumah Tangga 2018

No.	Akses	Indikator	Keterangan	Sumber Data
	Ekonomi	4. Proporsi penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	- Perbandingan antara jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (Desil 1) dengan jumlah penduduk desa - Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah diasumsikan tidak memiliki daya beli yang memadai - Arah persepsi indikator Negatif - Data Numerik	- Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2018 - Proyeksi Penduduk 2018
		5. Proporsi rumah tangga memiliki aset	- Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki aset dengan jumlah rumah tangga desa - Rumah tangga yang memiliki aset diasumsikan memiliki kemampuan ekonomi yang CUKUP baik dan bisa dimanfaatkan jika terjadi gangguan akses pangan - Arah persepsi indikator Positif - Data Numerik	- Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2018 - Proyeksi Rumah Tangga 2018
	Sosial	6. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan desa	- Perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah lembaga kemasyarakatan desa - Desa dengan kelembagaan masyarakat desa yang semakin banyak diasumsikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga berdampak pada akses pangan - Arah persepsi indikator Positif - Data Numerik	- Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2018 - Proyeksi Penduduk 2018

Indeks Akses Pangan Nasional (IAP) disusun berdasarkan tiga aspek akses pangan, yaitu akses fisik, akses ekonomi dan akses social. IAP dikelompokkan lebih lanjut ke dalam 6 prioritas aksespangan dengan prioritas 1 sebagai wilayah yang paling aksesibiltas pangan rendah. IAP dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan penyusunan program dan intervensi kegiatan oleh para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun daerah.

Berdasarkan skor IAP, 74 kabupaten (19,5%) dan 7 (17,79%) perlu mendapatkan prioritas penanganan aksesibilitas rendah yang komprehensif. Namun demikian, skor IAP bersifat dinamis sehingga pembaharuan akan dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil dari intervensi program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah.

Kinerja akses pangan akan berpengaruh pada capaian ketahanan pangan. Walaupun ketersediaan pangan mencukupi, namun masih terjadi masalah pangan dan gizi (penduduk rawan pangan, stunting, kurang gizi). Permasalahan akses pangan adalah ketimpangan PDRB antar wilayah/provinsi dan pembangunan sarana dan prasarana, geografi wilayah, besaran dan ketimpangan pendapatan rumahtangga, kenaikan harga pangan dan non pangan, serta perilaku konsumsi pangan yang menyimpang. Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya peningkatan akses pangan rumahtangga dapat ditempuh melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah Indonesia Timur, peningkatan pendapatan masyarakat, stabilisasi harga pangan dan non pangan, dan peningkatan pengetahuan rumahtangga akan pola pangan bergizi dan sehat, serta bantuan pangan (pemerintah, swasta, masyarakat).

2. Bimbingan Teknis Monitoring Stok Gabah dan Beras Di Penggilingan Tahun 2019

Pertemuan Bimbingan Teknis untuk koordinator dan enumerator Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan dilaksanakan di Hotel The Mirah, Bogor pada Tanggal 4 – 5 April 2020. Pertemuan dihadiri oleh 117 orang yang terdiri dari koordinator provinsi dan enumerator kabupaten. Tujuan kegiatan ini adalah membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman bagi apparat daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data dan penyampaian laporan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di pengilingan.

Materi dan Narasumber pada pelatihan koordinator enumerator monitoring stok gabah dan beras di penggilingan yaitu :

a. Arahan Kepala Badan Ketahanan Pangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akses Pangan.
b. Penyampaian materi yang meliputi :
    - Materi Kebijakan Monitoring Stok Gabah di penggilingan oleh Kepala Bidang Akses Pangan.
    - Perhitungan Sampel Monitoring Stok Provinsi oleh Dr. Farit M Afendi (IPB).
    - Materi Monitoring Stok Gabah di penggilingan oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Akses Pangan.
    - Materi Aplikasi Monitoring Stok di Penggilingan oleh Galih Tresnandika (Konsultan).

Beberapa hal yang dapat dicatat dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

1) Ketersediaan beras sangat dipengaruhi oleh produksi domestik, ekspor, impor dan stok/cadangan beras. Cadangan beras nasional terdiri dari cadangan beras pemerintah dan cadangan beras masyarakat.
2) Penyediaan data dan informasi stok di masyarakat khususnya di penggilingan padi sudah dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sejak tahun 2015, sehingga data stok gabah dan beras di penggilingan saat ini sudah tersedia secara periodik dan berkelanjutan. Data yang dikumpulkan tersebut dapat memberikan gambaran situasi stok gabah dan beras di penggilingan secara nasional.
3) Pada tahun 2019, monitoring stok beras tetap dilaksanakan di 1.000 penggilingan yang tersebar di 64 kabupaten di 22 provinsi.
4) Hasil pertemuan Bimtek antara lain :
   a. Dalam pengambilan data stok di penggilingan di setiap kabupaten perlu dipertimbangkan jarak antar penggilingan, sehingga perlu ditinjau kembali jumlah sampel yang menjadi tanggung jawab enumerator dan biaya perjalanan ke lokasi.
   b. Berdasarkan data PIPA BPS tahun 2012 yang digunakan untuk sampel setelah dilakukan verifikasi di lapangan ada beberapa penggilingan yang sudah tidak aktif atau beralih fungsi. Oleh karena itu diharapkan sampel penggilingan dapat diganti sesuai dengan kapasitas yang sama.
   c. Penggilingan yang menjadi sampel sebaiknya yang kooperatif untuk menjaga kontinuitas data.
   d. Kabupaten yang sudah dijadikan sampel ditahun sebelumnya dan memiliki kinerja yang baik disarankan untuk tetap dijadikan sampel pada tahun berikutnya.
   e. Kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan diharapkan dapat diterapkan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini sudah ada beberapa provinsi yang sudah menganggarkan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan melalui dana APBD. Dengan tersedianya data estimasi stok di provinsi dan kabupaten dapat melengkapi data estimasi stok di tingkat nasional.
   f. Dalam rangka untuk menyediakan informasi stok di penggilingan berbasis web telah dikembangkan Aplikasi Sigiling yang penggisian datanya melibatkan enumerator kabupaten/kota. Aplikasi Sigiling ini mudah digunakan dan bisa dibuka melalui HP sehingga memudahkan enumerator untuk mengisi data.
5) BKP setiap tahunnya akan meningkatkan jumlah sampel penggilingan untuk meningkatkan keakuratan data nya. Selain itu melakukan pendataan ulang pada penggilingan kecil yang banyak beralih fungsi ke penggilingan jasa.

3. Bimbingan Teknis Monitoring Stok Beras Di Pedagang Tahun 2019

Bimtek Kegiatan Monitoring Stok Beras di Pedagang dilaksanakan di Hotel The Mirah, Bogor pada Tanggal 5 – 6 April 2019. Tujuan kegiatan ini adalah membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman bagi aparat daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data dan penyampaian laporan kegiatan monitoring stok beras di pedagang.

Beberapa hal yang dapat dicatat dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

1. Beras merupakan komoditas strategis yang dikonsumsi sebagai besar masyarakat Indonesia sehingga tujuan penyelenggaraan pangan untuk memudah akses pangan masyarakat untuk memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan harga terjangkau.
2. Ketersediaan beras sangat dipengaruhi oleh produksi domestik, ekspor, impor dan stok/cadangan beras. Cadangan beras nasional terdiri dari cadangan beras pemerintah dan cadangan beras masyarakat.
3. Cadangan beras pemerintah dikuasai oleh Perum Bulog dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sedangkan cadangan beras masyarakat tersebar di rumah tangga petani dan konsumen, pedagang, hotel, restoran dan industri penggilingan.
4. Data stok beras yang ada di pemerintah maupun di masyarakat sangat penting untuk mengetahui ketersediaan beras nasional, dan informasi stok ini sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan ketersediaan pangan di suatu wilayah.
5. Data stok beras di pemerintah relatif lebih mudah diperoleh datanya di Perum Bulog, sedangkan data stok beras di masyarakat sudah dilakukan di penggilingan dan pedagang dan datanya sudah tersedia secara berkala setiap mingguan. Namun stok beras di masyarakat lainnya akan diupayakan penyediaan datanya.
6. Penyediaan data dan informasi stok di masyarakat telah dilakukan Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2012, melalui kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan. Pada tahun 2018, kegiatan monitoring stok di penggilingan dilakukan pada 1.000 sampel penggilingan yang tersebar di 22 provinsi pada 64 kabupaten sehingga data stok di penggilingan sudah tersedia secara periodik (mingguan dan bulanan).
7. Untuk memperluas informasi data stok beras di masyarakat, Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2019 melakukan monitoring stok beras di pedagang. Kegiatan monitoring stok beras di pedagang akan dilaksanakan pada 18 provinsi pada 57 kabupaten/kota dan 640 sampel.
8. Mekanisme pengumpulan data stok beras di pedagang dilakukan setiap minggu pada hari Selasa dan dilaporkan kepada koordinator provinsi untuk diverikasi datanya selanjutnya data stok dikirim ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian paling lambat hari Kamis melalui email/fax/telp/sms/whatsapp.

9. Pengumpulan data stok beras di pedagang yang dilakukan saat ini adalah gambaran stok nasional. Jika provinsi/kabupaten/kota menginginkan gambaran situasi stok beras diwilayahnya, disarankan untuk membuat kegiatan serupa.
10. Berdasarkan data BPS hasil Sensus Ekonomi tahun 2016 yang digunakan untuk sampel, terdapat kendala setelah dilakukan verifikasi di lapangan, dimana ada beberapa pedagang yang sudah tidak aktif atau beralih fungsi. Oleh karena itu sampel pedagang dapat diganti sesuai dengan skala/tipe yang sama.
11. Dalam pengumpulan data stok beras di pedagang ditetapkan dua jenis kualitas beras, yaitu beras medium dan premium. Hal ini untuk mengetahui jumlah stok beras medium dan premium yang ada di pedagang.
12. Pedagang yang menjadi sampel sebaiknya yang kooperatif untuk menjaga kontinuitas data. Untuk memudahkan pertugas enumerator memperoleh data di pedagang akan dibuatkan surat dari pusat atau kepala dinas.
13. Dalam pengumpulan data stok agar enumerator perlu memahami perbedaan data 0 (nol) dan kosong (tidak ada data) karena dapat mempengaruhi terhadap hasil pengolahan data.
14. Kegiatan monitoring stok beras di pedagang diharapkan dapat diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan tersedianya data estimasi stok di provinsi dan kabupaten, maka data stok beras di tingkat nasional tinggal menjumlahkan dari provinsi.
15. Dalam rangka untuk menyediakan informasi stok di pedagang berbasis web telah dikembangkan Aplikasi Sidagang yang pengisian datanya melibatkan enumerator kabupaten/kota. Aplikasi Sidagang ini mudah digunakan dan bisa dibuka melalui HP sehingga memudahkan enumerator dalam mengisi data saat di lapangan.
16. Rencana tahun 2020, kegiatan monitoring stok beras di pedagang akan ditingkatkan sampelnya menjadi 5.000 pedagang. Penambahan sampel tersebut agar semua provinsi ikut terlibat dalam kegiatan monitoring stok beras di pedagang, selain itu untuk memenuhi batas minimal sampel dari jumlah populasi.
17. Enumerator setelah selesai acara pertemuan Bimtek agar segera melakukan verifikasi dan menyampaikan profil pedagang ke pada pusat untuk dimasukan sebagai database aplikasi sidagang. Pelaporan stok beras di pedagang dimulai pada minggu ketiga bulan April 2019.

4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2019

Bimtek SKPG diselenggarakan pada tanggal 22 – 24 Mei 2019 di Hotel Salak The Heritage, Bogor. Peserta Bimtek Analisis SKPG ini adalah pejabat dan/atau staf yang menangani SKPG di provinsi dan kabupaten/kota. Bimtek Analisis SKPG ini dilaksanakan dengan metode pemaparan materi, diskusi, dan workshop. Materi yang disampaikan dalam bimtek tersebut antara lain: 1) SKPG dan Kebijakan Penanganan Kerawanan Pangan, 2) Implementasi SKPG, 3) Penyusunan dan

Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, 4) Praktek penyusunan SKPG bulanan dan tahunan, dan 5) Praktek pemetaan SKPG.

Secara umum kegiatan bimtek mendapatkan tanggapan yang positif dari peserta. Hal ini terlihat dari pertanyaan dan saran/ masukan maupun permasalahan yang disampaikan oleh para peserta. Beberapa hal atau tindak lanjut yang dapat disimpulkan dari hasil diskusi dengan peserta adalah penyusunan dan pelaporan SKPG disesuaikan dengan Permentan 43/2010, mengaktifkan kembali peran Pokja Pangan dan Gizi dalam pelaksanaan SKPG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perlu adanya dukungan anggaran yang memadai, dan menegaskan pentingnya pelaksanaan SKPG di daerah melalui surat dari pusat kepada daerah.

Beberapa hal penting arahan Kepala Badan Ketahanan Pangan terkait implementasi SKPG baik di tingkat pusat maupun daerah antara lain sebagai berikut: (1) SKPG merupakan instrumen penting untuk memotret situasi pangan dan gizi di suatu daerah sekaligus sebagai isyarat dini untuk meningkatkan kewaspadaan dan bahan rumusan kebijakan intervensi yang tepat dalam menangani kejadian kerawanan pangan di wilayah; (2) Bimbingan Teknis SKPG ini merupakan kegiatan penting untuk meningkatan kapasitas aparatur provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka penyediaan informasi kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 18/2012 dan Peraturan Pemerintah 17/2015; (3) Peserta Bimtek Analisis SKPG diharapkan menjadi trainer untuk memberikan pelatihan kepada aparat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing; (4) Peran Pokja Pangan dan Gizi perlu diaktifkan kembali, sedangkan bagi daerah yang belum membentuk diharapkan segera membentuk; (5) Dinas yang menangani ketahanan pangan wajib melakukan analisis deteksi dini dan mampu untuk melakukan prakiraan 1, 2, 3 bulan kedepan yang akan mengakibatkan kerawanan pangan baik yang disebabkan oleh bencana maupun pengaruh gejolak harga yang terjadi di masing-masing daerah dan segera melakukan intervensi yang tepat.

Terdapat beberapa rencana tindaklanjut yang yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: A. Rencana Tindaklanjut di Tingkat Daerah: (1) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melalui Dinas yang menangani Ketahanan Pangan diharapkan: (a) Melaksanakan penyusunan dan pelaporan SKPG bulanan secara rutin sesuai dengan Pedoman SKPG dengan mengacu pada Permentan 43/2010. Laporan hasil analisis SKPG yang dilakukan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dan dikirim kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Laporan SKPG kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat disampaikan melalui alamat email: pelaporanskpg@gmail.com; (b) Dinas yang menangani ketahanan pangan wajib melakukan analisis deteksi dini dan mampu untuk melakukan prakiraan 1, 2, 3 bulan kedepan yang akan mengakibatkan kerawanan pangan baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun pengaruh gejolak harga (kerawananan pangan transien) yang terjadi di masing-masing daerah dan segera melakukan intervensi yang tepat; (c) Mengaktifkan kembali peran Pokja Pangan dan Gizi dalam pelaksanaan SKPG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan daerah yang belum mempunyai Pokja Pangan dan Gizi diharapkan segera membentuk; (d) Dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan SKPG perlu adanya dukungan anggaran yang

memadai. Untuk itu, instansi yang menangani ketahanan pangan sangat diharapkan mengalokasikan anggaran secara khusus melalui APBD di daerahnya masing-masing; (e) Peserta Bimtek dari provinsi diharapkan menjadi pelatih (trainer) untuk memberikan bimbingan kepada aparat kabupaten/kota. B. Rencana Tindaklanjut di Tingkat Pusat: (a) Melakukan telaah terhadap Permentan 43/2010 dengan melibatkan instansi terkait dan pakar yang kompeten di bidangnya. Hasil telaah selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan peraturan terkait Pedoman SKPG ke depan; (b) Dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan SKPG, ke depan perlu diagendakan pertemuan secara berkala direncanakan 4 kali selama setahun dengan mengundang provinsi; (c) Perlunya penegasan kembali pentingnya pelaksanaan SKPG di daerah.

5. Pertemuan Evaluasi Monitoring Stok Beras Di Penggilingan dan Pedagang Tahun 2019

Pertemuan dilaksanakan di Hotel Salak The Heritage pada tanggal 12 - 13 November 2019. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja koordinator provinsi dan enumerator kabupaten/kota serta memberikan motivasi agar lebih aktif dan disiplin dalam menyampaikan laporan ke pusat. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Hasil pertemuan evaluasi ini antara lain sebagai berikut:

1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa ketahanan pangan harus dapat terpenuhi sampai tingkat individu dan tugas Badan Ketahanan Pangan memastikan tidak ada satu individupun di negara ini yang kurang makan. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memantau ketersediaan dan distribusi pangan sehingga masyarakat dapat mengakses pangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah melakukan monitoring stok beras yang ada di pemerintah dan masyarakat. Badan Ketahanan Pangan telah melakukan monitoring stok beras di dua titik, yaitu penggilingan dan pedagang. Karena itu tugas enumerator dalam mengumpulkan data stok beras merupakan bagian yang sangat penting melalui pelaporan monitoring stok beras secara akurat. Kegiatan monitoring stok beras di tingkat pedagang dan penggilingan diperlukan untuk memetakan dimana lokasi surplus beras saat ini di sentra-sentra produksi di Indonesia.
2) Ketersediaan beras tercukupi sampai dengan bulan Maret 2020, hal ini dapat terlihat dari kondisi surplus tahun ini ditambah stok yang ada di Bulog sebesar 2,2 juta ton dan ditambah stok beras yang ada di penggilingan sebesar 1,4 juta ton dan pedagang sebesar 1,2 yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan setiap mingguan.
3) Badan Pusat Statistik sejak tahun 2018 menggunakan KSA (Kerangka Sampel Area) untuk mengestimasi luas panen produksi padi. Hasil KSA 2019 dan

cadangan beras Bulog memperlihatkan bahwa stok beras cukup aman hingga akhir tahun.

4) Beras sebagai komoditas penting dan strategi apabila terjadi gejolak harga akan menyebabkan terjadi inflasi sehingga informasi stok beras sangat diperlukan. Stok beras yang ada di masyarakat sebagian besar ada di Rumah Tangga produsen, sehingga perlu diketahui berapa jumlah stoknya. Harus ada institusi yang mengumpulkan data stok tersebut.

5) Stok beras di di rumah tangga produsen yang tersimpan dalam bentuk GKP dan GKG, maka perlu dilakukan survei untuk memotret sebaran stok di masyarakat. Survei tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan data stok, tetapi juga dapat diketahui sebaran wilayah (geospasial).

6) Dalam rangka meningkatkan kualitas data stok beras di penggilingan dan pedagang, Badan Ketahanan Pangan telah melakukan upaya, antara lain melakukan perbaikan metodologi, peningkatan kapasitas enumerator, evaluasi kinerja koordinator dan enumerator, dan melakukan kajian uji validitas data stok serta menambah jumlah sampel.

7) Hasil uji validitas stok beras di penggilingan yang dilakukan pada 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera menunjukkan bahwa penggilingan besar dan sedang menunjukan hasil uji yang valid, sementara untuk sampel penggilingan kecil tidak valid pada selang kepercayaan 90%. Upaya yang perlu diperbaiki pada penggilingan padi kecil adalah melakukan penataan ulang jumlah sampel penggilingan kecil yang tidak tepat sasaran karena banyak yang beralih pada jasa sehingga tidak memiliki stok. Badan Ketahanan Pangan akan memperluas monitoring stok ke tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, agar informasi stok beras di masyarakat dapat tersedia secara lengkap.

8) Peran enumerator dalam mengumpulkan data stok beras di penggilingan dan pedagang sangat menentukan arah kebijakan pangan saat ini dan kedepan. Untuk itu enumerator agar paham betul dengan tugas yang dilaksanakan serta melakukannya dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab. Pengambilan datanya harus dilakukan dengan tepat dan cermat sehingga data yang dihasilkan valid.

9) Kendala enumerator dalam mengumpulkan data stok di penggilingan dihadapkan pada wilayah yang cukup luas dan lokasi penggilingan yang cukup jauh sehingga tidak memungkin dalam satu hari dapat mengumpulkan data secara lengkap sehingga perlu strategi yang tepat agar laporan dari penggilingan dapat dikirim dengan tepat waktu.

10) Untuk meningkatkan kelancaran data stok beras di penggilingan dan pedagang, beberapa kordinator provinsi telah melakukan upaya untuk menggerakkan enumerator agar dapat mengirimkan data tepat waktu, seperti melakukan pertemuan, komunikasi intensif, memberikan honor dan pulsa enumerator dengan tepat waktu, memantau pelaporan enumerator secara berkala, memberikan teguran lisan bagi enumerator yang telat mengirimkan laporan,

memberikan sanksi berupa penundaan pembayaran honor atau penggantian enumerator bagi enumerator yang tidak kooperatif dalam mengirimkan laporan.

11) Provinsi yang mempunyai jumlah penggilingan banyak agar di prioritaskan dalam kegiatan monitoring stok beras di penggilingan sehingga perlu ditambah sampelnya agar dapat mewakili penggilingan yang ada diwilayahnya. Provinsi yang belum mendapat alokasi monitoring stok pedagang agar dapat diusulkan di tahun 2020.

12) Jumlah stok di wilayah dihitung dari stok yang diambil pada satu titik pada saat pengambilan data. Stok sifatnya dinamis, jumlah stok pun akan berbeda saat panen raya dengan masa paceklik sehingga ada institusi yang dapat memotret pergerakan stok dari penggilingan ke pedagang.

13) Data stok beras yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan untuk mengetahui stok beras yang ada di penggilingan dan pedagang secara nasional. Untuk mengetahui jumlah stok beras di penggilingan yang ada di provinsi dan kabupaten perlu dilakukan dengan menggunakan jumlah sampel yang telah ditentukan. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah menyusun Panduan Monitoring Stok untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga Dinas dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

14) Penggilingan dan pedagang yang telah memberikan data stok kepada Badan Ketahanan Pangan agar dapat dipikirkan jenis bantuan yang bisa diberikan. Untuk penggilingan, Badan Ketahanan Pangan telah memberikan bantuan kepada Gapoktan LUPM. Untuk pedagang selama ini belum ada bantuan yang diberikan agar diinventarisir bentuk bantuan apa yang bermanfaat dan segera diusulkan.

15) Untuk lebih menjalin kerjasama yang baik antara enumerator kab//kota, koordinator provinsi serta tim pusat, agar pertemuan evaluasi tahun depan dipadukan dengan kegiatan seperti outbound sehingga dapat menumbuhkan kerjasama tim agar solid antara pusat dan daerah.

F. Dukungan Instansi Lain

Pada tahun 2019 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mendapatkan dukungan dari beberapa instansi terkait antara lain :

(1) Badan Pusat Statistik (BPS), (2) Kementerian Kesehatan, (3) Kementerian Perdagangan, (4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (5) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), (6) Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, (7) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), (8) Kementerian Sosial, (9) Kementerian Dalam Negeri, (10) Bank Indonesia, (11) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BPPN), (12) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (13) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (14) Perum Bulog, (15) Institut Pertanian Bogor (IPB) dan (16) *World Food Programme (WFP*).

Dukungan yang diberikan berupa penyediaan data yang digunakan dalam analisis yang terkait kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Selain itu, BAPPENAS juga memberikan dukungan dengan menjadikan peta FSVA sebagai salah satu sumber wacana dalam penentuan indikator pembangunan desa.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan selama tahun 2019 telah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang tampak dari hasil pengukuran kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan, yang ditetapkan melalui 3 indikator berikut:

1. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional sebesar 100% dengan capaian 136,70% atau 136,70 persen;
2. Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi sebesar 4 dengan capaian 6 atau150 persen;
3. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan sebesar 1% dengan capaian pertumbuhan negatif sebesar -3,6%.

Untuk mencapai sasaran strategis stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen dialokasikan anggaran untuk pusat dan daerah melalui Satker Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebesar Rp. 47.475.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 45.299.617.213,- atau 95,42 persen (posisi per tanggal 31 Desember 2019), yang dialokasikan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan meliputi : Sistem Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan, serta Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian kualitas pelaksanaan kegiatan perlu peningkatan koordinasi antar instansi dan lintas sektor yang terkait, baik di pusat maupun di daerah;
2. Peningkatan koordinasi antar instansi di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Perlunya sosialiasi kegiatan Pusat ke daerah;
4. Perlunya monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah;
5. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat dan Daerah;
6. Perlunya dukungan anggaran di Pusat dan Daerah
7. Perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : http://bkp.deptan.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Hendriadi
Jabatan : Kepala Badan Ketahanan Pangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 09 Desember 2019

Pihak Kedua

Agung Hendriadi

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Komoditas Pangan Strategis Nasional	1-1-Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional	100 %

	KEGIATAN		ANGGARAN
1	Pengembangan Ketersediaan dan Pengamanan Rawan Pangan	Rp.	47,475,000,000

Jakarta, 09 Desember 2019

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Agung Hendriadi

Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Andriko Noto Susanto

Lampiran 2. SK Tim Penyusun LAKIN Tahun 2019 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR B-004/KPTS/OT.050/J.2/01/2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi program kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019, diperlukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan SAKIP di Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 839/Kpts/KP.230/12/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Koordinator : Kepala Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Anggota :

1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Akses Pangan, Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Kepala Sub Bidang Analisis Ketersediaan Pangan, Bidang Ketersediaan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
3. Rima Nurisa Brahmani, SGz, MM,
   Staf Bidang Ketersediaan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
4. Apriani, SP, MSi,
   Staf Bidang Ketersediaan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
5. Ir. Luqmiaty,
   Staf Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
6. Agustina Suprihatin, SE,
   Staf Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
7. M. Wiryadi Effendi, SP,
   Staf Bidang Kerawanan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
8. Nurulla Tri Suwardani, SP, MT,
   Staf Bidang Kerawanan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
9. Syamsurizal, S. Kom,
   Staf Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

10. Dessy Trihastuti,
Staf Bidang Kerawanan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan analisis terhadap data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LAKIN lingkup Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019;
b. merumuskan dan menyusun LAKIN lingkup Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

KEEMPAT : Tim melaksanakan tugas dari 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020
KEPALA PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Kepala Badan Ketahanan Pangan;
2. Yang bersangkutan.